

**MANAJEMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KOTA METRO**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Doktor dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam**

Oleh

HAMDI ABDUL KARIM

NPM: 1986031004



**PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**MANAJEMEN KURIKULUM
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM KOTA METRO**

DISERTASI

**Diajukan Kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Doktor dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam**

Oleh

**HAMDI ABDUL KARIM
NPM: 1986031004**



TIM PROMOTOR

**Promotor : Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd
Co-Promotor I : Prof. Dr. H. Ruhban Masykur, M.Pd
Co-Promotor II : Dr. H. Mukhtar Hadi, M.Si**

**PROGRAM DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR
SETELAH UJIAN TERBUKA DISERTASI**

Promotor

Co-Promotor I

Co. Promotor II


Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd


Prof. Dr. H. Rubhan Masykur, M. Pd


Dr. H. Mukhtar Hadi, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam
UIN Raden Intan Lampung


Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd

Nama : **Hamdi Abdul Karim**

NPM : **1986031004**

Angkatan : **2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PASCASARJANA

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam Labuhan Ratu Kedaton Bandar Lampung 35142 Tlp. (0721) 5617070
Website: <http://pasca.radenintan.ac.id> Email: pascasarjana@radenintan.ac.id

PENGESAHAN

Disertasi dengan judul “Manajemen Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro” ditulis oleh Hamdi Abdul Karim, Nomor Pokok Mahasiswa: 1986031004 telah di ujikan pada Ujian Terbuka (Promosi) Kamis, 29 Desember 2022 Pukul 13.00 - 15.00 WIB pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Tim Penguji

Ketua Sidang: Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.

Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, M.Ag.

Penguji I : Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.

Penguji II : Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd.

Penguji III : Prof. Dr. H. Ruhban Masykur, M.Pd.

Penguji IV : Dr. H. Mukhtar Hadi, M.Si.

Penguji V : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.

Bandar Lampung, 30 Desember 2022

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.
NIP. 198008012003121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Z.A. Pagaralam Labuan Ratu Kedaton Bandar Lampung, Telp. 0721-5617070
website : pasca.radenintan.ac.id, Email : pascasarjana@radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Tim Penyelaras Disertasi Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **HAMDI ABDUL KARIM**
NPM : 1986031004
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul : MANAJEMEN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
Disertasi : AGAMA ISLAM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI KOTA METRO

Adalah benar disertasi yang bersangkutan telah dilakukan penyelarasan oleh Tim Penyelaras Disertasi dan diperbaiki sesuai dengan masukan. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENYELARAS

Prof. Dr. H. Yurnalis Etek

(.....)

Prof. Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd

(.....)

Dr. Koderi, M.Pd

(.....)

Bandar Lampung, 02 September 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi S3 MPI

Prof. Dr. H. Agus Pahrudin, M.Pd
NIP. 196408051991031008

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hamdi Abdul Karim

NPM : 1986031004

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi dengan judul: Manajemen Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro, adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam hasil karya saya, atau ada klaim dari pihak lain terhadap kelalaian disertasi yang saya buat ini.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022

Yang menyatakan,



Hamdi Abdul Karim

ABSTRAK

Kurikulum di perguruan tinggi harus dikelola dengan baik karena kurikulum merupakan penjamin sistem penilaian dan sistem kendali mutu *input* dan *outcome* perguruan tinggi. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di kota Metro yaitu Institut Agama Islam Negeri Metro, Institut Agama Islam Agus Salim Metro, Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro. Latar dan status kampus yang berbeda naungan organisasi dan akreditasi menjadi daya tarik untuk dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dalam manajemen kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di program studi Pendidikan Agama Islam. Tujuan penelitian ini menemukan dan mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum program studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis (*phenomenological Approach*). Sumber data penelitian terdiri dari dekan, wakil dekan bidang akademik, ketua program studi, dosen dan sumber data pendukung lainnya. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui kegiatan reduksi data (*reduction*), *display* (penyajian) data, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) dan uji keabsahan data menggunakan triangulasi data

Hasil penelitian ditemukan 1) Perencanaan kurikulum diawali dengan memahami landasan yang dijadikan dasar penyusunan kurikulum. Perencanaan kurikulum melibatkan berbagai pihak, memiliki prinsip, karakteristik dan memiliki komponen-komponen dalam perencanaannya. 2) Pengorganisasian kurikulum diawali dari memahami prosedur-prosedur dalam pengorganisasian kurikulum, memperhatikan faktor-faktor dan menentukan model dalam pengorganisasian kurikulum. 3) Pelaksanaan kurikulum di program studi Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan melakukan kajian terhadap pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum dan model serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. 4) Evaluasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di program studi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam ini memiliki tujuan dan peran tertentu. Evaluasi kurikulum di program studi Pendidikan Agama Islam dilaksanakan dengan beberapa pendekatan model evaluasi kurikulum, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan prosedur dalam evaluasi kurikulumnya

Kata kunci: Manajemen Kurikulum, Pendidikan Agama Islam

ABSTRACT

The curriculum in higher education must be managed properly because the curriculum is a guarantor of the assessment system and quality control system for *inputs* and *outcomes* of higher education. Islamic Religious Universities in the city of Metro are Metro State Islamic Institute, Agus Salim Metro Islamic Institute, Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Institute of Islamic Religion and Metro Muhammadiyah University. The background and status of different campuses under the organization and accreditation is an attraction for further study and research in Curriculum Management based on the Indonesian National Qualifications Framework for Islamic Religious Education study programs. The purpose of this study is to find and describe the planning, organization, implementation and evaluation of the curriculum of the Islamic Religious Education Study Program based on the Indonesian National Qualifications Framework at the Metro City Islamic Religious College.

This research is a field research using a qualitative method with a phenomenological approach. Research data sources consist of deans, vice deans for academics, heads of study programs, lecturers and other supporting data sources. Collecting data using interviews, observation and documentation. Data analysis uses the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing/verification and data validity testing using data triangulation.

The results of the study found 1) Curriculum planning begins with understanding the foundation that is used as the basis for curriculum preparation. Curriculum planning involves various parties, has principles, characteristics and has components in its planning. 2) Organizing the curriculum begins with understanding the procedures in organizing the curriculum, paying attention to the factors and determining the model in organizing the curriculum. 3) The implementation of the curriculum in the Islamic Religious Education study program is carried out by conducting a study of the approaches used in the implementation of the curriculum and models and the factors that influence the implementation of the curriculum. 4) Evaluation of the curriculum based on the Indonesian National Qualifications Framework in the Islamic Religious Education study program at Islamic Higher Education has certain goals and roles. Curriculum evaluation in the Islamic Religious Education study program is carried out with several curriculum evaluation model approaches, carried out with the principles and procedures in evaluating the curriculum.

Keywords: Curriculum Management, Islamic Religious Education.

المخلص

يجب أن تدار المناهج في التعليم العالي بشكل صحيح لأن المناهج الدراسية هي ضامن لنظام التقييم ونظام مراقبة الجودة/مدخلات ونتائج التعليم العالي. الجامعات الدينية الإسلامية في مدينة مترو هي معهد مترو سنتيت الإسلامي ، معهد أجوس سالم مترو الإسلامي ، معهد مترو معاريف نهضة العلماء للدين الإسلامي وجامعة مترو المحمدية. تعد خلفية وحالة الجامعات المختلفة تحت رعاية التنظيم والاعتماد عامل جذب لمزيد من الدراسة والبحث في إدارة المناهج الدراسية بناءً على إطار المؤهلات الوطنية الإندونيسية لإبرامج دراسة التربية الدينية الإسلامية. الغرض من هذه الدراسة هو إيجاد ووصف تخطيط وتنظيم وتنفيذ وتقييم منهج برنامج دراسة التربية الدينية الإسلامية على أساس إطار المؤهلات الوطنية الإندونيسية في الكلية الدينية الإسلامية لمدينة مترو هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام الأساليب النوعية مع نهج الظواهر). تتكون مصادر بيانات البحث من العمدة وكلاء العمدة الأكاديميين ورؤساء البرامج الدراسية والمحاضرين ومصادر البيانات الداعمة الأخرى. جمع البيانات باستخدام المقابلات من خلال Miles and Huberman والملاحظة والتوثيق. تحليل البيانات باستخدام نموذج أنشطة تقليل البيانات (التخفيض) ، وعرض (تقديم) البيانات ، واستخلاص النتائج (استخلاص النتائج / التحقق) واختبار صحة البيانات باستخدام مثلث البيانات وجدت نتائج الدراسة (1) المنهج يبدأ التخطيط بفهم الأساس المستخدم لإعداد المنهج الأساسي. يشمل تخطيط المناهج أطرافاً مختلفة ، وله مبادئ وخصائص ومكونات في تخطيطه. (2) يبدأ تنظيم المنهج بفهم إجراءات تنظيم المنهج ، والاهتمام بالعوامل وتحديد النموذج في تنظيم المنهج. (3) يتم تنفيذ المنهج في برنامج دراسة التربية الدينية الإسلامية من خلال دراسة المناهج المستخدمة في تنفيذ المناهج والنماذج والعوامل التي تؤثر على تنفيذ المنهج. (4) تقييم المنهج على أساس إطار المؤهلات الوطنية الإندونيسية في برنامج دراسة التربية الدينية الإسلامية في التعليم العالي الإسلامي له أهداف وأدوار معينة. يتم تقييم المناهج في برنامج دراسة التربية الدينية الإسلامية باستخدام عدة مناهج نموذجية لتقييم المناهج ، يتم تنفيذها مع المبادئ والإجراءات في تفويم المناهج

الكلمات الرئيسية: إدارة المناهج ، التربية الدينية الإسلامية .

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	dak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kh dengan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titi di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Komponen rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	Muta' aqqidin
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak berlaku bagi kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”.

زكاة الفطرة	Ditulis	Zakātul fiṭri
-------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A Jāhiliyah
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	A yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī Kar m
Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	U furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis Ditulis	Ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au qaulun

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan *rahmat, taufiq, dan hidayah*-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian disertasi yang berjudul “Manajemen Kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro.” Selesainya penulisan disertasi ini semata-mata berkat pertolongan Allah SWT setelah peneliti melewati rintangan dan hambatan yang cukup melelahkan yang dimulai dari kesulitan dalam pengumpulan literatur sampai kesulitan di lokasi penelitian. *Salawāt* dan *salām* semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beliaulah sebagai teladan dalam kehidupan bagi kita

Peneliti juga menyadari bahwa pelaksanaan riset dan penyusunan hasil riset disertasi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan, motivasi, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan fasilitas penelitian yang memadai sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan arahan dan masukan dalam proses penyelesaian penelitian disertasi ini.
3. Prof. Dr. H. Agus Pahruddin, M.Pd. selaku Ketua Program Studi S3 Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dan Promotor yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan sumbangan pemikiran, petunjuk, arahan, dan motivasi kepada peneliti sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Dr. Afif Amrullah, M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi S3

Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung yang memotivasi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini tepat waktu.


5. Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd. selaku Co-Promotor I yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.
6. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si., selaku Co-Promotor II yang telah meluangkan waktu membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis selama penelitian disertasi ini.
7. Rektor, wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, ketua Program Studi dan Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Metro, IAI Ma'arif NU Metro, IAI Agus Salim Metro dan UM Metro dan semua pihak yang telah membantu peneliti ketika pelaksanaan penelitian di lapangan.
8. Para guru besar, doktor, dan seluruh dosen serta staf Pascasarjana UIN Raden Intan yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program doktor ini dengan baik.
9. Kedua orangtua, mertua, istri, dan buah hati penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi dalam penyelesaian program doktoral ini.
10. Rekan-rekan satu perjuangan Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2019 yang banyak menuangkan ide-idenya kepada peneliti.
11. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penelitian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga hasil penelitian disertasi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya manajemen pendidikan pada bidang manajemen kurikulum. Akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penelitian disertasi ini masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya

Lampung, 19 Desember 2022

Peneliti



Hamdi Abdul Karim
NPM. 1986031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TIM PEMBIMBING PROMOTOR	ii
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERSETUJUAN TIM PENYELARAS	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	20
C. Rumusan Masalah	21
D. Tujuan Penelitian.....	22
E. Manfaat Penelitian.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Kurikulum	24
1. Manajemen	24
2. Kurikulum.....	50
3. Manajemen Kurikulum.....	74
a. Perencanaan Kurikulum.....	77
b. Pengorganisasian Kurikulum.....	88
c. Pelaksanaan Kurikulum	103
d. Evaluasi Kurikulum	120

B. Pendidikan Agama Islam	128
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam.....	128
2. Dasar Pendidikan Agama Islam	133
3. Tujuan Pendidikan Agama Islam	141
4. Materi Pendidikan Agama Islam	144
C. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia.....	147
1. Regulasi Pengembangan Kurikulum pada Perguruan Tinggi	147
2. Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI	148
3. Pengembangan Silabus Berbasis KKNI	152
4. Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Berbasis KKNI	153
D. Hasil Penelitian yang Relevan.....	156
E. Kerangka Pikir Penelitian.....	164

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	167
B. Pendekatan Penelitian	168
C. Data dan Sumber Data.....	172
D. Teknik Pengumpulan Data.....	174
E. Teknik Analisis Data.....	178
F. Pemeriksaan Keabsahan Data	183

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian	187
1. IAIN Metro	187
2. IAIM NU Metro	204
3. IAI Agus Salim Metro	212
4. Universitas Muhammadiyah Metro	225
B. Temuan Penelitian.....	237
1. Perencanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro	238
a. Perencanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAIN Metro	239
b. Perencanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Ma'arif NU Metro	244
c. Perencanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Agus Salim Metro	248
d. Perencanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di UM Metro.....	253

2. Pengorganisasian kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro.....	258
a. Pengorganisasian kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAIN Metro.....	258
b. Pengorganisasian kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Ma'arif NU Metro	262
c. Pengorganisasian kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Agus Salim Metro	267
d. Pengorganisasian kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di UM Metro.....	271
3. Pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro	276
a. Pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAIN Metro.....	277

b.	Pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Ma'arif NU Metro	280
c.	Pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Agus Salim Metro	282
d.	Pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di UM Metro	285
4.	Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro	287
a.	Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAIN Metro	288
b.	Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Ma'arif NU Metro	292
c.	Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di IAI Agus Salim Metro	296

d. Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di UM Metro	299
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	303
1. Perencanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Kota Metro	303
2. Pengorganisasian kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro.....	324
3. Pelaksanaan kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro	331
4. Evaluasi kurikulum Program Studi Pendidikan Agama Islam berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kota Metro	339
D. Novelty Penelitian	348

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	360
B. Rekomendasi	362

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat izin penelitian
- Lampiran 2 Surat keterangan penelitian
- Lampiran 3 Surat keterangan bebas plagiasi
- Lampiran 4 Pedoman observasi
- Lampiran 5 Pedoman wawancara
- Lampiran 6 Pedoman dokumentasi
- Lampiran 7 Dokumen pendukung (foto dan dokumen)

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Peringkat Perkembangan Manusia Indonesia dibanding Negara ASEAN 2019	3
2. Table 1.2 Tren IPM/HDI Indonesia berdasarkan data deret waktu yang konsisten dan <i>goalpost</i> baru	4
3. Tabel 1.3 Data Program Studi IAIN Metro	7
4. Tabel 1.4 Data Program Studi IAI Ma'arif NU Metro	8
5. Tabel 1.5 Data Program Studi IAI Agus Salim Metro.....	9
6. Tabel 1.6 Data Program Studi FAI UM Metro	10
7. Tabel 2.1 Model Konsep Kurikulum	63
8. Tabel 2.2 Model Desain Kurikulum	64
9. Tabel 2.3 Model Pendekatan Kurikulum	65
10. Tabel 2.4 Peran Guru/Dosen Sebagai Pengembang Kurikulum.....	66
11. Tabel 4.1 Nilai dasar yang dianut dalam setiap aktivitas IAIN Metro	192
12. Tabel 4.2 Prinsip dasar dan pedoman sivitas akademika IAIN Metro.....	194
13. Tabel 4.3 Fakultas/Program Pascasarjana dan Program Studi IAIN Metro	195
14. Tabel 4.4 Struktur Kurikulum Program Studi PAI FTIK IAIN Metro	199
15. Tabel 4.5 Sebaran Persemester Struktur Kurikulum Program Studi PAI FTIK IAIN Metro	201
16. Tabel 4.6 Fakultas / Program Pascasarjana dan Program Studi IAIM NU Metro.....	205
17. Tabel 4.7 Struktur kurikulum Program Studi PAI FT IAI Ma'arif NU Metro	210

18. Tabel 4.8 Periode kepemimpinan IAI Agus Salim	215
19. Tabel 4.9 Struktur kurikulum program Studi PAI FT IAI Agus Salim Metro	220
20. Tabel 4.10 Sebaran mata kuliah program studi PAI FT IAI Agus Salim Metro	222
21. Table 4.11 Fakultas, Diploma, Pascasarjana dan Program Profesi UM Metro	227
22. Tabel 4.12 Struktur Kurikulum Program Studi PAI FAI UM Metro	232
23. Table 4.13 Distribusi mata kuliah persemester program studi PAI FAI UM Metro.....	235
24. Tabel 4.14 Isi Dokumen Kurikulum Program Studi PAI Berbasis KKNI di PTKI Kota Metro	315

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Komponen Kurikulum	52
2. Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian	166
3. Gambar 4.1 Perencanaan Kurikulum Prodi PAI PTKI Berbasis KKNI	314
4. Gambar 4.2 Pengorganisasian Kurikulum Prodi PAI PTKI Berbasis KKNI	330
5. Gambar 4.3 Pelaksanaan Kurikulum Prodi PAI PTKI Berbasis KKNI.....	338
6. Gambar 4.4 Evaluasi Kurikulum Prodi PAI PTKI Berbasis KKNI.....	348
7. Gambar 4.5 Siklus Alir Manajemen Kurikulum Prodi PAI.....	350

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peran penting bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan dunia pada saat ini, bahwa negara-negara maju umumnya memiliki mutu pendidikan yang baik pula. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tentunya mempunyai kewajiban dan peranan penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Al-Qur'an juga menjelaskan akan pentingnya pendidikan, sebagai mana firman Allah SWT berikut:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahannya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang), mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya”. (QS. At-Taubah:122)¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan sebagai sarana dalam menuntut ilmu. Fungsi ilmu yang didapat dari proses pendidikan menurut surat at-taubah ayat 122 di atas adalah sebagai sarana peringatan bagi manusia. Makna tersirat dari ayat tersebut menggambarkan bahwa pendidikan akan dapat mengantarkan manusia yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tentunya ini akan menjadi peningkatan dalam

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 206

penguasaan dan kecerdasannya pada sesuatu. Kondisi ini akan dapat menjadi sarana bagi kemajuan bangsa dan negara. Ayat di atas menjelaskan bahwa menuntut ilmu dalam pendidikan disejajarkan dengan jihad. Pensejajaran ini menggambarkan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk kemajuan bangsa. Hadits nabi SAW juga menyatakan bahwa menuntut ilmu dalam pendidikan sangat penting bagi manusia, bahkan nabi menyatakan bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang. Hadits berikut menjelaskan tentang kewajiban dalam menuntut ilmu bagi setiap muslim.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Terjemahannya: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah).²

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi pada saat ini menghadapi tantangan dan persoalan berkaitan dengan mutu pendidikan, hal ini disebabkan oleh rendahnya mutu masukan (*input*), proses, sampai dengan mutu lulusan (*output*) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Data *United Nations Development Programme* (UNDP) bahwa *Human Development Indeks* (HDI) Indonesia tahun 2020 menduduki peringkat 107 dari 189 Negara. Pada peringkat ini, nilai HDI Indonesia yang dicatatkan adalah 0,718; dengan tingkat harapan hidup saat lahir 71,7; jumlah harapan lama pendidikan 13,6; rata-rata lama pendidikan yang ditempuh 8,2; dan pendapatan per kapita 11.459. UNDP telah mengelompokkan Indonesia menjadi negara dengan HDI tinggi, walaupun tidak ada peningkatan dalam rangking. Walaupun Indonesia

² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar Rabi'i bin Majah al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Hadist nomor 224, dinilai shahih oleh Syaikh Albani dalam *Shahih wa Dha'if*.

telah ditetapkan menjadi negara dengan HDI tinggi oleh UNDP tetap saja kondisi ini patut menjadi perhatian kita, karena kita masih tertinggal dengan beberapa negara sahabat. Filipina, yang berada di peringkat 107 dalam ranking HDI. Pendapatan per kapita yang jauh di bawah Indonesia (9.778), menyamai Indonesia dengan skor HDI 0,718. Kemudian Thailand yang mempunyai skor 0,777; masih mengungguli Indonesia di posisi 78. Lebih lanjut lagi Malaysia di posisi 62, dengan skor 0,81. Negara-negara sahabat ini masih mencatatkan prestasi dari segi *human development* yang lebih baik dari Indonesia menurut UNDP.³

Tabel 1.1
Peringkat Perkembangan Manusia Indonesia dibanding Negara ASEAN 2019

No	Negara	Rangking ASEAN	Rangking Internasional	HDI	Life expectancy at birth (years) SDG3	Expected years of schooling (years) SDG 4.3	Mean years of schooling (years) SDG 4.6	Gross national income (GNI) per capita (PPP \$) SDG 8.5
1	Singapura	1	11	0.935	0.938	83.6	16.4	11.6
2	Brunei Darussalam	2	47	0.838	75.9	14.3	9.1	63,965
3	Malaysia	3	62	0.81	76.2	13.7	10.4	27,534
4	Thailand	4	78	0.777	77.2	15	7.9	17,781
5	Filipina	5	107	0.718	71.2	13.1	9.4	9,778
6	Indonesia	5	107	0.718	71.7	13.6	8.2	11,459
7	Vietnam	6	117	0.704	75.4	12.7	8.3	7,433
8	Laos	7	137	0.613	67.9	11	5.3	7,413
9	Myanmar	8	147	0.583	67.1	10.7	5	4,961
10	Kamboja	9	144	0.594	69.8	11.5	5	4,246

Sumber: *Human Development Index (HDI) Ranking, From the 2020 Human Development Report.*⁴

³ United Nations Development Programme, *Human Development Index (HDI) Ranking 2019*, (New York: UNDP, 2020),. diakses 08 Februari 2021 dari <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>

⁴ *Ibid.*

Tabel 1.2
Tren IPM/HDI Indonesia berdasarkan data deret waktu yang konsisten
dan *goalpost* baru⁵

No	Tahun	Nilai IPM/HDI	Harapan hidup saat lahir	Harapan lama sekolah	Rata-rata lama sekolah	PNB per kapita (PPP\$)
1	1990	0.525	62.3	10.1	3.3	4,399
2	1995	0.560	64.3	10.1	4.2	5,838
3	2000	0.604	65.8	10.6	6.7	5,422
4	2005	0.633	67.3	10.9	7.4	6,506
5	2010	0.666	69.2	12.2	7.4	8,234
6	2015	0.696	70.8	12.8	7.9	10,029
7	2016	0.700	71.0	12.9	8.0	10,419
8	2017	0.704	71.3	12.9	8.0	10,811
9	2018	0.707	71.5	12.9	8.0	11,256
10	2019	0.718	71.7	13.6	8.2	11,459

Berdasarkan penjelasan dan tabel 1.1 di atas Indonesia menduduki urutan ke-107 dari 189 Negara. Indonesia masih dalam kelompok lemah dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Apabila melihat negara tetangga Malaysia jumlah tahun pendidikan yang diharapkan 13,7 dan rata-rata tahun pendidikan yang ditempuh 10,4 dan pendapatan perkapita 27,534. Hal ini masih lebih tinggi daripada Indonesia yang berada pada skor 13.6 dan 8.2 serta 11,459. Dengan analisa sederhana bahwa tingginya indeks pendidikan akan secara otomatis meningkatkan produktifitas masyarakatnya sehingga PNB per kapita menjadi tinggi, dan secara berkesinambungan pula akan meningkatkan tingkat harapan hidup karena masyarakatnya yang lebih sadar akan kesehatan.

⁵ United Nations Development Programme Indonesian, *Indonesia Masuk Kedalam Kelompok Kategori Pembangunan Manusia Tinggi*, (Jakarta: Id.UNDP, 2020)., diakses 08 Februari 2021 dari <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2019/Indonesia-masuk-ke-dalam-kelompok-kategori-pembangunan-manusia-tinggi.html>

Pendidikan tinggi di Era Industri 4.0 mempunyai peran yang sangat besar dalam mengejar ketertinggalan. Ketidakmampuan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan industri dianggap lambat dalam merespon perkembangan arus informasi dan teknologi.

Mencermati dan melihat kondisi dan situasi perguruan tinggi di Indonesia saat ini, tampak adanya perhatian besar terhadap upaya pemerintah dalam peningkatan *input*, proses dan *ouput* mutu lulusan perguruan tinggi. Tuntutan akan mutu lulusan pendidikan di Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena mutu lulusan pendidikan di Indonesia dianggap oleh banyak kalangan masih rendah. Rendahnya kualitas pendidikan Indonesia disorot karena lemahnya budaya mutu. Hal ini juga dialami oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Perguruan tinggi keagamaan Islam berjumlah sebanyak 857 PTKI di Indonesia, terdiri dari 58 PTKIN (17 UIN, 36 IAIN, dan 5 STAIN) dan 799 PTKIS/FAI.⁶ Dari 857 PTKI tersebut 35 PTKI berada di provinsi Lampung⁷ dengan rincian 2 PTKIN (UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Metro) dan 33 PTKIS/FAI. Sementara itu di kota Metro terdapat 4 PTKI, yaitu IAIN Metro, IAI Agus Salim Metro dan IAI Ma'arif NU Metro serta FAI Universitas Muhammadiyah Metro. Jumlah 857 perguruan tinggi keagamaan Islam yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa pendidikan seharusnya dapat menjadi sarana dalam meningkatkan HDI

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Emis Perguruan keagamaan Islam*, (Jakarta: Kemenag RI, 2021), diakses pada 08 Maret 2021 dari <http://emispendis.kemenag.go.id/ptkidashboard/>

⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Emis Perguruan keagamaan Islam di Lampung*, (Jakarta: Kemenag RI, 2021), diakses pada 08 Maret 2021 dari <http://emispendis.kemenag.go.id/ptki/>

Indonesia yang akan mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan unggul.

Negara maju dan unggul disini maksudnya tidak hanya unggul dan maju dalam bidang sains dan teknologi akan tetapi juga maju dan unggul dalam peradaban bangsa. Indonesia sebagai suatu bangsa juga telah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas konstitusional pemerintah negara republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".⁸ Pembukaan itu dipertegas lagi dengan pasal 31 undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945, ayat : 1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

⁸ DPR RI, Pembukaan UUD 1945, (Jakarta: DPR RI, 2021) diakses pada 01 April 2021 dari <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁹ Perguruan tinggi keagamaan Islam merupakan perguruan tinggi yang dapat mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Program studi pendidikan agama Islam merupakan salah satu program studi yang dapat merealisasikan hal tersebut. Begitu juga dengan program studi pendidikan agama Islam yang ada di kota Metro. Program studi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro menurut data PDDIKTI merupakan program studi yang jumlah mahasiswanya paling banyak dan tinggi peminatnya, hal tersebut dapat kita ketahui dari data sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Program Studi IAIN Metro¹⁰

No.	Kode	Nama Program Studi	Status	Jenjang	Akreditasi	Data Pelaporan Tahun Genap 2019		
						Jml Dosen Tetap	Jml Mhs	Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa
1	86208	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S1	A	14	1022	1 : 73.00
2	61406	Perbankan Syariah	Aktif	D3	A	0	9	-
3	74130	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Aktif	S2	B	3	52	1 : 17.33
4	86108	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S2	B	8	109	1 : 13.63
5	88104	Pendidikan Bahasa Arab	Aktif	S2	B	9	64	1 : 7.11
6	79203	Bahasa dan Sastra Arab	Aktif	S1	B	10	67	1 : 6.70
7	60202	Ekonomi Syariah	Aktif	S1	B	18	915	1 : 50.83
8	74234	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Aktif	S1	B	8	462	1 : 57.75
9	74230	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)	Aktif	S1	B	18	309	1 : 17.17
10	70233	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Aktif	S1	B	13	325	1 : 25.00
11	88204	Pendidikan Bahasa Arab	Aktif	S1	B	8	195	1 : 24.38

⁹ *Ibid*

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Program Studi IAIN Metro*, (Jakarta: Kemdikbud, 2021), diakses pada 12 April 2021 dari https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/OkI0MDI4NTAtMjEzNS00REM4LTk2O0Q0tOUNCOjY5OjU0QTNE,

12	86232	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Aktif	S1	B	13	458	1 : 35.23
13	61206	Perbankan Syariah	Aktif	S1	B	5	788	1 : 157.60
14	88203	Tadris Bahasa Inggris	Aktif	S1	B	17	658	1 : 38.71
15	86233	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Aktif	S1	C	15	174	1 : 11.60
16	74134	Ekonomi Syariah	Aktif	S2	Baik	4	37	1 : 9.25
17	86902	Pendidikan Profesi Guru Keagamaan	Aktif	Profesi	-	0	0	-
18	62201	Akuntansi Syariah	Aktif	S1	Baik	7	184	1 : 26.29
19	70232	Bimbingan Penyuluhan Islam	Aktif	S1	Baik	8	101	1 : 12.63
20	74235	Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)	Aktif	S1	Baik	6	96	1 : 16.00
21	76201	Manajemen Haji dan Umroh	Aktif	S1	Baik	11	91	1 : 8.27
22	84025	Tadris Biologi	Aktif	S1	Baik	8	169	1 : 21.13
23	84207	Tadris IPS	Aktif	S1	Baik	7	151	1 : 21.57
24	84202	Tadris Matematika	Aktif	S1	Baik	9	176	1 : 19.56

Tabel 1.3 di atas menjelaskan tentang program studi yang ada di IAIN Metro. Program studi di IAIN Metro berdasarkan tabel tersebut adalah 24 program studi. Program studi pendidikan agama Islam berdasarkan data di atas adalah program studi yang paling banyak jumlah mahasiswanya dibanding dengan program studi yang lainnya.

Tabel 1.4
Data Program Studi IAI Ma'arif NU Metro¹¹

No.	Kode	Nama Program Studi	Status	Jenjang	Akreditasi	Jml Dosen Tetap	Jml Mhs	Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa
1	70232	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	Aktif	S1	B	5	73	1 : 14.60
2	74234	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	Aktif	S1	B	6	84	1 : 14.00
3	74230	Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhshiyah)	Aktif	S1	B	6	106	1 : 17.67
4	76231	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Aktif	S1	B	5	90	1 : 18.00
5	86208	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S1	B	16	499	1 : 31.19
6	88204	Pendidikan Bahasa Arab	Aktif	S1	B	5	50	1 : 10.00
7	86232	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Aktif	S1	B	5	144	1 : 28.80
8	86207	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Aktif	S1	B	7	114	1 : 16.29
9	84202	Pendidikan Matematika	Aktif	S1	B	5	131	1 : 26.20
10	61206	Perbankan Syariah	Aktif	S1	B	8	229	1 : 28.63
11	88203	Tadris Bahasa Inggris	Aktif	S1	B	5	68	1 : 13.60
12	61406	Perbankan Syariah	Aktif	D3	C	0	22	-
13	86108	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S2	Baik	5	95	1 : 19.00

¹¹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Program Studi IAI Ma'arif NU Metro*, (Jakarta: Kemdikbud, 2021), diakses pada 12 April 2021 dari https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/MENGMzCWOTUtnUEwNi00NzY5LUJEMzgtNjE3MEYzOTgyM0NG

Tabel 1.4 di atas menjelaskan tentang program studi yang ada di IAI Ma'arif NU Metro. Program studi di IAI Ma'arif NU Metro berdasarkan tabel tersebut adalah 13 program studi. Program studi pendidikan agama Islam berdasarkan data di atas adalah program studi yang paling banyak jumlah mahasiswanya dibanding dengan program studi yang lainnya.

Tabel 1.5
Data Program Studi IAI Agus Salim Metro¹²

No.	Kode	Nama Program Studi	Status	Jenjang	Akreditasi	Data Pelaporan Tahun Genap 2019		
						Jml Dosen Tetap	Jml Mhs	Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa
1	86231	Manajemen Pendidikan Islam	Aktif	S1	B	10	84	1:8,40
2	86208	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S1	B	11	303	1:27,55
3	86232	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Aktif	S1	B	9	103	1:11,44
4	60202	Ekonomi Syariah	Aktif	S1	C	9	174	1:19,33
5	74230	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)	Aktif	S1	C	8	161	1:20,13
6	70233	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Aktif	S1	-	7	39	1:5,57

Tabel 1.5 di atas menjelaskan tentang program studi yang ada di IAI Agus Salim Metro. Program studi di IAI Agus Salim Metro berdasarkan tabel tersebut adalah 6 program studi. Program studi pendidikan agama Islam berdasarkan data di atas adalah program studi yang paling banyak jumlah mahasiswanya dibanding dengan program studi yang lainnya.

¹²Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Program Studi IAI Agus Salim Metro*, (Jakarta: Kemdikbud, 2021), diakses pada 12 April 2021 dari https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/RDcxOEEExNzEtRDJENi00OTUyLUEyNEEtNkU2MTY2NENFNjA1

Tabel 1.6
Data Program Studi Fakultas Agama Islam UM Metro¹³

No.	Kode	Nama Program Studi	Status	Jenjang	Akreditasi	Data Pelaporan Tahun Genap 2019		
						Jml Dosen Tetap	Jml Mhs	Rasio Dosen Tetap/Jumlah Mahasiswa
9	70233	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Aktif	S1	B	6	135	1:22,50
11	86208	Pendidikan Agama Islam	Aktif	S1	B	5	290	1:58,00
15	86207	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Aktif	S1	B	7	64	1:9,14

Tabel 1.6 di atas menjelaskan tentang program studi yang ada di Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Metro. Program studi di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro berdasarkan tabel tersebut ada 3 program studi. Program studi pendidikan agama Islam berdasarkan data tersebut adalah program studi yang paling banyak jumlah mahasiswanya dibanding dengan program studi yang lainnya.

Data dari tabel 1.3 sampai 1.6 di atas menunjukkan bahwa program studi pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi keagamaan Islam di kota Metro merupakan program studi yang paling banyak peminat atau jumlah mahasiswanya. Program studi pendidikan agama Islam merupakan program studi yang bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang pendidikan dan dan pengajaran agama Islam, serta menguasai materi dan metodologinya. Program studi pendidikan agama Islam bertujuan menyiapkan calon-calon guru yang akan mengajar pendidikan agama Islam di Madrasah/Sekolah.

¹³Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Data Program Studi Fakultas Agama Islam UM Metro*, (Jakarta: Kemdikbud, 2021), diakses pada 12 April 2021 dari https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt/QzRDRjgyQjQtODk0MS00MDRDLUFERDgtMDdEODZDMTIxMkJF

Pendidikan agama Islam berfungsi untuk membentuk perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang (guru/dosen) melalui bimbingan, arahan, latihan dengan materi yang disusun secara sistematis agar peserta didik dapat mengikuti petunjuk yang telah digariskan agama Islam hingga meraih derajat takwa disisi Allah. Disamping itu program studi pendidikan agama Islam juga akan melahirkan para cendekiawan pendidikan agama Islam yang dapat memberikan kontribusi pemikiran produktif dan kompetitif bagi pengembangan pendidikan agama Islam.

Program studi pendidikan agama Islam di kota Metro merupakan salah satu program studi yang dapat mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju dan unggul dalam bidang pendidikan dengan konsep pendidikan Islam tersebut. Untuk mencapai itu maka program studi pendidikan agama Islam harus mampu menghasilkan lulusan yang bermutu. Salah satu indikator untuk mencapai lulusan yang bermutu dengan tersedianya kurikulum yang memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Pembahasan tentang kurikulum hampir selalu ada dalam setiap pengkajian masalah-masalah pendidikan di mana pun. Hal tersebut tidaklah terlalu mengherankan, karena disadari benar bahwa kurikulum merupakan salah satu alat yang sangat strategis dan menentukan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan, bahkan kurikulum tersebut merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan,

sehingga sangatlah sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan atau pengajaran di suatu lembaga pendidikan yang tidak memiliki kurikulum.

Kurikulum sebagai salah satu perangkat pendidikan diperguruan tinggi yang mampu merubah dan membentuk perilaku mahasiswa setelah mereka menempuh proses pembelajaran. Dengan kata lain, pembentukan talenta dan karakter mahasiswa tersebut tertuang di dalam kurikulum. Kurikulum juga dapat menentukan maju atau mundurnya suatu perguruan tinggi bahkan negara. Kurikulum menggambarkan harapan, cita-cita, dan tujuan hidup yang harus dicapai, serta berbagai kompetensi profesionalisme yang harus dimiliki oleh segenap mahasiswa sebagai bekal kehidupan mereka. Kesalahan para perencana kurikulum misalnya guru, dosen, dan tenaga kependidikan lainnya merumuskan dan menentukan kurikulum apa yang akan diajarkan kepada mahasiswa bisa merusak masa depan mereka¹⁴

Pakar kurikulum Hamalik menegaskan “suatu kurikulum yang salah dapat merusak suatu generasi”. Kekhawatiran Hamalik ini beralasan, karena kurikulum merupakan suatu instrumen terpenting dalam suatu sistem pendidikan pada setiap jenjang, satuan dan skala lingkup berlakunya (nasional, regional, daerah). Sepadan dengan ungkapan di atas Hasan menyatakan bahwa: kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, kurikulum sebagai *the*

¹⁴ Anda Juanda, “Integrasi Ilmu Alam (Sains) dan Agama Berbasis Kurikulum Grass Roots di Perguruan Tinggi Islam”, *Scientiae Educatia*, Vol. 3 No. 1 (2014), h. 82.

heart of education, (jantung pendidikan). *The heart of education* ini harus dapat ditempatkan pada posisi sesungguhnya.¹⁵ Tugas utama bagi pengembang kurikulum adalah mengkaji tantangan yang diberikan masyarakat, mengkaji tantangan tersebut untuk menentukan kualitas yang perlu atau bahkan harus dimiliki manusia Indonesia 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun mendatang.

Pada saat ini perguruan tinggi di Indonesia menerapkan kurikulum dengan nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang mengacu atau berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kemunculan kurikulum yang mengacu atau berbasis KKNI ini didasari dari banyaknya terjadi berbagai permasalahan di perguruan tinggi. Permasalahan tersebut dapat kita lihat dari adanya berbagai *missing link* antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja.¹⁶ Permasalahan pengangguran tidak hanya disebabkan oleh sempitnya ketersediaan lapangan pekerjaan, akan tetapi juga disebabkan oleh ketidaksesuaian antara jenis pekerjaan dengan lulusan yang dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan atau pendidikan tertentu. Artinya, ada sejumlah pekerjaan yang tidak bisa diisi oleh lulusan perguruan tinggi.¹⁷ Pekerjaan dimasa sekarang tidak hanya mengandalkan kualifikasi belaka tapi juga membutuhkan keterampilan (*skill*) dan kemampuan (*ability*) tambahan yang dapat menunjang dari ketercapaian pekerjaan tersebut dengan efektif dan efisien. Kondisi tersebut menjadi faktor

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h.85

¹⁷ Adlan Fauzi Lubis, "Manajemen Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi Islam", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4 No. 2 (2020), <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1248>. h. 147

penghambat bagi sejumlah lulusan perguruan tinggi dalam bekerja. Begitu juga halnya dengan alumni program studi pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi keagamaan Islam di kota Metro.

Kurikulum perguruan tinggi mengacu atau berbasis dengan KKNI digulirkan oleh pemerintah melalui peraturan presiden republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. KKNI ini merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.¹⁸ Pengguliran kurikulum berbasis KKNI ini menjadi problematika baru bagi perguruan tinggi Islam yang menyebabkan munculnya permasalahan yang perlu dicarikan solusinya, antara lain mengenai adanya indikasi ketidaksesuaian kualifikasi dalam standar kompetensi lulusan dengan fakta dan realita yang terjadi di lapangan. Disamping itu juga terjadi permasalahan pada perguruan tinggi Islam yang tidak mampu menerapkan kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan baik. Adapun kendalanya adalah faktor ketidaksiapan SDM maupun sistem yang belum memadai. KKNI menurut peraturan presiden nomor 8 tahun 2012 merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang

¹⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, (Jakarta:2012)., h. 2.

dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). KKNI membutuhkan waktu yang tidak instan dalam mempersiapkannya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai evaluasi penerapannya. Perencanaan kurikulum berbasis KKNI mengacu pada tuntutan dan kebutuhan *stakeholder*, sehingga diperlukan evaluasi dan peninjauan kembali secara berkala.¹⁹

Problematika di atas menjadi keharusan bersama untuk diselesaikan oleh perguruan tinggi Islam agar tidak menjadi problem atau permasalahan yang berkepanjangan. Maka dari itu, sudah saatnya perguruan tinggi Islam memiliki peran sebagai *agent of change* dalam menghadapi tantangan pendidikan dan selalu berhasil mengubahnya menjadi peluang.²⁰ Hal ini disebabkan karena perguruan tinggi Islam sebagai wadah dalam merencanakan lulusan sebagai manusia *insan kamil* yang memiliki sifat *uswatun hasanah* yang dapat menjadi tauladan bagi masyarakat.²¹

Salah satu upaya perguruan tinggi Islam dalam menyelesaikan problematika di atas adalah dengan mengembangkan manajemen kurikulum berbasis KKNI.²² Manajemen kurikulum berbasis KKNI adalah sebuah proses yang dilakukan perguruan tinggi Islam dalam memberikan penyelenggaraan

¹⁹ Casmini Casmini, "Evaluasi Dan Peninjauan Kurikulum BKI Berbasis KKNI", *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Vol. 11 No. 1 (2014), <https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-07.>, h. 127

²⁰ Anwar Sewang, "Model Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Masalah: Studi Kasus pada Jurusan Tarbiyah dan Adab IAIN Parepare", *JPPi (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*, Vol. 3 No. 1 (2019), h. 5.

²¹ Akhmad Saufi Hambali, "Menggagas Perencanaan Kurikulum Menuju Sekolah Unggul", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 1 (2019), <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v1i1.161.>, h. 31

²² Ali Akbar Jono, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu", *Manhaj*, Vol. 4 No. 1 (2016)., h. 57.

pendidikan sebagai solusi dalam meningkatkan mutu lulusan agar memiliki kompetensi yang dapat diakui serta memberikan layanan kepuasan bagi penggunanya.²³

Pentingnya manajemen kurikulum berbasis KKNI pada perguruan tinggi Islam sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.²⁴ Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi Islam agar dapat bersaing dengan negara-negara maju. Manajemen kurikulum berbasis KKNI menjadi prioritas yang dapat dilakukan dengan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum dalam rangka kesetaraan capaian pembelajaran serta kualifikasi tenaga kerja, baik yang akan belajar atau bekerja maupun sebaliknya jika akan menerima pelajar atau tenaga kerja dari luar Indonesia.²⁵

Manajemen pengembangan kurikulum berbasis KKNI pada perguruan tinggi juga dipengaruhi oleh faktor ketersediaan dokumen kurikulum dan pendidik dalam hal ini disebut dosen serta tata kelola atau kemampuan manajerial pengelola program studi. Ketersediaan dokumen kurikulum ini diantaranya adanya silabus yang merupakan pengembangan dan penjabaran

²³ Brenda Kalimantan, "Manajemen Quality Assurance Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sekolah", *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, Vol. 1 No. 1 (2016), <https://doi.org/10.17977/um025v1i12016p052>., h. 53

²⁴ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)., h. 4

²⁵ Dedi Lazwardi, "Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan", *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 7 No. 1 (2017)., h. 101.

dari kurikulum, yang berisikan sinopsis mata kuliah dan kerangka materi/bahan kajian (topik inti/pokok bahasan) yang harus diajarkan dan dikuasai oleh mahasiswa.²⁶ Silabus juga memiliki *scope end sequence* kurikulum. *Scope* adalah ruang lingkup, cakupan, keluasan dan kedalaman bahan/materi perkuliahan. Sedangkan *sequence* adalah urutan bahan/materi perkuliahan yang akan diajarkan. Selain dari itu, silabus biasanya dilengkapi dengan referensi atau buku-buku sumber, baik yang wajib maupun anjuran. Ketersediaan dokumen ini sangat penting dalam manajemen pengembangan kurikulum.

Dosen selaku pelaksana dari silabus dalam proses pendidikan harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang merupakan proyeksi kegiatan (aktivitas) yang akan dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran/perkuliahan di kelas. Oleh karenanya, rencana pembelajaran semester merupakan bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dari pembelajaran/perkuliahan. Ini berarti, bahwa setiap dosen yang akan melaksanakan pembelajaran (perkuliahan) terlebih dahulu harus membuat RPS.²⁷ Pembelajaran (perkuliahan) merupakan interaksi edukatif yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa dan dosen-mahasiswa dengan sumber belajar lainnya di dalam suatu situasi/suasana pendidikan tertentu. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf B peraturan menteri riset

²⁶ Syafruddin Nurdin, "Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi", *al-Fikrah*, Vol. V No. 1 (2017), <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305.>, h. 26

²⁷ *Ibid.*, h. 27

teknologi dan pendidikan tinggi RI nomor 44 tahun 2015, disusun dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran (RPS) atau istilah lain yang digunakan oleh perguruan tinggi selama ini. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

Uraian di atas dapat kita ketahui bahwa dosen memiliki hak untuk mengembangkan RPS agar tercapai pembelajaran yang diharapkan atau bahkan melampaui kurikulum yang ada. Sebagai dosen yang mengacu kepada kurikulum berbasis KKNI maka dosen dituntut untuk mencapai hal tersebut. Faktor berikutnya yang akan mempengaruhi capaian kurikulum adalah tata kelola atau kemampuan manajerial penyelenggara program studi menyusun perencanaan, menganalisis dan menerapkan serta mengevaluasi kurikulum.

Keberhasilan perguruan tinggi Islam berdasarkan hal di atas membutuhkan sebuah manajemen pengelolaan kurikulum yang baik. Manajemen kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan satu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan tinggi, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang berkemajuan dan berkualitas.²⁸ Kurikulum di perguruan tinggi juga sebagai penjamin sistem penilaian dan

²⁸ Syamsu Misran S., "Manajemen Kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah", *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4 No. 2 (2019), h. 119.

sistem kendali mutu serta dapat berdampak pada sistem pengelolaan perguruan tinggi semakin baik.

Penelitian ini menemukan dan mendeskripsikan penerapan KKNi pada program studi pendidikan agama Islam yang terdapat pada empat perguruan tinggi di kota Metro, yaitu IAIN Metro yang merupakan kampus negeri di kota Metro, IAI Agus Salim merupakan salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di kota Metro, UM Metro yang merupakan perguruan tinggi dibawah naungan dan kendali perserikatan organisasi Muhammadiyah dan IAI Ma'arif NU Metro yang merupakan perguruan tinggi dalam naungan dan pemahaman organisasi Nahdlatul Ulama. Kondisi kampus dengan latar dan status yang berbeda beda tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam terhadap penerapan dan pengembangan KKNi pada program studi pendidikan agama Islam.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rubhan Masykur²⁹, Any Umy Maslahah³⁰, Eko Wahyu Nugrahadi³¹, Beslina Afriani Siagian³², Muafid

²⁹ Rubhan Masykur et al., "Implementasi Kurikulum KKNi Pada Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", *NUMERICAL: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 2 No. 1 (2018), hal. 15, <https://doi.org/10.25217/numerical.v2i1.205>.

³⁰ Any Umy Maslahah, "Penerapan Kurikulum Mengacu KKNi dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan di PTKIN", *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 13 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.5717>, h. 228.

³¹ Eko Wahyu Nugrahadi et al., "Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi di Fakultas Ekonomi Unimed", *Niagawan*, Vol. 7 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i1.9349>, h. 8

³² Beslina Afriani Siagian dan Golda Novatrasio Sauduran Siregar, "Analisis Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi di Universitas Negeri Medan", *PEDAGOGIA*, 2018, <https://doi.org/10.17509/pgia.v16i3.12378>, h. 327

Ardiansyah³³ dan Ali Akbar Jono³⁴ membahas terkait implementasi kurikulum KKNI diperguruan Tinggi tetapi tidak membahas tentang manajemen kurikulum dan program studi pendidikan agama Islam. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang manajemen kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro. Tema ini sangat menarik karena memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang belum membahas terkait manajemen kurikulum program studi pendidikan agama Islam.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu manajemen kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro, sedangkan yang menjadi sub fokusnya adalah:

1. Perencanaan kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.

³³ Muafid Ardiansyah, "Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi Pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)", 2017., h. 150

³⁴ Ali Akbar Jono, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu", *Manhaj*, Vol. 4 No. 1 (2016), hal. 57–68., h. 57

2. Pengorganisasian kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.
3. Pelaksanaan kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.
4. Evaluasi kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perencanaan kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro?
2. Bagaimanakah pengorganisasian kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro?
3. Bagaimanakah pelaksanaan kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro?
4. Bagaimanakah Evaluasi kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan mendeskripsikan perencanaan kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.
2. Untuk menemukan dan mendeskripsikan pengorganisasian kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.
3. Untuk menemukan dan mendeskripsikan pelaksanaan kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.
4. Untuk menemukan dan mendeskripsikan evaluasi kurikulum program studi pendidikan agama Islam berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi keagamaan Islam kota Metro.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa temuan yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti secara khusus dan masyarakat luas pada umumnya yang mengkaji tentang manajemen kurikulum pada perguruan tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Sehingga dapat berguna sebagai pengembangan teori-teori dalam manajemen kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di perguruan tinggi dan memiliki relevansi dengan manajemen kurikulum program studi pada

perguruan tinggi di kalangan akademisi sehingga ke depan diharapkan dapat memunculkan sebuah *Theoretical Framework* yang lebih *up to date*, relevan dan sesuai bagi pengembangan konsep pengelolaan manajemen pendidikan Islam di Indonesia kedepannya. Penelitian ini juga di harapkan dapat mengetahui kondisi dan situasi real yang ada di lokasi penelitian sehingga dapat menemukan serta mengungkapkan berbagai temuan secara objektif sesuai dengan fokus penelitian dan hasil penelitian ini dapat memberikan kejelasan teoritis dan pemahaman tentang manajemen kurikulum program studi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi, dan penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan yang terkait dengan manajemen pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah: Bagi penulis, dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman secara langsung serta menjadikan motivasi dalam menggali dan mengembangkan keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam khususnya dan bidang keilmuan lain pada umumnya. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pedoman bagi para peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam lagi tentang manajemen kurikulum pada perguruan tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Kurikulum

1. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Islam mengajarkannya pada umatnya agar segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Semua itu perlu pengelolaan atau manajemen yang sebaik-baiknya, karena dengan adanya manajemen yang baik, maka tujuan yang hendak dicapai bisa diraih secara efisien dan efektif. Manajemen berasal dari kata bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* (melakukan). Kata-kata itu digabung menjadi *managere* yang artinya menangani.¹ *Managere* diterjemahkan ke bahasa Inggris *to manage* (kata kerja), *management* (kata benda), dan *manager* untuk orang yang melakukannya. Manajemen berasal dari kata kerja bahasa Inggris *to manage* yang bersinonim dengan *to hand*, *to control*, dan *to guide* (mengurus, memeriksa dan memimpin).² Pandangan ini jika dilihat dari aspek leksikal memiliki kesamaan dengan *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Currenr English* yang mengilustrasikan bahwa kata *manajemen* secara etimologis juga berasal dari bahasa Inggris yakni berasal dari kata kerja (verb) “*to manage*” yang identik dengan

¹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (3 ed.) (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)., h. 3

² Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)., h. 16

kata “*to control*” dan “*to handle*”.³ “*To manage means to bring about, to accomplish, to have charge of or responsibility for, to conduct. Management is the process of deciding what to do and then getting it done through the effective use of resources*”.⁴ Dua kalimat dari Michael Armstrong ini memberikan pemahaman bahwa manajemen merupakan suatu proses memutuskan sesuatu untuk dilaksanakan dalam mencapai tujuan dengan sumberdaya yang ada secara efektif dan bertanggung jawab.⁵

Terry menyatakan “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources*” manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia/orang-orang dan sumber daya lainnya.⁶

Definisi manajemen yang digulirkan beberapa orang memberikan batasan, diantaranya *Pertama*, John A. Wagner III & John R. Hollenbeck yang memberikan batasan manajemen sebagai “*the*

³ AS. Hornby, *Oxford advanced Learner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1987), h. 517

⁴ Michael Armstrong, *Armstrong's Handbook of management and Leadership : A Guide to Managing for Result*, (London: Kogan Page Limited, 2009), h. 3

⁵ Sukarji dan Umiarso, *Manajemen dalam Pendidikan Islam*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 13

⁶ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 17

process of influencing behavior in organizations such that common purposes are identified, worked toward, and achieved".⁷ Definisi ini menekankan pada sisi aktivitas "mempengaruhi" untuk mencapai tujuan organisasi. Aktivitas ini hanya distimulir oleh sosok pemimpin organisasi yang bertugas untuk mendistribusikan kewenangan dalam mencapai tujuan organisasi. Lazimnya, pemimpin (*leader*) atau kepemimpinan (*leadership*) merupakan suatu bentuk kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.⁸

Kedua, Richard L. Darf yang pada kerangka ini memberikan batasan bahwa manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasi.⁹ Sebab "*managing is essential in all organized cooperation, as well as at all levels of organization in an enterprise*".¹⁰ Definisi ini mengandung dua kata kunci sebagai proses akhir dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu efektif dan efisien yang memiliki pengertian "mengerjakan sesuatu dengan benar" dan "mengerjakan sesuatu yang benar".¹¹

⁷ John A. Wagner III & John R. Hollenbeck, *Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage*, (New York: Routledge, 2010)., h. 13

⁸ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011)., h. 107

⁹ Richard L. Darf Peterj. : Emil Salim, Dkk, *Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2002)., h. 8

¹⁰ Harold koontz, Dkk., *Management*, (New York: McGraw-Hill Book Company, 1980)., h.7

¹¹ Peter F. Drucker, *Innovation and Entrepreneurship*, (New York: Herper & Collins, 1985)., h. 25

Ketiga, Nanang Fattah yang memberikan batasan manajemen sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.¹² Sedangkan James AF. Stoner, dkk., mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.¹³

Keempat, Malayu S.P Hasibuan memberikan definisi bahwa manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁴ Alur substansi definisi tersebut selaras dengan batasan yang dikemukakan oleh Wibowo bahwa manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya organisasi dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.¹⁵

Kelima, Oemar Hamalik memberikan batasan manajemen sebagai proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta sumber-sumber lainnya,

¹² Nanang Fatah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.1

¹³ James AF. Stoner dkk, Peterj. : Alexander Sindoro, *Manajemen*, (Jakarta: Prenhallindo, 1996), h. 7

¹⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 1-2

¹⁵ Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 10

menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.¹⁶

Management diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan). Menurut Hasibuan mengemukakan "bahwa manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.¹⁷ Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu". Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam term bahasa Arab, Istilah manajemen dipadankan dengan kata *al-idarah*. Dr. Abdul Wahhab sebagaimana dikutip oleh Ahmad ibnu Daud al-Muzjaji al-Asy'ari dalam bukunya yang berjudul *Muqaddimah al-Idarah al-Islamiyah* mendefinisikan manajemen sebagai :

"Manajemen adalah aktivitas kelompok yang berkesinambungan dengan menggunakan sumberdaya, berupa tindakan perencanaan, pengorganisasian (pengaturan), memimpin dan mengawasi, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".¹⁸

DR. Al-Hawari menyatakan definisi manajemen sebagaimana yang dikutip Ahmad ibnu Daud al Muzjaji al-Asy'ari bahwa :

"Manajemen adalah pelaksanaan kegiatan melalui orang lain melalui proses perencanaan, pengorganisasian (pengaturan),

¹⁶ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)., h. 16

¹⁷ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masa*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019)., h. 1

¹⁸ Ahmad ibnu Daud Al-Muzjaji, *مقدمة الإدارة الإسلامية*, Cet. 1 (Jeddah: SaudibArabia, 2000)., h. 37

pengarahan dan pengawasan (kontrol) terhadap pelaksanaannya”.¹⁹

Manajemen di dalam Al-qur`an memiliki kata yang sepadan dengan *al-tadbir* (kata ini memiliki arti memikirkan, mengatur, mengerahkan, melaksanakan, mengelola, rekayasa, mengurus, membuat rencana, berusaha mengawasi) yang merupakan derivasi dari kata *dabbara* (mengatur) untuk mencapai tujuan organisasi.²⁰ Kata *al-tadbir* yang terdapat di dalam ayat ayat Al-Qur`an terletak dalam beberapa ayat, antara lain :

يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥٠﴾

Terjemahannya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya seribu tahun menurut perhitunganmu”. (Q.S. Al-Sajdah: 5)²¹

Pada ayat lain juga terekspisit kata tersebut :

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٦١﴾

Terjemahannya: “Katakanlah, Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan ? Maka mereka akan menjawab,

¹⁹ *Ibid.*, h. 38

²⁰ Sukarji dan Umiarso, *Op.Cit.*, h. 79

²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h.415

“Allah.’Maka katakanlah‘ Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?’” (Q.S. Yunus: 31).²²

Kata *yudabbiru al-amra* dalam dua ayat tersebut yang berarti mengatur urusan; mengatur dalam artian dengan tepat dan profesional, bukan seperti pada waktu sejarah awal manajemen 7000 tahun yang lalu yang menyebutkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses berdasarkan *trial and error*, hanya sedikit atau bahkan tanpa teori, dan hampir tidak terdapat penyebaran ide dan praktik. Tatalaksana pengaturan dan menjalankan urusan yang diajarkan Allah SWT terhadap manusia tersebut sangat berbeda. Ia penuh dengan keteraturan, keserasian dan kerapian mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga yang kompleks.

b. Ruang Lingkup Manajemen

Bidang-bidang garapan manajemen, terkhusus manajemen pendidikan ada delapan, yaitu: 1) Manajemen kurikulum; 2) Manajemen personalia (kepegawaian); 3) Manajemen peserta didik; 4) Manajemen tatalaksana (ketatausahaan); 5) Manajemen sarana pendidikan; 6) Manajemen keuangan; 7) Hubungan dengan masyarakat (humas); 8) Manajemen layanan khusus. Kedelapan hal tersebut boleh dikatakan sebagai 8 komponen manajemen pendidikan di lembaga

²² *Ibid.*, h.212

pendidikan atau 8 bidang garapan manajemen pendidikan di lembaga pendidikan.²³ Adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut:

1) Manajemen kurikulum

Kegiatan manajemen kurikulum dititikberatkan pada usaha-usaha kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar di tempat pendidikan agar selalu terjamin kelancarannya. Kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting di sini dapat disebutkan dua hal yaitu; a) kegiatan yang amat erat kaitannya dengan tugas pendidik; b) kegiatan yang erat kaitannya dengan proses belajar-mengajar.

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh kementerian pendidikan nasional pada tingkat pusat. Karena itu level lembaga pendidikan paling penting adalah bagaimana merealisasikan dan menyesuaikan kurikulum tersebut dengan kegiatan pembelajaran. Di samping itu, lembaga pendidikan juga bertugas dan berwenang untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan setempat.²⁴

h.30 ²³ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),

²⁴ E. Mulyasa, *Op.Cit.*, h. 40

Lembaga pendidikan merupakan ujung tombak pelaksanaan kurikulum, baik kurikulum nasional maupun muatan lokal, yang diwujudkan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler dan instruksional. Agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan kegiatan manajemen program pengajaran. Manajemen atau administrasi pengajaran adalah keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan di bidang pengajaran yang bertujuan agar seluruh kegiatan pengajaran terlaksana secara efektif dan efisien.

Manajer lembaga pendidikan diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program lembaga pendidikan, manajer hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit; ia harus menghubungkan program-program lembaga pendidikan dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan.

Pimpinan lembaga pendidikan harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di lembaga pendidikan. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat empat langkah yang

harus dilakukan, yaitu menilai kesesuaian program yang ada dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan peserta didik, meningkatkan perencanaan program, memilih dan melaksanakan program, serta menilai perubahan program.

Untuk menjamin efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran pimpinan lembaga pendidikan sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan pendidik harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional ke dalam program tahunan, catur wulan dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan pendidik sebelum melakukan kegiatan belajar-mengajar. Berikut diperinci beberapa prinsip yang harus diperhatikan:

- a) Tujuan yang dikehendaki harus jelas, makin operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang dikembangkan untuk mencapai tujuan.
- b) Program itu harus sederhana dan fleksibel
- c) Program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- d) Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya
- e) Harus ada koordinasi antar komponen pelaksana program di lembaga pendidikan.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut agar terlaksana maka perlu dilakukan pembagian tugas pendidik, penyusunan kalender pendidikan dan jadwal pelajaran, pembagian waktu yang digunakan, penetapan pelaksanaan evaluasi belajar, penetapan penilaian, penetapan norma kelulusan mata kuliah, pencatatan kemajuan belajar peserta didik, serta peningkatan perbaikan pengajaran serta pengisian waktu jam kosong.

2) Manajemen personalia (kepegawaian)

Personalialia ialah semua anggota organisasi yang berkerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personalialia organisasi pendidikan mencakup para pendidik, para pegawai, dan para wakil siswa/mahasiswa. Termasuk juga para manejer pendidikan yang mungkin dipegang oleh beberapa pendidik.²⁵

Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pada BAB I pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.²⁶ Tenaga kependidikan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh

²⁵ Made Pidarta, *Op.Cit.*, h. 108

²⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, 2003), h. 3

pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku.

Maka disini yang dimaksud dengan manajemen personalia (kepegawaian) merupakan sebuah proses penataan, perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan demi tercapainya pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan sehingga proses pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien.

3) Manajemen peserta didik

Manajemen peserta didik atau kesiswaan atau manajemen kemuridan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik bukan hanya berbentuk pencatatan peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan.

Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang peserta didik agar kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut bidang manajemen peserta didik sedikitnya memiliki tiga tugas utama yang harus

diperhatikan, yaitu penerimaan peserta didik baru, kegiatan kemajuan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Berdasarkan tiga tugas utama tersebut pimpinan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengelola bidang peserta didik berkaitan dengan hal-hal berikut:

- a) Kehadiran peserta didik di lembaga pendidikan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu;
- b) Penerimaan, orientasi, klasifikasi, dan penunjukkan peserta didik ke kelas dan program studi;
- c) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar;
- d) Program supervisi bagi peserta didik yang mempunyai kelainan, seperti pengajaran, perbaikan, dan pengajaran luar biasa;
- e) Pengendalian disiplin peserta didik;
- f) Program bimbingan dan penyuluhan;
- g) Program kesehatan dan keamanan;
- h) Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional.

Penerimaan peserta didik baru perlu dikelola sedemikian rupa mulai dari perencanaan penentuan daya tampung peserta didik baru yang akan diterima, yaitu dengan mengurangi daya tampung dengan jumlah anak yang tinggal kelas atau mengulang. Kegiatan penerimaan peserta didik baru biasanya dikelola oleh panitia penerimaan siswa baru (PSB) atau panitia penerimaan murid baru (PMB) atau Panitia penerimaan Mahasiswa baru bagi perguruan

tinggi. Dalam kegiatan ini pimpinan lembaga pendidikan membentuk panitia atau menunjuk beberapa orang pendidik untuk bertanggung jawab dalam tugas tersebut. Setelah para peserta didik diterima lalu dilakukan pengelompokan dan orientasi sehingga secara fisik, mental dan emosional siap untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan.

Keberhasilan, kemajuan dan prestasi belajar peserta didik memerlukan data yang otentik, dapat dipercaya, dan memiliki keabsahan. Data ini diperlukan untuk mengetahui dan mengontrol keberhasilan atau prestasi pimpinan sebagai manajer pendidikan di lembaga. Kemajuan belajar peserta didik ini secara periodik harus dilaporkan kepada orang tua, sebagai masukan untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan dan membimbing anaknya belajar, baik di rumah maupun di lembaga pendidikan.

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, di samping keterampilan-keterampilan yang lain. lembaga pendidikan tidak hanya bertanggung jawab memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi memberi bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak yang bermasalah, baik dalam belajar, emosional, maupun sosial, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan data yang lengkap tentang

peserta didik. Untuk itu, di lembaga pendidikan perlu ada buku induk, buku klapper, buku laporan keadaan peserta didik, buku presensi peserta didik, buku rapor, daftar kenaikan kelas, buku mutasi dan sebagainya.²⁷

4) Manajemen tatalaksana (Ketatausahaan)

Pendapat William Leffingwell dan Edwim Robinson yang telah diterjemahkan oleh The Liang Gie, bahwa tata usaha ialah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja.²⁸

The Liang Gie menyatakan pekerjaan tata usaha meliputi beberapa rangkaian aktifitas yaitu:

- a) Menghimpun, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan dimana-mana sehingga siap dipergunakan bila diperlukan.
- b) Mencatat, yaitu meliputi kegiatan membubuhkan dengan berbagai alat tulis menulis mengenai keterangan-keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan-tulisan yang dapat dibaca, dikirim, atau disimpan.

²⁷ Hendyat Sutopo, *Manajemen dan Organisasi Sekolah*, (Malang: IKIP Malang, 1999), h. 115

²⁸ Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2013), h. 341

- c) Mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan mengerjakan keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai.
 - d) Menggandakan, yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan.
 - e) Mengirim, yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak yang lain.
 - f) Menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman.²⁹
- 5) Manajemen sarana pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman, jalan dan fasilitas yang dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman lembaga pendidikan untuk pengajaran, halaman sekaligus sebagai lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.

²⁹ *Ibid.*

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan penghapusan serta penataan.

Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan lembaga pendidikan yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi pendidik maupun peserta didik untuk berada di lembaga pendidikan. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh pendidik sebagai pengajar maupun peserta didik sebagai pelajar.³⁰

6) Manajemen keuangan

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasinya, yang menuntun kemampuan lembaga pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi

³⁰ E. Mulyasa, *Loc.Cit.*, h. 49-50

serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di lembaga pendidikan bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan lembaga pendidikan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka memberikan kewenangan kepada lembaga pendidikan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing lembaga pendidikan karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga pendidikan secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu a) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan

diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan; b) peran orang tua atau peserta didik; c) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua dan masyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pada BAB XIII pasal 46 ayat 1, bahwa karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua.³¹ Adapun dimensi pengeluaran meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan.

Biaya rutin adalah biaya yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (pendidik dan non pendidik), serta biaya operasional, biaya pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara biaya pembangunan misalnya, biaya pembelian atau pembangunan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya atau pengeluaran lain untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar

³¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional., h. 24

semua dana lembaga pendidikan benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, dan nepotisme.

Tugas manajemen keuangan dapat dibagi tiga fase, yaitu *financial planning; implementation; and evaluation*. Jones mengemukakan perencanaan finansial yang disebut *budgeting*, merupakan kegiatan mengkoordinasi semua sumber-sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa menyebabkan efek samping yang merugikan. *Implementation involves accounting* (pelaksanaan anggaran) ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian jika diperlukan. *Evaluation involves* merupakan proses evaluasi terhadap pencapaian sasaran.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, a) prosedur anggaran; b) prosedur akuntansi keuangan; c) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; d) prosedur investasi; dan e) prosedur pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan

berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Lembaga pendidikan sekolah ada kepala sekolah dan perguruan tinggi ada rektor sebagai manajer, berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi bendaharawan, juga dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.³²

7) Manajemen hubungan dengan masyarakat (humas).

Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan peserta didik di lembaga pendidikan. hal ini karena lembaga pendidikan sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Lembaga pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan atau pendidikan secara efektif dan efisien.

³² E. Mulyasa, *Loc.Cit.*, h. 47-49

Sebaliknya lembaga pendidikan juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya lembaga pendidikan juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan tuntutan masyarakat terutama terhadap lembaga pendidikan. Dengan perkataan lain, antara lembaga pendidikan dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis.

Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk: a) memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan anak; b) memperkuat tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat; c) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam menarik simpati masyarakat terhadap lembaga pendidikan dan menjalin hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hal tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program lembaga pendidikan, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat

gambaran yang jelas tentang lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Hubungan yang harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat ini semakin dirasakan pentingnya pada masyarakat yang telah menyadari dan memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Namun tidak berarti pada masyarakat yang masih kurang menyadari pentingnya pendidikan, hubungan kerja sama ini tidak perlu dibina. Pada masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan, lembaga pendidikan dituntut lebih aktif dan kreatif untuk menciptakan hubungan kerja sama yang lebih harmonis. Jika hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat berjalan dengan baik; rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan lembaga pendidikan juga akan baik dan tinggi. Agar tercipta hubungan dan kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat, masyarakat perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang lembaga pendidikan yang bersangkutan. Gambaran dan kondisi lembaga pendidikan ini dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui laporan kepada orang tua peserta didik, buletin bulanan, penerbitan surat kabar, pameran lembaga pendidikan, *open house*, kunjungan lembaga pendidikan, radio dan televisi, serta laporan tahunan. Pimpinan lembaga pendidikan yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa menciptakan hubungan yang baik antara lembaga pendidikan

dan masyarakat secara efektif karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di lembaga pendidikan dan apa yang dipikirkan orang tua tentang lembaga pendidikan. Pimpinan lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara lembaga pendidikan dan masyarakat guna mewujudkan lembaga pendidikan yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:

- a) Saling pengertian antara lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja;
- b) Saling membantu antara lembaga pendidikan dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing;
- c) Kerja sama yang erat antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di lembaga pendidikan.

Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai tujuan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di lembaga pendidikan secara produktif, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas. Lulusan yang berkualitas

ini tampak dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap, yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya atau hidup di masyarakat sesuai dengan asas pendidikan hidup.³³

8) Manajemen layanan khusus

Manajemen layannan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan dan keamanan lembaga pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berlangsung begitu pesat pada masa sekarang menyebabkan pendidik tidak bisa lagi melayani kebutuhan anak-anak akan informasi, dan peserta didik juga tidak bisa mengandalkan apa yang diperolehnya di bangku sekolah.

Perpustakaan yang lengkap dan dikelola dengan baik memungkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami pengetahuan yang diperolehnya di kelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu-waktu kosong di lembaga pendidikan maupun di rumah. Di samping itu, juga memungkinkan pendidik untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dengan metode bervariasi, misalnya belajar individual.

Manajemen layanan khusus lain adalah layanan kesehatan dan keamanan. lembaga pendidikan sebagai satuan pendidikan

³³ *Ibid.*, h. 50-52

yang bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu “...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Untuk kepentingan tersebut, di lembaga pendidikan dikembangkan program pendidikan jasmani dan kesehatan, menyediakan pelayanan kesehatan dan berusaha meningkatkan program pelayanan melalui kerja sama dengan unit-unit dinas kesehatan setempat. Di samping itu, lembaga pendidikan juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada peserta didik dan para pegawai yang ada di lembaga pendidikan agar mereka dapat belajar dan melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman.³⁴

³⁴ *Ibid.*, h. 52-53

2. Kurikulum

a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum secara etimologi memiliki asal kata dari *currenre* yang artinya jumlah yang ditempuh, dalam bahasa latin berarti *curriculum*, semula berarti *a running course, specially a chariot race course*, dan terdapat pula dalam bahasa Perancis “*courier*” artinya “*to run*” (berlari).³⁵ Para ahli mengemukakan pandangan yang beragam untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum. Pandangan klasik, lebih menekankan kurikulum sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah, itulah kurikulum. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan *manhaj* yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan.³⁶ kurikulum merupakan rencana atau program pengalaman belajar bagi sekelompok anak didik tertentu. rencana atau program pengalaman belajar tersebut harus disusun dengan memperhatikan *the situational in wich the plan is to be put into practice, as well as the wider social context in which the educational setting exists*, agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara “*intention*” dengan “*reality*”, maka suatu rencana atau program pengalaman belajar tersebut harus disusun sesuai dengan kebutuhan

³⁵ Dedi Lazwardi, "Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan", *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol. 7 No.1(2017)., h. 100.

³⁶ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali, 2012)., h. 1

dan latar sosial budaya kelompok peserta didik.³⁷ Dalam konteks pendidikan kurikulum berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik/guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai-nilai. Al-Khauily menjelaskan *al-Manhaj* sebagai perangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.³⁸ Menurut UU sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 19 dijelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³⁹ Kurikulum dapat diartikan sejumlah pengalaman siswa yang direncanakan, diarahkan, dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh lembaga pendidikan atau pendidik. Oleh karena itu seyogyanya yang merancang, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan kurikulum itu adalah lembaga pendidikan atau pendidik sebagai ujung tombak lapangan yang lebih mengetahui dan memahami kondisi peserta didik sesuai dengan latar belakangnya.⁴⁰ Pengertian kurikulum dalam arti luas adalah kegiatan belajar mengajar yang mencakup di dalam maupun di luar kelas.

³⁷ Agus Pahrudin, *Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam di Madrasah*, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017)., h. 13

³⁸ Muhaimin, *Loc.Cit.*

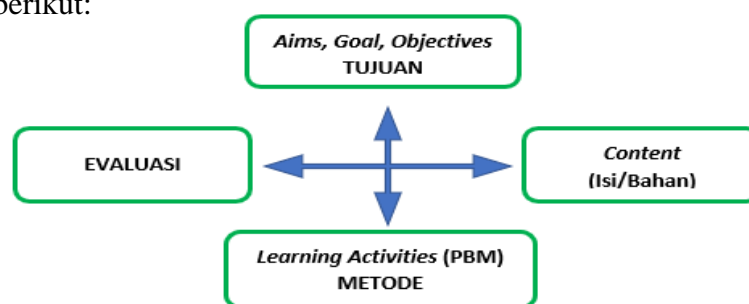
³⁹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁴⁰ R. Masykur, *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, Aura Publisher, 2019, tersedia pada www.aura-publishing.com (2019)., h.13

Kurikulum mempunyai makna yang cukup luas, mencakup semua pengalaman yang dilakukan peserta didik, yang dirancang, diarahkan, diberikan dan dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan. kurikulum mencakup kegiatan belajar di dalam kelas, di laboratorium, di perpustakaan, di lapangan olah raga, di rumah, di masjid, di kebun, di pasar dan lain-lain yang terkait dengan tugas dari satuan pendidikan. Selain itu kurikulum meliputi: kegiatan belajar dgn guru/dosen, tanpa guru/dosen, membaca buku, mengerjakan latihan-latihan, tugas, ulangan dan ujian, meliputi apa yg termasuk intra kurikuler, ko-kurikuler, ekstra kurikuler.⁴¹

b. Komponen Kurikulum

Kurikulum sebagai suatu sistem memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen-komponen kurikulum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Komponen kurikulum

Berdasarkan gambar 2.1 dapat kita pahami bahwa sistem kurikulum terbentuk dari empat komponen, yaitu: komponen tujuan, komponen isi kurikulum, metode atau strategi yang digunakan dalam

⁴¹ Agus Pahrudin, "Workshop Kurikulum Berbasis KKNi untuk Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro", (Lampung, 2020).

pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Setiap komponen itu harus saling berkaitan satu dengan yang lainnya karena ia merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini menandakan jika salah satu komponen itu terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum akan terganggu dan berjalan dengan tidak sempurna.

Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Tujuan kurikulum dalam skala makro sangat berkaitan dengan sistem nilai dan filsafat yang dianut masyarakat yaitu Pancasila. Tujuan kurikulum juga berhubungan dengan visi dan misi lembaga pendidikan dan tujuan dari setiap mata kuliah atau pelajaran serta tujuan dari proses pembelajaran. Tujuan pendidikan mempunyai klasifikasi mulai dari tujuan umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur yang kemudian dinamakan kompetensi. Klasifikasi tujuan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu: tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran.

Komponen isi kurikulum lebih menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dalam proses kegiatan belajar. Isi kurikulum harus berhubungan dan memuat aspek pengetahuan (kognitif), sikap atau perilaku (efektif) keterampilan atau *skill* (psikomotor). Aspek tersebut harus ada pada setiap mata pelajaran atau mata kuliah yang disajikan pada setiap proses belajar mengajar. Isi

kurikulum dan kegiatan pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek.

Komponen metode berkaitan erat dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan materi dan tujuan kurikulum yang hendak dicapai pada setiap pokok bahasan. Jadi dalam setiap pokok bahasan seorang pendidik harus dapat menggunakan berbagai jenis metode, hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan secara optimal dan tentunya pembelajaran akan menjadi menyenangkan bagi peserta didik.

Komponen evaluasi merupakan suatu proses yang tidak akan pernah berakhir dalam manajemen kurikulum. Proses tersebut meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi itu sendiri. Dalam konteks manajemen kurikulum evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manajemen kurikulum itu sendiri. Nilai dan arti kurikulum dapat diketahui dengan adanya evaluasi. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut masih layak dipertahankan atau tidak dan atau apakah ada bagian yang harus disempurnakan. Evaluasi ini berfungsi sebagai komponen untuk melihat efektifitas pencapaian tujuan yang telah direncanakan dan diimplementasikan. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dari

perbaikan strategi yang telah digunakan. Sehingga evaluasi dapat dikatakan memiliki fungsi sumatif dan formatif.⁴²

c. Model Kajian Kurikulum

1) Model konsep kurikulum

Model konsep kurikulum merupakan suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu faham filsafat, psikologi, sosiologi (termasuk di dalamnya sistem politik), serta ipteks tertentu.⁴³ Perbedaan pandangan atas hakikat kehidupan dan manusia yang baik serta bagaimana mewujudkannya akan melahirkan model pendidikan atau kurikulum yang berbeda pula. Model konsep kurikulum akan mewarnai pendekatan yang diambil dalam pengembangan kurikulum. Sebagai kajian teoritis, model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum. Atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Model konsep kurikulum sangat berkaitan dengan aliran pendidikan yang dianut. Aliran pendidikan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- a) Pendidikan klasik, yang menggunakan model konsep kurikulum subjek akademis (*Subject Academic Curriculum*),

⁴² Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, ke-6 (Bandung, 2013), h.194-196

⁴³ Deni Kurniawan, *Model dan Organisasi Kurikulum*, (Bandung: UPI Bandung, 2014), h. 2.

- b) Pendidikan pribadi, yang menggunakan model konsep kurikulum humanistic (*Humanistic Curriculum*),
- c) Teknologi pendidikan, yang menggunakan kurikulum teknologi (*Technological/Competences Based Curriculum*),
- d) Pendidikan interaksionis, yang menggunakan model konsep kurikulum rekonstruksi sosial (*Social Reconstruction Curriculum*).⁴⁴

Kurikulum subjek akademik adalah model kurikulum yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Oleh Karena itu materi pelajaran dalam kurikulum ini adalah apa-apa yang terdapat dalam buku-buku tua besar termasuk di dalamnya kitab-kitab suci. Peserta didik diharapkan dapat menguasai isi dari buku-buku atau kitab-kitab itu.

Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau yang disiapkan oleh guru. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan maka pendidikannya sangat bersifat intelektual, nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografi,

⁴⁴ *Ibid.*, h. 3

matematika, ilmu kealaman, sejarah dan lainnya. Sekurangnya ada tiga pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis yaitu:

- a) Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan.
- b) Studi yang bersifat integratif.
- c) Pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis.

Kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri-ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Metode yang banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan inquiry. Sedangkan pola organisasi isi (materi pelajaran) kurikulum subjek akademis antara lain:

- a) *Correlated curriculum*
- b) *Unified* atau *concentrated curriculum*
- c) *Integrated curriculum*
- d) *Problem solving curriculum*.

Kurikulum pribadi adalah model konsep kurikulum yang didesain dikembangkan untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara optimal. Materi ajar tidak terpaku pada suatu bidang studi tertentu, akan tetapi disesuaikan dengan minat dan bakat

peserta didik. Peserta didik diberi keleluasaan untuk mempelajari segala sesuatunya, sedang guru bertugas memberikan layanan yang baik atas kebutuhan peserta didik.

Kurikulum pribadi atau lebih dikenal dengan nama *humanistic* dikembangkan oleh para ahli pendidikan *humanistic*. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi (*personalized education*) yaitu John Dewey (*progressive education*) dan J.J Rousseau (*romantic education*). Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada peserta didik. Mereka bertolak dari asumsi bahwa peserta didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan.

Pendidikan *humanistic* menekankan peranan peserta didik. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, dan akrab. Oleh karena itu, peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a) Mendengar pandangan realitas peserta didik secara komprehensif.
- b) Menghormati individu peserta didik,
- c) Tampil alamiah, otentik, tidak dibuat-buat.

Kurikulum humanistik mempunyai beberapa karakteristik berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi dan evaluasi. Menurut para humanis kurikulum berfungsi menyediakan

pengalaman atau pengetahuan berharga untuk membantu memperlancar perkembangan pribadi murid. Bagi mereka tujuan pendidikan adalah proses perkembangan pribadi yang dinamis yang diarahkan pada pertumbuhan, integritas, dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain dan belajar. Kurikulum humanistic menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Dalam evaluasi kurikulum humanistic berbeda dengan yang biasa. Model lebih mengutamakan proses dari pada hasil.

Kurikulum rekonstruksi sosial adalah model kurikulum yang menekankan pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses dan upaya memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat dimana individu tersebut berada. Isi pendidikan diupayakan seoptimal mungkin dikaitkan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga peserta didik bisa mengenal keadaan masyarakat dan berkontribusi terhadap masyarakat. Untuk itu, para peserta didik mendapat penekanan pada upaya pemecahan masalah kehidupan masyarakat. Namun ini tidak berarti mengabaikan materi ajar yang ada dalam bidang studi (subjek akademik), hanya saja materi yang ada dalam bidang studi itu diberikan atau dipelajari peserta didik bukan untuk menguasai

konten dari lapangan studi tersebut semata-mata, akan tetapi digunakan untuk perbaikan atau pemecahan sosial yang ada.

Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara peserta didik dengan pendidik, tetapi juga antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan orang-orang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini peserta didik berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini antara lain melibatkan:

- a) Survei kritis terhadap suatu masyarakat
- b) Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional
- c) Studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal
- d) Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian
- e) Berbagai pertimbangan perubahan politik
- f) Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya

Selanjutnya model kurikulum teknologis. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pada kerangka berpikir teknologis

yang berbasis pada ilmu pengetahuan ilmiah. Kurikulum teknologis memiliki sifat hampir sama dengan kurikulum subjek akademik yaitu untuk mentransfer, akan tetapi dalam kurikulum teknologis yang ditransfer adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk melakukan suatu bidang kegiatan tertentu, bukannya nilai-nilai yang dianggap baik pada masa lampau. Meskipun mungkin ada nilai masa lampau yang dipelajari, akan tetapi dalam tujuan untuk memperkuat kemampuan yang ingin dihasilkan. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk membentuk kemampuan teknis atau kemampuan kerja (*vocational/* kompetensi) tertentu. Pembelajaran berorientasi tujuan dengan indikator- indikator ketercapaian yang dirumuskan dengan sangat jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran disampaikan secara tahap demi tahap dan sistematis. Hasil pendidikan dikontrol secara ketat melalui evaluasi hasil yang teramati (*observable*) dan terukur (*measurable*).

Persepektif teknologi sebagai kurikulum ditekankan pada efektifitas, program, metode dan material untuk mencapai suatu manfaat dan keberhasilan. Teknologi mempengaruhi kurikulum dalam dua cara yaitu aplikasi dan teori. Juga efisiensi dalam belajar, yaitu cara mengajar yang memberikan lebih banyak subjek kepada peserta didik. Efisiensi ini adalah tahapan belajar melalui terminal perilaku tertentu. Berdasarkan hal ini, teknologi

mengembangkan aturan-aturan untuk membangun kurikulum dalam bentuk latihan terprogram. Adapun ciri-ciri kurikulum teknologis

- a) Tujuan. Tujuan diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku.
- b) Metode. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan dan apabila terjadi respon yang diharapkan maka respon tersebut diperkuat.
- c) Organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi.
- d) Evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit ataupun semester.

Model konsep kurikulum tersebut dapat kita buatnya dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Model Konsep Kurikulum

Jenis Model konsep	Karakteristik
1. <i>Subject Academic Curriculum.</i>	1. Berfokus pada bahan ajar yg berasal dari disiplin ilmu, kedudukan guru/dosen sangat penting sebagai expert & model.
2. <i>Humanistic Curriculum</i>	2. Menekankan keutuhan pribadi. Kurikulum didasarkan atas minat-kebutuhan peserta didik, peserta didik aktif belajar.
3. <i>Technological/Competens Based Curriculum</i>	3. Menekankan penguasaan kompetensi, pembelajaran dibantu alat-alat teknologis
4. <i>Social Reconstruction Curriculum</i>	4. Berfokus pada masalah sosial, menekankan belajar kelompok.

2) Model desain kurikulum

Dari segi fokusnya model desain kurikulum terbagi menjadi

- a) *Subject Centered Curriculum*
- b) *Student Centered Curriculum*
- c) *Problem Centered Curriculum*

Dari segi organisasi isi model desain kurikulum terbagi menjadi

- a) *Separated Subject Curriculum*
- b) *Correlated Curriculum*

c) *Broadfield Curriculum*

d) *Fused Curriculum*

e) *Integrated Curriculum*

Model desain kurikulum tersebut dapat kita buatnya dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Model desain Kurikulum

Jenis Model	Karakteristik
a. Dari segi fokus kurikulum	
1. <i>Subject Centered Curriculum</i>	1. Desain menekankan bahan ajar yang tersusun dalam mata pelajaran.
2. <i>Student Centered Curriculum</i>	2. Desain menekankan minat dan kebutuhan peserta didik.
3. <i>Problem Centered Curriculum</i>	3. Desain menekankan masalah yang dihadapi peserta didik/masyarakat
b. Dari segi Organisasi Isi Kurikulum	
1. <i>Separated Subject Curriculum</i>	1. Isi kurikulum disusun dalam bentuk mata-mata pelajaran/kuliah yang terlepas.
2. <i>Correlated Curriculum</i>	2. Isi kurikulum disusun dengan menghubungkan mata-mata pelajaran/kuliah yang terkait.
3. <i>Broadfield Curriculum</i>	3. Isi kurikulum memadukan materi dari mata-mata pelajaran/kuliah yang serumpun.
4. <i>Fused Curriculum</i>	4. Isi kurikulum dengan melebur mata pelajaran/kuliah
5. <i>Integrated Curriculum</i>	5. Isi kurikulum betul-betul terpadu, tidak jelas lagi asal mata pelajarannya/kuliah.

3) Model pendekatan implementasi kurikulum

Jenis model pendekatan implementasi kurikulum terdiri dari jenis: pendekatan *fidelity*; pendekatan *mutual adaptive*; dan pendekatan *enactment*. Uraian terkait jenis model pendekatan implementasi kurikulum tersebut dapat kita lihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Model Pendekatan Kurikulum

Jenis model Implementasi	Karakteristik
1. Pendekatan <i>Fidelity</i>	1. Implementasi kurikulum sesuai dengan desain yang telah standar.
2. Pendekatan <i>Mutual Adaptive</i>	2. Pelaksanaan kurikulum mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi, kebutuhan, tuntutan setempat.
3. Pendekatan <i>Enactment</i>	3. Pelaksanaan melakukan berbagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan kurikulum

Dalam hal implementasi atau pelaksanaan kurikulum, guru/dosen dituntut untuk dapat memutuskan bagaimana mengorganisasi kurikulum tersebut secara operasional. Tanner & Tanner mengelompokkan peran guru/dosen sebagai pengembang kurikulum di kelas ke dalam tiga jenjang yakni (a) *imitative-maintenance*, (b) *mediative*, dan (c) *creative-generative*; sedangkan Marsh & Stafford mengelompokkan guru/dosen ke dalam (a) *teachers as receivers*, (b) *teachers as curriculum modifier*, an (c) *teachers as curriculum developer*.⁴⁵ Perbandingan kedua pendapat di atas digambarkan dalam tabel 2.4 berikut.

⁴⁵ Agus Pahrudin, *Op.Cit.*, h. 8.

Tabel 2.4
Peran Guru/Dosen Sebagai Pengembang Kurikulum

Kelompok	Pendapat Tanner & Tanner	Pendapat Marsh & Stafford
1	<p><i>Imitative-maintenance</i></p> <p>Guru/Dosen bekerja atas dasar buku teks, buku kerja, dan mengikuti aktivitas secara rutin, subjek demi subjek</p>	<p><i>Teachers as Receivers</i></p> <p>Guru/Dosen menggunakan kurikulum seperti apa yang tercantum dalam dokumen kurikulum</p>
2	<p><i>Mediative</i></p> <p>Meskipun sudah memiliki kesamaan persepsi tentang kurikulum, tetapi dalam hal implementasi guru/dosen tidak berani keluar dari hubungan antar subjek</p>	<p><i>Teachers as Curriculum Modifer</i></p> <p>Secara sederhana guru/dosen berupaya memodifikasi kurikulum dalam rangka menyelaraskan dengan kondisi kelasnya</p>
3	<p><i>Creative-generative</i></p> <p>Guru/dosen yang berpikir tentang apa yang akan mereka kerjakan dan mencoba untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam bekerja</p>	<p><i>Teachers as Curriculum Developer</i></p> <p>Guru/dosen mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, serta mencoba mengemukakan dalam bentuk rancangan yang terstruktur guna mengatasi masalah dan kebutuhan kelasnya</p>

Kelompok ketiga termasuk ke dalam kelompok guru/dosen yang profesional, sebab guru/dosen pada kelompok ini berpikir tentang apa yang akan mereka kerjakan dan mencoba untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam bekerja. Mereka mampu mendiagnosa masalah-masalah yang dihadapi dan memformulasikan hipotesa-hipotesa untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Mereka melakukan eksperimen dalam kelas dan mengkomunikasikan temuannya tersebut kepada guru-guru atau dosen-dosen yang lain.

d. Model Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum digunakan untuk mengetahui pencapaian kurikulum dalam rangka pengumpulan informasi untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek kurikulum yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan perbaikan mutu perkuliahan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa perguruan tinggi dalam mengelola perkuliahan wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan perkuliahan.⁴⁶ Pendapat Murray Print menguatkan pernyataan tersebut, bahwa *curriculum evaluation is the process of delineating, obtaining and providing information useful for making decision and judgments about curricula.*⁴⁷ Artinya bahwa evaluasi

⁴⁶ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Jakarta, 2015).

⁴⁷ Davis, E. Teachers as Curriculum Evaluators, (Sydney: George Allen & Unwin, 1980), h.49. dalam Syamsu Misran S., "Manajemen Kurikulum Pendidikan Al-Islam dan

kurikulum sangat penting dilaksanakan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan dan penilaian tentang kurikulum itu. Dengan demikian, dari proses evaluasi tersebut akan diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian kurikulum.

Setiap tahap perkuliahan dilakukan penilaian perkuliahan untuk menilai proses dan hasil perkuliahan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik penilaian, instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.⁴⁸ dari pandangan tersebut, dipahami bahwa evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara sistematis dan analisis sehingga dapat diperoleh data akurat dalam rangka pengambilan keputusan yang objektif.

Model evaluasi kurikulum secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif.

1) Model Evaluasi Kuantitatif

Model evaluasi kuantitatif ini terdiri dari beberapa model, sebagai berikut:

a) Model *Black Box* Tyler

Model evaluasi ini merupakan model evaluasi yang dikemukakan oleh Tyler dinamakan *Black Box*. Dalam model

Kemuhammadiyah”, *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, Vol. 4 No. 2 (2019), hal. 117–26., h. 120

⁴⁸ Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, *Loc. Cit.*

ini Tyler menyatakan bahwa evaluasi kurikulum yang sebenarnya hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Model ini dilandasi oleh dua hal mendasar, yaitu: evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku awal peserta didik dan evaluasi yang dilakukan pada tingkah akhir peserta didik, sebelum pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum. Tyler menghendaki evaluator dapat menentukan perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai hasil belajar yang diperoleh dari kurikulum.⁴⁹ Kenyataan ini dapat diketahui dan ditetapkan jika evaluator melihat tingkah laku peserta didik dari sebelum dan setelah evaluasi. Ketika menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi harus dipertimbangkan tingkah laku yang bagaimana yang dianggap merupakan pernyataan bahwa tujuan tersebut telah tercapai.

Evaluasi kurikulum yang menggunakan model Tyler mestinya memerlukan informasi perubahan tingkah laku pada dua titik waktu yaitu sebelum dan sesudah belajar dari suatu kurikulum. Dalam istilah yang banyak digunakan sekarang disebutkan dengan tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) sebagai penyimpul informasi evaluasi. Informasi yang diperoleh dari tes awal merupakan gambaran kemampuan awal peserta

⁴⁹ Ralph W. Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Instruction*, (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1975), h. 35

didik, sedangkan informasi yang diperoleh dari hasil tes akhir menggambarkan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan melalui kurikulum tersebut. Model Tyler tidak memberikan perhatian mengenai proses yang terjadi antara kedua tes tersebut. Menurut Tyler ada tiga prosedur utama yang harus dilakukan dalam model evaluasi *Black Box* ini, yaitu:

- (a) Menentukan tujuan kurikulum yang akan dievaluasi
 - (b) Menentukan situasi dimana peserta didik mendapatkan kesempatan untuk memperlihatkan tingkah laku yang berhubungan dengan tujuan
 - (c) Menentukan alat evaluasi yang akan digunakan untuk mengukur tingkah laku peserta didik.⁵⁰
- b) Model Ekonomi Mikro

Model ekonomi mikro mempunyai fokus utama pada hasil (hasil dari pekerjaan, hasil belajar, dan hasil yang diperkirakan). Pertanyaan utama dari ekonomi mikro adalah apakah hasil belajar yang diperoleh peserta didik sesuai dengan dana yang telah dikeluarkan. Model ini harus dapat membandingkan dua program atau lebih, baik dalam pengertian dana yang digunakan untuk masing-masing program maupun hasil yang diakibatkan

⁵⁰ Dinn Wahyudin, *Manajemen Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)., h. 154

oleh setiap program. Perbandingan hasil dari kedua program tadi akan memberikan masukan bagi para pembuat keputusan mengenai program mana yang lebih menguntungkan dilihat dari hubungan antara dana dan hasil.

2) Model Evaluasi Kualitatif

Model evaluasi kualitatif ini terdiri dari beberapa model, sebagai berikut:

a) Model Studi Kasus

Model evaluasi studi kasus ini memusatkan perhatian kepada kegiatan pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Unit tersebut bisa saja berupa satu sekolah, satu kelas bahkan hanya terhadap guru atau dosen. Instrumen yang digunakan evaluator dalam melakukan evaluasi adalah instrumen terbuka baik dalam isu atau masalah. Dengan demikian jawaban atas setiap pertanyaan akan memungkinkan jawaban yang terbuka.⁵¹ Dalam pengumpulan data model evaluasi ini menggunakan Teknik pengumpulan data observasi. Observasi ini akan membantu evaluator dalam menangkap suasana yang terjadi secara langsung ketika proses yang diobservasi sedang berlangsung. Kuesioner dapat juga digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Misalnya ingin mengetahui

⁵¹ *Ibid.*

persepsi dosen terhadap kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia yang berlaku, dapat mengumpulkan data tersebut dengan wawancara.

b) Model Iluminatif

Model evaluasi iluminatif mendasarkan pada paradigma antropologi sosial. Model iluminatif memberikan perhatian terhadap lingkungan luas bukan hanya kelas dimana suatu inovasi kurikulum dilaksanakan. Kekuatan model evaluasi iluminatif ini terletak pada perhatian terhadap lingkungan yang luas. Perhatian yang luas akan memberikan kemungkinan pemahaman terhadap kurikulum suatu satuan pendidikan lebih baik. Lingkungan yang luas ini bisa mencakup lingkungan sosial, budaya, ekonomi, agama, teknologi, dan lainnya. Model evaluasi ini dikembangkan atas dua dasar konsep utama, yaitu sistem instruksi dan lingkungan belajar. Sistem instruksional disini diartikan sebagai laporan-laporan kependidikan yang secara khusus berisi rencana dan pernyataan yang resmi berhubungan dengan pengaturan dan pengajaran. Pengembangan standar isi dan standar lulusan di suatu satuan pendidikan adalah suatu sistem instruksi., sedangkan lingkungan belajar adalah lingkungan sosial dan psikologis dan materi dimana guru dan peserta didik berinteraksi.

Implementasi pelaksanaannya model evaluasi iluminasif memiliki tiga kegiatan, yaitu: observasi, inkuiri lanjutan dan usaha penjelasan. Ketiga langkah tersebut merupakan suatu rangkaian yang mandiri tapi berhubungan dan tidak terpisahkan. Data observasi merupakan dasar utama bagi evaluator untuk bekerja. Dengan observasi evaluator akan menemukan isu pokok, kecenderungan yang sering muncul dan persoalan-persoalan penting yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum disuatu satuan pendidikan. Kemudian langkah inkuiri lanjutan evaluator memantapkan isu, kecenderungan, persoalan-persoalan yang ada sampai suatu titik evaluator menarik kesimpulan bahwa tidak ada lagi persoalan baru yang muncul. Selanjutnya evaluator melakukan langkah memberikan penjelasan, evaluator harus dapat menemukan pola hubungan sebab akibat untuk menjelaskan mengapa suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil dan mengapa kegiatan lainnya dikatakan gagal. Penjelasan merupakan suatu kegiatan penting dalam model iluminasif.⁵²

⁵² *Ibid.*, h. 156

3. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komperhensif, sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan dari kurikulum itu sendiri.⁵³ Menurut Mulyasa manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Pandangan Mulyasa hanya menekankan pada tiga aspek saja, sedangkan aspek pengorganisasian kurikulum secara eksplisit tidak dijelaskan dalam definisinya. Menurut Nasution organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid. Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar.⁵⁴ Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat kita ketahui bahwa manajemen kurikulum merupakan kegiatan untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan penilaian untuk meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Secara sederhana bisa dikatakan sebagai *Learning Experience* yang diberikan kepada peserta didik.

⁵³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Op.Cit.*, h. 191

⁵⁴ Dedi Lazwardi, *Op.Cit.*, h. 101

Proses pelaksanaan manajemen pendidikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Produktivitas, yakni hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan mengenai tentang bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum.
- b. Demokratisasi, pelaksanaan manajemen kurikulum yang dilakukan harus berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum.
- c. Kooperatif, yakni pentingnya sifat kerja sama yang positif dari setiap pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan manajemen kurikulum.
- d. Efektivitas dan Efisiensi, hal ini bertujuan supaya kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan guna agar biaya, tenaga dan waktu yang relatif singkat.
- e. Mengarahkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum, proses manajemen harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi dan tujuan kurikulum.⁵⁵

Dilaksanakannya manajemen kurikulum dalam proses pendidikan agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dapat berjalan dengan efektif, efisien dan optimal. Pelaksanaan tersebut dapat membantu terlaksananya fungsi manajemen kurikulum. Ada beberapa fungsi manajemen kurikulum, diantaranya:

- a. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.
- b. Meningkatkan keadilan (*equality*) dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal, kemampuan yang maksimal yang dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan instrakurikuler, tetapi juga perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum.
- c. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. kurikulum yang dikelola

⁵⁵ Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 4

- secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar.
- d. Meningkatkan efektifitas kinerja pendidik maupun aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, pengelolaan kurikulum yang professional, efektif, dan terpadu sehingga dapat memberikan motivasi pada kinerja pendidik maupun aktivitas peserta didik dalam belajar.
 - e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran.⁵⁶
 - f. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum, kurikulum yang dikelola secara professional akan melibatkan masyarakat khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan.⁵⁷

Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Pada lembaga pendidikan kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevensikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi lembaga yang bersangkutan, sehingga kurikulum yang dijalankan mampu menjadi kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan dimana lembaga tersebut berada. Kajian tentang ruang lingkup manajemen kurikulum disajikan sebagai berikut:

⁵⁶ Ahmad Fauzi dan Hade Afriansyah, "Manajemen Kurikulum", *Universitas Negeri Padang*, 2019, <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpvr7>, h. 3

⁵⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Op.Cit.*, h. 193

a. Perencanaan Kurikulum

1) Pengertian Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri peserta didik. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses sosial yang kompleks yang menuntut berbagai jenis dan tingkat pembuatan keputusan.⁵⁸ Sedangkan menurut Beane, *curriculum planning is a process in which participants at many levels make decisions about what the purposes of learning ought to be, how those purposes might be carried out through teaching-learning situation, and whether the purposes and means are both appropriate and effective.*⁵⁹ Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika berbagai komponen dalam berbagai level membuat keputusan tentang bagaimana seharusnya sebuah tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar-mengajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut.

Agar kurikulum memberikan hasil yang optimal, maka harus direncanakan mulai dari desainnya, implementasinya, sampai kepada evaluasinya. Dalam merencanakan desain, implementasi dan

⁵⁸ Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)., h. 159

⁵⁹ Jame A. Beane, *Curriculum Integration "Designing The Core of Democratic Education,"* (New York and London: Teachers College Press, Columbia University, 1996)., h.45

evaluasi kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu filosofis, psikologis, teknologi, sosial budaya, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta faktor politis. Jadi perencanaan kurikulum ini merupakan pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga dan sarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, peran unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan manajemen lembaga pendidikan.

2) Fungsi Perencanaan Kurikulum

Perencanaan kurikulum harus dilakukan dengan cara yang cermat, teliti, menyeluruh dan terinci, serta mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan penerapan rencana kurikulum tersebut. Perencanaan kurikulum memiliki fungsi:

- a) Pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol dan evaluasi, peran unsur-unsur ketenagaan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b) Pengerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Perencanaan kurikulum yang matang, besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dan oleh

karenanya perlu memuat informasi kebijakan yang relevan, disamping seni kepemimpinan dan pengetahuan yang dimilikinya;

- c) Motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.⁶⁰

3) Landasan Perencanaan Kurikulum

Landasan-landasan yang dijadikan acuan dalam perumusan perencanaan kurikulum, yaitu:

- a) Landasan filosofis, berkaitan dengan falsafah bangsa dan negara yang dianut. Landasan ini sebagai penentu tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Landasan filosofis dalam penyusunan kurikulum didasarkan pada kerangka berfikir dan hakikat pendidikan yang sesungguhnya. Dalam konteks ini landasan filosofis yang digunakan adalah: (1) Pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. (2) Kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi.⁶¹
- b) Landasan psikologis, dengan memperhitungkan faktor perkembangan peserta didik dan faktor kejiwaannya.

⁶⁰ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, cet. 4 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)., h. 152

⁶¹ Agus Pahrudin dan Dinda Dona Pratiwi, *Pendekatan Saintifik Dalam Implementasi Kurikulum 2013 & Dampaknya Terhadap Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran*, Cet. 1 (Lampung: Pustaka Ali Imron 2019)., h. 37

- c) Landasan sosiologis, dengan memperhatikan gejala sosial budaya yang ada di masyarakat, bangsa dan negara.
- d) Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dilakukan agar kurikulum yang direncanakan dapat mengakomodir, menyesuaikan, dan mengikuti perkembangan IPTEK.⁶²

4) Prinsip-Prinsip Perencanaan Kurikulum

Prinsip-prinsip perencanaan kurikulum yang perlu diperhatikan adalah:

- a) Perencanaan kurikulum berkenaan dan berkaitan erat dengan pengalaman-pengalaman para peserta didik;
- b) Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang isi dan proses, yang tidak terlepas dari isi, materi, pokok bahasan, bidang studi serta berkait erat dengan proses dan cara penyampaian atas isi tersebut;
- c) Perencanaan kurikulum mengandung keputusan-keputusan tentang isu dan topik;
- d) Perencanaan kurikulum melibatkan banyak pihak, antara lain kelompok pendidikan, ketua jurusan, pemerhati pendidikan, orangtua, stakeholder dan pihak-pihak lain yang terkait;
- e) Perencanaan kurikulum dilaksanakan diberbagai tingkat/jenjang;

⁶² Dinn Wahyudin, *Op.Cit.*, h. 83

f) Perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkesinambungan.⁶³

5) Karakteristik Perencanaan Kurikulum

Karakteristik perencanaan kurikulum yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan kurikulum harus berdasarkan konsep yang jelas tentang berbagai hal yang menjadikan kehidupan lebih baik, karakteristik masyarakat sekarang dan masa depan, serta kebutuhan dasar manusia.
- b) Perencanaan kurikulum harus dibuat dalam kerangka kerja yang komprehensif, yang mempertimbangkan dan mengkoordinasi unsur esensial belajar mengajar efektif.
- c) Perencanaan kurikulum harus bersifat reaktif dan antisipatif. Pendidikan harus responsif terhadap kebutuhan peserta didik, untuk membantu peserta didik tersebut menuju kehidupan yang baik.
- d) Tujuan-tujuan pendidikan harus meliputi rentang yang luas akan kebutuhan dan minat yang berkenaan dengan individu dan masyarakat.
- e) Rumusan berbagai tujuan pendekatan harus diperjelas dengan ilustrasi konkrit, agar dapat digunakan dalam pengembangan

⁶³ Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan..., *Op.Cit.*, h. 172

rencana kurikulum yang spesifik. jika tidak, persepsi yang muncul kurang jelas dan kontradiktif.

- f) Dalam perencanaan kurikulum, harus diadakan evaluasi secara kontinui terhadap semua aspek pembuatan keputusan kurikulum, yang juga meliputi analisis terhadap proses dan konten kurikulum.
- g) Berbagai jenjang sekolah, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, hendaknya merespon dan mengakomodasi perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik. Untuk itu perlu direfleksikan organisasi dan prosedur secara bervariasi.⁶⁴

6) Komponen-Komponen Perencanaan Kurikulum

Standar perencanaan kurikulum (meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar) secara nasional dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar tersebut menjadi acuan lembaga pendidikan dalam melakukan pengembangan perencanaan kurikulum. Artinya lembaga pendidikan mempunyai tugas untuk mengembangkan hal tersebut sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan yang ada di lapangan. Maka sudah seharusnya lembaga pendidikan melakukan perencanaan atau desain kurikulum baik berupa silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran perlu

⁶⁴ *Ibid.*, h. 173-174

dikembangkan secara spesifik, efektif, efisien, relevan dan komprehensif.

Komponen-komponen yang perlu direncanakan dalam perencanaan kurikulum adalah:

- a) Tujuan, untuk memberikan arah pada kegiatan yang dilakukan
- b) Isi, merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
- c) Aktifitas belajar, kegiatan dalam interaksi dan aktivitas yang diberikan dalam proses belajar mengajar
- d) Sumber belajar, sumber yang digunakan dalam mencapai tujuan, misalnya buku, perangkat lunak komputer, dll
- e) Evaluasi, untuk mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan tujuan. Evaluasi dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan terbuka.⁶⁵

7) Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Perencanaan Kurikulum

- a) Administrator

Peranan para administrator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum adalah menyusun dasar-dasar hukum, menyusun kerangka dasar serta program inti kurikulum.⁶⁶

Kerangka dasar dan program inti tersebut akan menentukan minimum *course* yang dituntut. Atas dasar kerangka dasar dan

⁶⁵ Dinn Wahyudin, *Op.Cit.*, h. 87

⁶⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum*, Cet 17 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)., h. 55

program inti tersebut para administrator-administrator lokal mengembangkan kurikulum pada lembaga pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

b) Peserta didik

Peran peserta didik dalam pengembangan kurikulum dapat secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung peserta didik dapat dilibatkan atau disertakan dalam penyusunan kurikulum dengan memasukkan sebagai anggota tim penyusun. Hal ini dilakukan agar materi dari kurikulum dapat diterima dengan baik, tapi hal ini jarang terjadi. Sedangkan peran tidak langsung berkenaan dengan *input* peserta didik. Hal terpenting dari peserta didik adalah umpan balik yang diberikan terhadap kurikulum, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk dalam penyusunan kurikulum.⁶⁷

c) Warga masyarakat

Peranan mereka dapat berkenaan dengan dua hal, pertama dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin tidak semua masyarakat atau orang tua dapat ikut serta hanya terbatas kepada beberapa orang saja yang cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang memadai. Kedua, dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat erat antara pendidik dengan para orang tua peserta didik. Sebagian

⁶⁷ Dinn Wahyudin, *Op.Cit.*, h.88

kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan dirumah dan orang tua dapat mengikuti atau mengamati kegiatan belajar di rumah.

d) Penyusun kurikulum

Penyusun kurikulum (biasanya berbentuk tim penyusun) merupakan pemegang tanggung jawab terbesar yang bekerja sama satu dengan lain untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum. Kualitas kurikulum ditentukan kerja mereka sehingga mereka yang menjadi penentu kualitas rancangan kurikulum yang berhasil.

e) Pendidik

Pendidik adalah kelompok yang dominan dalam perencanaan kurikulum. Pendidik memegang peranan cukup penting dalam kurikulum, baik sebagai perencana, implementasi atau pelaksanaan dan pengembangan kurikulum serta pengevaluasi kurikulum. Juga merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari atas. Disamping itu pendidik berperan sebagai pelajar dalam masyarakat sebab harus belajar struktur sosial budaya masyarakat, nilai-nilai utama, pola-pola tingkah laku dalam masyarakat. bahkan pendidik berperan sebagai penerima umpan balik dari peserta didik dan masyarakat, sehingga menemukan ide-ide baru bagi perbaikan program.

f) Pimpinan penyusun kurikulum

Pimpinan penyusun kurikulum memegang peran utama dalam kegiatan kurikulum karena kesuksesan sebuah kurikulum merupakan tanggungjawab dari pimpinan kurikulum. Kemampuannya dalam memimpin kegiatan sangat berpengaruh pada hasil yang dicapai. Pada perguruan tinggi pimpinan penyusun kurikulum dapat berasal dari ketua program studi atau jurusan, wakil dekan bidang akademik, dekan dan wakil rektor bidang akademik serta pimpinan penjamin mutu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusun kurikulum tersebut harus memiliki sejumlah kemampuan dasar:

- a) Memiliki kemampuan melakukan proses perubahan yang efektif, variabel yang mempengaruhi proses perubahan itu, yaitu: struktur organisasi, sistem informasi dan kontrol, anggota organisasi/manusia, dan tugas organisasi.
- b) Kemampuan melakukan hubungan timbal balik (bekerjasama) antar perencana kurikulum.
- c) Kepemimpinan untuk mengarahkan dan mengatur suatu kelompok atau organisasi
- d) Kemampuan berkomunikasi, sehingga tercipta suasana yang kondusif.

8) Kerangka Kerja Perencanaan Kurikulum

Bondi menyatakan konsep manajemen perencanaan kurikulum dikenal dengan CMP (*The Curriculum Management Plan*). Menurut Bondi langkah pertama dalam melaksanakan CMP adalah klarifikasi terhadap tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan-tujuan itu harus realistis, spesifik, memperlihatkan *performance* yang baik, melibatkan individu maupun kelompok, dan *observable*. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Langkah selanjutnya dengan melakukan identifikasi landasan filosofis kemudian mewujudkan perencanaan kurikulum tersebut menjadi sebuah *draft*.⁶⁸

Perancangan kurikulum pendidikan tinggi dalam panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi Kemenristek Dikti disebutkan bahwa tahapan perancangan kurikulum merupakan kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi.⁶⁹ Perancangan kurikulum pendidikan tinggi meliputi: a) perumusan capaian perkuliahan lulusan (CPL); b) pembentukan mata kuliah; c) penyusunan mata kuliah dan struktur kurikulum; d) merumuskan

⁶⁸ Wiles Jon and Joseph Bondi, *Curriculum Development A Guide To Practice*, (New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002)., h.35

⁶⁹ Direktorat Pembelajaran kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*, 2016, tersedia pada <http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Panduan-Penyusunan-Kurikulum-PT-Tahun-20161.pdf> (2016)., h. 7

capaian perkuliahan mata kuliah (CPMK), dan e) menyusun rencana perkuliahan semester (RPS).⁷⁰

b. Pengorganisasian Kurikulum

Pada tahap perencanaan aspek-aspek yang berhubungan dengan proses pembelajaran harus disiapkan dengan matang dan menyeluruh agar tahapan pengorganisasian dan penataan dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Tahapan pengorganisasian atau penataan merupakan tahapan yang harus diperhatikan oleh setiap pengambil kebijakan, hal ini bertujuan agar tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Pengorganisasian kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari bahan pembelajaran serta mempermudah peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Pengorganisasian kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pembelajaran yang ada dalam kurikulum. Adapun yang menjadi sumber bahan pembelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek peserta didik dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengorganisasian kurikulum dapat berjalan dengan baik jika memperhatikan faktor-faktor, prosedur dan model-model dalam pengorganisasiannya. Penjelasan terkait hal tersebut sebagai berikut:

⁷⁰ *Ibid.* h. 30

1) Faktor-Faktor dalam Pengorganisasian Kurikulum

Pengorganisasian kurikulum harus memperhatikan faktor-faktor tertentu. faktor yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum yaitu:

a) Ruang Lingkup (*Scope*)

Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis-jenis organisasi kurikulum bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan pelajaran yang berbeda sehingga kegiatan dan pengalaman belajar pun juga berbeda. Setelah memilih dan menentukan ruang lingkup bahan pelajaran, kemudian disusun dalam organisasi kurikulum tertentu sesuai dengan yang diinginkan.

b) Urutan (*Sequence*)

Sequence menentukan urutan bahan pelajaran disajikan, apa yang dahulu apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalnya hanya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami, atau bila telah dimiliki keterampilan-keterampilan tertentu atau bila

perkembangan-perkembangan peserta didik telah mencapai taraf tertentu. Faktor-faktor yang turut menentukan urutan bahan pelajaran antara lain; (1) kematangan peserta didik; (2) latar belakang pengalaman atau pengetahuan; (3) tingkat inteligensi; (4) minat; (5) kegunaan bahan; dan (6) kesulitan bahan pelajaran.

c) Kesenambungan (*Continuity*)

Kontinuitas kurikulum dalam pengorganisasian kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari peserta didik, jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini. Artinya materi yang dipelajari peserta didik semakin lama semakin mendalam yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal.

d) Terpadu (*Integrated*)

Faktor ini berangkat dari asumsi bahwa bidang-bidang kehidupan memerlukan pemecahan secara multidisiplin. Artinya, jika pendidik menggunakan *subject centered curriculum*, maka besar kemungkinan pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi terlepas-lepas dan tidak fungsional. Maka dari itu harus adanya fokus pada permasalahan yang perlu dipecahkan berdasarkan bidang-bidang kehidupan. Untuk mencapai pemahaman yang utuh dan menyeluruh, maka keterpaduan ini

bukan hanya dilakukan oleh pendidik dalam berbagai mata pelajaran atau kuliah, tetapi juga oleh peserta didik melalui pengetahuan dari berbagai sumber belajar yang saling berhubungan.

e) Keseimbangan (*Balance*).

Keseimbangan ini dapat dipandang dari dua segi, yakni: a) keseimbangan terhadap substansi bahan atau isi, yaitu tentang apa yang dipelajari; b) keseimbangan yang berkaitan dengan cara atau proses belajar. Dalam menentukan keseimbangan isi, maka perlu dipertimbangkan betapa penting dan perlunya masing-masing mata pelajaran atau kuliah, suatu hal yang tidak mudah karena sukar menentukan kriterianya. Ada yang menganggap bahwa semua mata pelajaran sama pentingnya dari segi edukatif, ekonomi, studi lanjutan, pembangunan negara, dan sebagainya. Masalah keseimbangan atau *balance* ini kurang dirasakan pada lembaga pendidikan komprehensif yang menggunakan sistem kredit. Di samping mata pelajaran wajib tersedia sejumlah mata pelajaran pilihan yang dapat diambil peserta didik dengan bimbingan pendidik. Pada umumnya akan diusahakan adanya keseimbangan yang berkenaan dengan pendidikan intelektual, moral, sosial, fisik, estetis, dan keterampilan agar tiap anak mendapat pendidikan yang harmonis. Kalau hanya berbicara tentang kepentingan tentu semua bahan pelajaran adalah penting,

tetapi kepentingan tersebut harus dikaitkan dengan pembentukan pribadi peserta didik secara utuh dan menyeluruh.

f) Waktu (*Times*)

Kurikulum akhirnya harus dituangkan dalam bentuk mata pelajaran atau kegiatan belajar beserta waktu yang disediakan untuk masing-masing mata pelajaran. Disini dihadapi masalah distribusi atau pembagian waktu yang harus menjawab pertanyaan seperti berapa tahun suatu mata pelajaran harus diberikan, berapa kali seminggu dan berapa lama tiap mata pelajaran. Apakah mata pelajaran itu dipadatkan pada satu semester ataukah disebarakan selama beberapa tahun. Penelitian tentang distribusi dan efektivitas kurikulum sangat langka. Maka karena itu distribusi waktu kebanyakan didasarkan atas tradisi pengalaman, atau pertimbangan para pengembang kurikulum. Sering juga terjadi tawar-menawar. Sebagai pasangan biasanya digunakan betapa pentingnya nilai dan tujuan mata pelajaran. Nilai ini dapat berubah menurut keadaan zaman sehingga jumlah jam yang disediakan dapat berkurang atau bertambah.⁷¹

Berdasarkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam organisasi kurikulum bahwa beberapa komponen-komponen di atas harus di pertimbangan adanya. Karena dengan adanya komponen

⁷¹ Aset Sugiana, "Proses Pengembangan Organisasi Kurikulum Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia", *Jurnal Pedagogik*, Vol. 05 No. 02 (2018), tersedia pada <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik> (2018)., h. 260-263

tersebut, baik dalam *scope* dan *sequence* nya tentang bagaimana peserta didik diajarkan/diberikan ilmu sesuai kebutuhannya nanti di masyarakat, dan bagaimana urutan pelajaran tersebut. Di tambah lagi keterpaduan ilmu pengetahuan yang saling berhubungan antara mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, dan tentunya keseimbangan dengan intelektual, sosial, estetis dan dalam diberikan dalam waktu yang telah direncanakan. sehingga menjadikan proses pembelajaran lebih terarah dan lebih efektif serta lebih efisien.

2) Prosedur Pengorganisasian Kurikulum

Beberapa cara pengorganisasian kurikulum yaitu sebagai berikut:

a) Pengorganisasian melalui Mata Pelajaran

Pengorganisasian melalui mata pelajaran ialah menjadikan buku sebagai sumber belajar yang penting bagi peserta didik dalam mempelajari kurikulum.

b) Pengorganisasian dengan Cara Tambal Sulam

Memilih kurikulum yang baik yang sesuai dengan kondisi dan tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, kurikulum satuan pendidikan menjadi kaya dengan program-program terbaik dan berusaha menghilangkan program yang dianggap kurang baik.

c) Pengorganisasian melalui Analisis Kegiatan

Dengan menganalisis kegiatan yang berhubungan dengan segala kegiatan yang ada dalam kehidupan masyarakat peserta didik.

Analisis kegiatan ini bertujuan agar atau supaya bahan/materi pelajaran dapat diarahkan pada kehidupan masyarakat yang nyata.

d) Pengorganisasian melalui Fungsi Sosial

Merumuskan fungsi sosial ialah bahan pelajaran disampaikan dengan mengarah ke dalam kehidupan sosial, bagaimana peserta didik nantinya hidup bersosial antar individu atau kelompok dalam masyarakat.

e) Pengorganisasian melalui Survei Pendapat

Survei pendapat bisa dilakukan dari beberapa pihak. seperti peserta didik, orang tua, pendidik, pengawas, ketua jurusan atau program studi, tokoh masyarakat, dan mitra lembaga.

f) Pengorganisasian melalui Studi Kesalahan

Pada tahap ini analisis studi kesalahan terhadap proses belajar dan hasilnya.

g) Pengorganisasian melalui Analisis Masalah Remaja

Ross Moaney dan kawan-kawan menganalisis 330 masalah kebutuhan remaja yang dibagi menjadi 11 kelompok, yaitu: perkembangan jasmani dan kesehatan; biaya hidup dan pekerjaan; kegiatan sosial dan rekreasi; berkeluarga, menikah dan seks; hubungan sosial secara psikologis; hubungan pribadi; moral, dan keagamaan; rumah tangga dan kerabat; pendidikan dan kerja sama;

penyesuaian terhadap pekerjaan pendidikan; kurikulum dan prosedur pembelajaran.⁷²

Berdasarkan prosedur dalam pengorganisasian kurikulum di atas bahwa setiap pengembang kurikulum harus melakukan survei dan menganalisis serta menyimpulkan sehingga materi pelajaran yang disampaikan mampu bersaing dengan dunia yang semakin maju. Materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik memberikan pengetahuan terkini, yang di dalamnya terdapat berbagai bidang kehidupan sosial, baik dalam keluarga, masyarakat, hidup sebagai warga negara.

3) Model-Model Pengorganisasian Kurikulum

a) Kurikulum Berdasarkan Mata Pelajaran (*subject centered curriculum*)

Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi-generasi terdahulu. Dengan demikian mereka lebih mudah dan lebih cepat membekali diri untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya.⁷³

⁷² *Ibid.*, h. 264

⁷³ Nasution, *Pengembangan kurikulum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)., h. 26

b) *Correlated Curriculum* (Mata Pelajaran Gabungan)

Correlated curriculum ini merupakan bentuk dari mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Akan tetapi, mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi (*broadfield*). Pola kurikulum *correlated curriculum* ini menghendaki agar mata pelajaran berhubungan dan bersangkut paut satu sama lain (*correlated*) walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain.⁷⁴

Pola kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya adalah sebagai berikut: (1) bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam; (2) kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata peserta didik; (3) kurikulum ini kurang memerhatikan bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik; (4) apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Sementara itu, kelebihan pola mata pelajaran gabungan (*correlated curriculum*) adalah sebagai berikut: (1) bahan bersifat korelasi walau sebatas beberapa mata pelajaran; (2) memberikan wawasan yang luas dalam lingkup atau bidang studi;

⁷⁴ Rusman, *Op.Cit.*, h. 63

(3) menambah minat peserta didik berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis.⁷⁵

c) *Broad Field Curriculum* (Cakupan Luas)

Hilda Taba menegaskan agar tercapai gabungan yang nyata, maka perlu adanya *integrating threads* dan *focusing centers* berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Ciri-ciri kurikulum bidang studi antara lain: (1) Kurikulum terdiri atas bidang studi yang merupakan perpaduan beberapa mata pelajaran yang serumpun dan memiliki ciri-ciri yang sama; (2) Bahan pelajaran bertitik tolak pada suatu inti masalah (*core subject*) tertentu, kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan; (3) Bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan; (4) Strategi pembelajaran bersifat terpadu; (5) pendidik berperan sebagai pengajar bidang studi; dan (6) Penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat.⁷⁶

d) *Integrated Curriculum* (Kurikulum Terpadu)

Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-

⁷⁵ Aset Sugiana, *Op.Cit.*, h. 266

⁷⁶ Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011)., h. 27

batas satu pelajaran dengan yang lainnya.⁷⁷ Organisasi kurikulum yang menggunakan model *integrated*, tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan. Masalah tersebut kemudian dinamakan tema atau unit. Belajar berdasarkan unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis fakta sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Dengan belajar melalui pemecahan masalah itu diharapkan perkembangan peserta didik tidak hanya terjadi pada segi intelektual, tetapi juga seluruh aspek, seperti sikap, emosi, dan keterampilan.

Kurikulum ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara kelompok maupun individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan peserta didik dalam mengembangkan program pembelajaran. Bahan pelajaran akan dapat membentuk kemampuan peserta didik secara proses maupun produk. Bahan pelajaran selalu aktual sesuai perkembangan dan kebutuhan masyarakat maupun peserta didik sebagai individu yang utuh sehingga bahan pelajaran yang dipelajari selalu sesuai dengan bakat, minat, dan potensi peserta

⁷⁷ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktik pada Perguruan Tinggi)*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 24

didik. Ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam kurikulum bentuk ini. Kekurangan kurikulum ini diantaranya sebagai berikut: (1) ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang *uniform*, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan; (2) kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis; (3) diperlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun kelompok; (4) pendidik belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum bentuk ini; (5) masyarakat, orang tua, dan peserta didik belum terbiasa dengan kurikulum ini. Sementara itu, kelebihan kurikulum ini adalah sebagai berikut: (1) mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan; (2) memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu; (3) memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama (*cooperative*); (4) mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran; (5) memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara maksimal; (6) memberikan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan pada pengalaman langsung; (7) dapat membantu meningkatkan hubungan antara lembaga

pendidikan dengan masyarakat; (8) dapat menghilangkan batas-batas yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain; (9) bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis; (10) bahan pelajaran tidak bersifat sederhana; (11) dapat memungkinkan kemampuan yang dicapai peserta didik akan berbeda secara mencolok; (12) memungkinkan akan memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Oleh karena itu, perlu adanya pengorganisasian yang lebih optimal sehingga dapat mengurangi-kekurangan tersebut.⁷⁸

e) Kurikulum Inti (*Core Curriculum*)

Menurut Founce dan Bossing mengistilahkan *core curriculum* “...those learning experieces that fundamental for all learners because they drive from a) our common, individual drives and needs and, b) our civic and social needs as participating members of a democratic society”. Dengan merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik, karena pengalaman belajar berasal dari: (1) kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum; dan (2) kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokritas.⁷⁹ Definisi yang diberikan oleh Craswell kepada *core* ialah: *a continuous, carreful planned series of experiences which are based on significant personal and social*

⁷⁸ Rusman, *Op.Cit.*, h. 65-66

⁷⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)., h. 34

problems and which involve learnings of common concern to all youth. Dari definisi itu kita lihat bahwa ciri-ciri *core* ialah bahwa kurikulum itu: (1) merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan; (2) direncanakan secara kontinu; (3) didasarkan atas masalah atau problema; (4) yang bersifat pribadi dan sosial; (5) diperuntukan bagi semua peserta didik, jadi termasuk pendidikan umum.⁸⁰ Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu (*integrated curriculum*). Ada beberapa karakteristik yang dapat dikaji dalam kurikulum ini adalah: (1) kurikulum ini direncanakan secara berkelanjutan (*continue*) selalu berkaitan dan direncanakan secara terus menerus; (2) isi kurikulum yang dikembangkan merupakan rangkaian dari pengalaman yang saling berkaitan; (3) isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah maupun problema yang dihadapi secara aktual; (4) isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial; (5) isi kurikulum ini lebih difokuskan berlaku untuk semua peserta didik sehingga kurikulum ini sebagai kurikulum umum, tetapi substansinya bersifat problema, pribadi, sosial, dan pengalaman yang terpadu.⁸¹

⁸⁰ Nasution, *Loc.Cit.*

⁸¹ Rusman, *Op.Cit.*, h. 67

f) *Experience* atau *Activity Curriculum*.

Experience curriculum sering disebut juga dengan *activity curriculum*. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman peserta didik dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi peserta didik. Kurikulum ini pada hakikatnya peserta didik berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik peserta didik. *Activity curriculum* menonjolkan bahwa kurikulum itu mengutamakan kegiatan dan pengalaman peserta didik, walaupun dalam tiap kurikulum peserta didik dapat diberikan berbagai kegiatan dan pengalaman. Kurikulum ini harus disusun bersama oleh pendidik dan peserta didik dengan penekanan utama pada prosedur pemecahan masalah. Kelebihan kurikulum ini antara lain sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik, memperhatikan perbedaan individual, dan memberikan bekal kemampuan khusus untuk hidup di masyarakat. Sedangkan kekurangannya, antara lain kebutuhan dan minat peserta didik belum tentu relevan dengan realitas kehidupan yang begitu kompleks, kontinuitas dan urutan bahan masih sangat lemah, dan memerlukan guru yang kompeten dan profesional yang

tidak hanya menguasai mata pelajaran atau bidang studi, tetapi juga memiliki kemampuan sosial.⁸²

c. Pelaksanaan Kurikulum

Implementasi atau pelaksanaan kurikulum menjadi aspek yang sangat penting dalam manajemen kurikulum. Felix menyatakan, bahwa implementasi kurikulum merupakan penerapan secara praktik rangkaian program dan silabus mata pelajaran yang telah disusun.⁸³ Proses ini adalah proses dimana peserta didik dibantu dalam mendapatkan pengetahuan atau pengalaman.⁸⁴ Implementasi kurikulum menempatkan mahasiswa sebagai titik sentral dari proses pendidikan, dimana mahasiswa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, kemampuan, ide, dan perilaku yang telah ditetapkan. Penerapan kurikulum merupakan fase yang sangat penting dalam siklus kurikulum dimana pemilihan strategi digunakan untuk memilih kelengkapan seperti silabus/RPS, skema kerja, rencana perkuliahan, materi perkuliahan, buku teks dan bacaan lainnya serta lingkungan lembaga pendidikan.

Implementasi merupakan aktualisasi dari kurikulum yang telah direncanakan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan

⁸² Aset Sugiana, *Op.Cit.*, h. 270

⁸³ Felix Mulengeki Et.al, *Curriculum Development and Evaluation*, (Tanzania: Faculty of Education The Open University of Tanzania, 2013)., h. 44

⁸⁴ G K Chaudhary, "Factors affecting curriculum implementation for students", *International Journal of Applied Research*, Vol. 1 No. 12 (2015), tersedia pada www.allresearchjournal.com (2015)., h. 984

peserta didik untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditetapkan merupakan bentuk dari implementasi kurikulum itu sendiri. Pengimplementasian kurikulum dengan baik di lapangan merupakan indikator bentuk keberhasilan dari perencanaan yang telah dibuat. Implementasi pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perencanaan kurikulum akan mengakibatkan ketidaktercapaian tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan. Pengimplementasi kurikulum dengan baik oleh lembaga pendidikan sesuai dengan pilar-pilar yang telah dikemukakan oleh UNESCO yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live together*).⁸⁵ Implementasi kurikulum harus dikelola secara profesional, efektif, dan efisien yang mengacu pada empat pilar pendidikan tersebut yang dilakukan secara konsisten dengan perencanaan kurikulum yang telah dikembangkan. Pengimplementasian kurikulum mengikuti empat pilar tersebut akan dapat mewujudkan tercapainya indikator pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang telah direncanakan. Untuk lebih memahami terkait pelaksanaan atau implementasi kurikulum berikut akan diuraikan terkait implementasi atau pelaksanaan kurikulum:

⁸⁵ Rusman, *Op.Cit.*, h. 18

1) Pengertian Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan atau implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Miller dan seller “*in some case implementasi has been identified with instruction*”.⁸⁶ yang menjelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep ide program atau tatanan kurikulum kedalam praktik pembelajaran atau berbagai kreativitas baru sehingga terjadinya perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Fullan mendefenisikan suatu gagasan, program atau kumpulan kegiatan yang baru bagi orang-orang yang berusaha atau diharapkan untuk berubah. Dengan demikian implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diujicobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang disesuaikan terhadap situasi dan kondisi lapangan dan karakteristik peserta didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisik.⁸⁷

2) Pendekatan dan Model Pelaksanaan Kurikulum

Model implementasi kurikulum maksudnya suatu upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan kurikulum untuk meningkatkan hasil

⁸⁶ John P. Miller and W. Seller, *Curriculum Perspective and Practice*, (New York and London: Longman. Inc, 1985)., h. 42

⁸⁷ M.G. Fullan, *The Meaning Of Educational Chang*, (New York: Teacher College Press, 1991)., h. 65-66

belajar peserta didik. Maka pelaksana kurikulum (dosen, ketua program studi serta manajemen perguruan tinggi) dalam penerapannya (ketika proses belajar mengajar atau proses pendidikan atau latihan) dapat melakukan perubahan (*modification*), penyesuaian (*adaptation*), atau pembaharuan (*innovation*) berdasarkan kondisi, kebutuhan dan tuntutan setempat. Upaya modifikasi, adaptasi, maupun inovasi kurikulum adalah persoalan penting (esensial), sebab sebuah kurikulum tidak akan pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai desain sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan untuk memperoleh hasil secara maksimal.⁸⁸ Dengan demikian, pengembangan model implementasi pada dasarnya dapat dilakukan melalui modifikasi, adaptasi, inovasi atau gabungan dari dua atau ketiganya dalam merancang suatu kurikulum.

Print menyatakan, "*In the early stage of implementasi it is likely that modifications will be made of the curriculum... The degree of successful implementation will reflect to large measure the ability and willingness of developers to accommodate modification to their curriculum*".⁸⁹

Penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa modifikasi dalam implementasi kurikulum merupakan tahapan yang sangat

⁸⁸ P.W.Jackson, *Handbook of Reseach on Curriculum*, (New York: Mac Millan Publishing Company, 1991)., h. 50

⁸⁹ Murray Print, *Curriculum Development and design*, ed. Allen & UnwinP (Australia, 1993)., h. 87

perlu dipertimbangan untuk dilakukan. Demikian juga ukuran kesuksesan sebuah implementasi kurikulum pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana pengembang kurikulum memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengakomodasi kemungkinan dilakukannya modifikasi dalam kurikulum yang dirancang.

Kurikulum yang telah tersusun harus diimplementasikan di lapangan. Para peneliti atau para ahli dalam menyusun program implementasi kurikulum secara umum bertujuan untuk a) mengukur derajat keberhasilan suatu inovasi kurikulum setelah suatu rencana diterapkan dan; b) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum.

Fullan mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum (program pembelajaran) suatu program pendidikan dapat dikategorikan:

a) Karakteristik program itu sendiri, meliputi

- (1) Kebutuhan (*need*), yaitu sebuah program untuk mendapatkan respon dan dukungan pada dasarnya harus berangkat dari kebutuhan, baik peserta didik, pendidik ataupun lembaga.
- (2) Kejelasan (*clarity*), yang mengandung maksud kejelasan dalam arti dan tujuan (*goals and means*)
- (3) Kekompleksan (*complexity*), yang berarti tingkat kemudahan dan sulitnya suatu program untuk diterapkan di lapangan

- (4) Mutu dan keterterapan (*quality and practicality*), yaitu apakah program tersebut memang berkualitas khususnya dibandingkan dengan program sebelumnya, serta tingkat keterterapannya/kebermanfaatannya dilapangan/masyarakat.
- b) Karakteristik Lokal (*local characteristics*), meliputi
- (1) Lingkungan sekolah (*school district*) terutama berkaitan dengan kondisi, fasilitas dan perlengkapan pendukung di sekolah
 - (2) Masyarakat (*community*) yaitu dukungan masyarakat sekitar, dunia usaha industri dan lainnya.
 - (3) Pimpinan/ pengambil kebijakan (*principal*), terutama berkaitan dengan sistem manajemen dan kepemimpinan ketua jurusan atau program studi
 - (4) Pendidik, yaitu respon, dukungan dan partisipasi dalam penerapan program.
- c) Faktor eksternal (*external factors*) yang berbentuk dukungan dari pemerintah (administrator pendidikan) maupun dukungan lembaga-lembaga swasta yang peduli dengan penerapan program yang dimaksud.⁹⁰

Dalam konteks penerapan kurikulum faktor-faktor yang dikemukakan oleh Fullan tersebut pada dasarnya merupakan referensi penting sebab berkaitan dengan penerapan pembaharuan

⁹⁰ M.G. Fullan, *Op.Cit.*, h.67

dalam bidang pendidikan, yang salah satunya dapat berupa kurikulum.

Sementara itu Jackson mengidentifikasi ada lima faktor yang menjadi penghambat implementasi kurikulum, yaitu

- a) Pendidik yang tidak inovatif
- b) Pendidik tidak mempunyai keterampilan dan pengetahuan terhadap hal-hal baru
- c) Tidak tersedia sarana
- d) Ketidakcocokan kebijakan dengan inovasi
- e) Tidak adanya motivasi bagi pelaksana inovasi.⁹¹

Jackson berpendapat ada tiga pendekatan dalam implementasi kurikulum, yaitu: a) *fidelity perspective*; b) *mutual adaption*; dan c) *enactment curriculum*. Penjelasannya sebagai berikut:

a) *Fidelity perspective*

Kurikulum dipandang sebagai rancangan (program) yang dibuat di luar ruang kelas, kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai sesuatu yang riil (rencana program) yang diajarkan oleh pendidik, para pengembang kurikulum pada umumnya mempunyai spesialisasi kurikulum di luar sistem lembaga pendidikan seperti konsultan, akademis atau para pendidik. Namun demikian ahli kurikulum tersebut dapat dipegang oleh administrator pendidikan.

⁹¹ P.W.Jackson, *Op.Cit.*, h. 406

b) *Mutual adaption*

Pendekatan ini memiliki ciri pokok dalam implementasinya, pelaksana kurikulum mengadakan penyesuaian-penyusuaian berdasarkan kondisi riil, kebutuhan dan tuntutan perkembangan secara kontekstual. Pendekatannya berangkat dari asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, tetapi perlu diadaptasi sesuai kebutuhan setempat.

c) *Enactment curriculum.*

Perspective ini memandang bahwa rencana program (kurikulum) bukan merupakan produk atau peristiwa (pengembangan), melainkan sebagai proses yang berkembang.⁹²

Sementara itu terkait model implementasi kurikulum terdiri dari empat model, sebagai berikut:

a) *Overcoming resistance to change (ORC)*

Model penanggulangan resistensi perubahan didasarkan pada asumsi Neal Gross yang menyatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan upaya perubahan yang terorganisir secara rencana pada dasarnya merupakan fungsi dari kemampuan pemimpin dalam menanggulangi penolakan staf terhadap

⁹² *Ibid.*, h. 428-429

perubahan pada saat sebelum dan selama inovasi diperkenalkan.

b) *Organization development* (OD)

Model pengembangan organisasi ini secara khusus diarahkan untuk menjembatani perubahan dan pengembangan dalam suatu organisasi. Dengan memandang kurikulum sebagai pengembangan organisasi, maka penerapan kurikulum memerlukan implementasi yang tak pernah berakhir. Pada pendekatan ini selalu muncul gagasan baru yang dibawa ke dalam program baru. Demikian pula materi dan metode uji coba muncul hal-hal yang baru.

c) Model bagian, unit dan lingkungan organisasi

Model ini menyadari bahwa lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi yang secara nyata terdiri dari unit-unit seperti jurusan, kelas dan personalia. Bagian-bagian ini mempunyai hubungan yang fleksibel, walaupun sistem administrasi bersifat sentralistik, kebanyakan lembaga pendidikan memiliki pengendalian sentralistik demikian kecil khususnya apa yang terjadi di ruang kelas.

d) Model perubahan Pendidikan

Model ini menjelaskan bahwa dalam pengimplementasian kurikulum perlu memahami karakteristik perubahan yang akan dihadapi. Sering seorang menolak suatu inovasi karena

kebutuhan untuk melakukan perubahan tidak dikenalnya, atau apabila ia sudah mengetahui tetapi tidak menerimanya berarti orang tersebut tidak dipengaruhi oleh nilai yang dipegangnya. Ketika orang memandang perubahan sejalan dengan nilai yang ada pada mereka maka mereka akan menerima inovasi tersebut dengan senang hati. Untuk menerima suatu inovasi seseorang perlu merasakan tentang kualitas, manfaat dan kepraktisannya, untuk itu sudah seharusnya inovasi kurikulum memiliki kualitas tinggi dan jelas.⁹³

Sedangkan menurut Miller dan Seller model-model implementasi kurikulum dibagi menjadi tiga, yaitu *The Concerns-Based Adaption Model*, *Model Leithwood* dan model *TORI*.

a) *The Concerns-Based Adaption Model* (CBAM)

Model CBAM ini adalah sebuah model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian pendidik terhadap sebuah inovasi. Perubahan dalam inovasi ini ada dua dimensi, yakni tingkatan-tingkatan kepedulian terhadap inovasi serta tingkatan-tingkatan penggunaan inovasi. Perubahan yang terjadi merupakan suatu proses bukan peristiwa yang sering terjadi ketika program baru diberikan kepada pendidik.

⁹³ Francis P. Hunkins Allan C. Ornstein and, *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*, (USA: Pearson, 2009), h. 52

b) Model *Leithwood*

Model ini memfokuskan pada pendidik. Asumsi yang mendasari model ini adalah (1) setiap pendidik mempunyai kesiapan yang berbeda; (2) implementasi merupakan proses timbal balik; (3) pertumbuhan dan perkembangan memungkinkan adanya tahap-tahap individu untuk identifikasi. Intinya membolehkan para pendidik dan pengembang kurikulum mengembangkan profil yang merupakan hambatan untuk perubahan dan bagaimana para pendidik dapat mengatasi hambatan tersebut. Model ini tidak hanya menggambarkan hambatan dalam implementasi, tetapi juga menawarkan cara dan strategi para pendidik dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya tersebut.

c) Model *TORI*

Model ini dimaksudkan untuk menggugah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat (*interest*) dalam diri pendidik untuk memanfaatkan perubahan. Esensi dari model TORI adalah: (1) *Trusting*: menumbuhkan kepercayaan diri; (2) *Opening*: menumbuhkan dan membuka keinginan; (3) *Realizing*: mewujudkan, dalam arti setiap orang bebas berbuat dan mewujudkan keinginannya untuk perbaikan; (4) *interdepending*: saling ketergantungan dengan lingkungan. Inti

dari model ini memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Model ini menyediakan suatu skala yang membantu pendidik mengidentifikasi, bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktek serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan.⁹⁴

3) Perencanaan Implementasi Kurikulum

Perencanaan implementasi kurikulum digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan potensial dan berkenaan dengan permasalahan komponen-komponen utama. Komponen-komponen utama tersebut adalah:

a) Studi tentang program baru

Studi tentang program baru ditempatkan pada level lembaga pendidikan dan diarahkan oleh sebuah komisi perencanaan yang menjelaskan program baru tersebut dan bisa juga dilaksanakan pada level jurusan.

b) Identifikasi sumber daya

Identifikasi sumber daya meliputi tiga area, yaitu media cetak dan audiovisual (buku tulis dan bahan pengajaran, sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan/biaya).

⁹⁴ John P. Miller and W. Seller, *Op.Cit.*, h. 249-250

c) Penetapan peran

Pendidik sebagai implementer dari sebuah program, peran dari setiap pihak yang terlibat dalam perencanaan implementasi kurikulum harus ditetapkan dengan cermat.

d) Pengembangan professional

Pengembangan professional dilakukan bertujuan untuk membantu pendidik dalam memahami secara rasional dari program dan menggabungkan ke dalam program jurusan secara menyeluruh.

e) Penjadwalan

Penjadwalan bertujuan untuk memfasilitasi rangkaian kejadian. Penjadwalan juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengalokasikan waktu dalam impletansi program dan pelaksanaan tugas-tugas yang diperlukan.

f) Sistem komunikasi

Sistem komunikasi merupakan frekuensi diskusi tentang program baru di antara pendidik, jurusan dan pengembang kurikulum.

g) Pelaksanaan monitoring

Monitoring bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan implementasi dan menggunakan untuk memfasilitasi dan mendukung pendidik.

h) Evaluasi proses

Evaluasi proses bertujuan untuk mengumpulkan data yang informasinya untuk diolah dan ditafsirkan sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan pelaksana, administrator untuk membuat keputusan dan kebijakan.

i) Pelaporan

Pelaporan berkenaan dengan hasil (data dan informasi) yang telah dipelopori melalui kegiatan monitoring dan evaluasi proses. Pelaporan harus autentik dan akurat karena menentukan tidak lanjut dalam proses implementasi kurikulum.

j) Revisi/redesain

Revisi atau upaya perbaikan ini dilakukan secara terus menerus dengan maksud kegiatan implementasi kurikulum terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien yang pada gilirannya diperoleh suatu program yang produktif dan bermutu.⁹⁵

⁹⁵ Dinn Wahyudin, *Op.Cit.*, h. 99-101

4) Pihak yang Terkait dalam Implementasi Kurikulum

a) Pakar ilmu pendidikan

Pakar ilmu Pendidikan ini dalam hal implementasi kurikulum sering kali berada dalam posisi sebagai konsultan kurikulum yang sesuai dengan kepakarannya.

b) Ahli kurikulum

Ahli kurikulum merupakan orang-orang yang terlibat dalam membuat konsep, model ataupun persiapan pengelolaan kurikulum yang terdiri dari pakar pendidikan, pakar kurikulum dan administrator pendidikan.

c) Supervisor

Supervisor disini berfungsi sebagai pengawas kegiatan implementasi kurikulum. Dengan cara mendatangi dan membimbing yang disupervisi.

d) Lembaga pendidikan

Pihak yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya implementasi kurikulum pada lembaga pendidikannya sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan.

e) Ketua jurusan atau program studi

Tugas dari ketua jurusan atau program studi menjamin tersedianya dokumen kurikulum, membantu dan memberikan nasihat kepada pendidik, mengatur jadwal dan melakukan evaluasi. Adapun kegiatan yang dilakukannya adalah menciptakan kondisi bagi pengembangan kurikulum dengan

menyusun rencana anggaran tahunan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemimpinan, baik untuk jangka pendek maupun panjang.

f) Pendidik

Pendidik adalah kelompok yang dominan dalam implementasi kurikulum. Pendidik memegang peranan cukup penting atau ujung tombak dalam implementasi kurikulum pendidik merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari atas. Dalam implementasinya keterampilan pendidik dalam mengajar menjadi penentu dari implementasi ini.

g) Peserta didik

Peran peserta didik dalam implementasi kurikulum berkenaan dengan proses kegiatan belajar yang berlangsung di kelas atau dilokasi pembelajaran, baik yang bersifat *indoor* atau *outdoor*. Usaha, minat dan partisipasi peserta didik menentukan dalam keberhasilan implementasi atau pelaksanaan kurikulum.

h) Warga masyarakat

Implementasi atau pelaksanaan kurikulum diperlukan kerja sama yang sangat erat antara pendidik dengan warga masyarakat atau para orang tua peserta didik. Sebagian kegiatan belajar yang menuntut kurikulum dilaksanakan di rumah dan orang tua dapat mengikuti atau mengamati kegiatan belajar di rumah.

5) Tahap-Tahap Implementasi Kurikulum

Tahapan-tahapan implementasi kurikulum meliputi tahapan perencanaan implementasi, pelaksanaan implementasi dan evaluasi implementasi. Tahap perencanaan implementasi meliputi hal-hal sebagai berikut: a) identifikasi masalah yang dihadapi (tujuan yang ingin dicapai); b) pengembangan setiap alternatif metode, evaluasi, personalia, anggaran dan waktu; c) evaluasi setiap alternatif; penentuan alternatif yang paling tepat.⁹⁶

Pada tahap pelaksanaan implementasi bertujuan untuk melihat *blue print* yang telah disusun dalam perencanaan. Melihat *blue print* ini dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah teknik dan sumber daya yang ada dan telah ditentukan pada tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaannya dilakukan oleh suatu tim terpadu untuk melihat ketercapaian tujuan-tujuan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sementara itu pada tahap evaluasi bertujuan untuk melihat: a) proses pelaksanaan yang sedang berjalan sebagai tugas kontrol, apakah pelaksanaan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana, serta sebagai fungsi perbaikan jika selama proses terdapat kekurangan; b) melihat hasil akhir yang dicapai. Hasil akhir ini merujuk pada kriteria waktu dan hasil yang dicapai dibandingkan terhadap fase perencanaan. Evaluasi ini dilaksanakan dengan

⁹⁶ *Ibid.*, h. 101

menggunakan metode, sarana dan prasarana, anggaran personal dan waktu yang ditentukan dalam tahap perencanaan.

d. Evaluasi Kurikulum

Legal formal evaluasi kurikulum terdapat pada ayat 1 dan 2 pasal 57 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.⁹⁷ Dalam undang-undang ini dijelaskan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi ini dilakukan kepada *stakeholder* yang meliputi peserta didik, lembaga pendidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan. Evaluasi dilakukan secara sistemik, sistematis, dan komprehensif yang mengacu pada visi, misi dan tujuan kurikulum. Kegiatan evaluasi kurikulum dan pembelajaran berguna sebagai pengendali mutu (*quality control*) hasil pelaksanaan kurikulum.

Pelaksanaan evaluasi kurikulum dalam rangka untuk mengetahui pencapaian kurikulum perlu dilakukan pengumpulan informasi untuk kemudian dilakukan evaluasi terhadap seluruh aspek kurikulum untuk digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan perbaikan mutu perkuliahan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 39 ayat 2 dinyatakan bahwa perguruan tinggi dalam mengelola perkuliahan wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program

⁹⁷ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta, 2003).

studi dalam melaksanakan perkuliahan.⁹⁸ Pendapat Murray Print menguatkan pernyataan tersebut, bahwa *curriculum evaluation is the process of delineating, obtaining and providing information useful for making decision and judgments about curricula*.⁹⁹ Artinya bahwa evaluasi kurikulum sangat penting dilaksanakan untuk memperoleh dan memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan dan penilaian tentang kurikulum itu. Dengan demikian, dari proses evaluasi tersebut akan diketahui sejauh mana keberhasilan pencapaian kurikulum.

Setiap tahap perkuliahan dilakukan penilaian perkuliahan untuk menilai proses dan hasil perkuliahan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik penilaian, instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.¹⁰⁰ dari pandangan tersebut, dipahami bahwa evaluasi kurikulum perlu dilakukan secara sistematis dan analisis sehingga dapat diperoleh data akurat dalam rangka pengambilan keputusan yang objektif. Untuk lebih memahami terkait evaluasi kurikulum berikut akan diuraikan terkait evaluasi kurikulum:

⁹⁸ Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (Jakarta, 2015).

⁹⁹ Davis, E. *Teachers as Curriculum Evaluators*, (Sydney: George Allen & Unwin, 1980), h. 49.

¹⁰⁰ Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, *Loc.Cit*.

1) Pengertian Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis, yang bertujuan membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum serta memperbaiki metode pendidikan. Evaluasi juga merupakan kegiatan untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan semula. Evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan. Evaluasi adalah proses untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu kurikulum yang di dalamnya terdapat tiga makna, yaitu: a) evaluasi tidak akan terjadi kecuali telah mengetahui tujuan yang akan dicapai; b) untuk mencapai tujuan tersebut harus diperiksa hal-hal yang telah dan sedang dilakukan; c) evaluasi harus mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria tertentu.¹⁰¹ Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Disamping itu evaluasi pada hakikatnya adalah suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek.

¹⁰¹ C.F.Toepfer and S.J.Alessi, *Curriculum Planning and Development*, (Sidney: Allyn and Bacon Inc, 1986)., h. 45

2) Prinsip-Prinsip Evaluasi Kurikulum

Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum meliputi beberapa hal berikut:

- a) Evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu: setiap program evaluasi kurikulum terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarah kegiatan-kegiatan sepanjang proses evaluasi kurikulum itu dilaksanakan.
- b) Evaluasi kurikulum harus bersifat objektif: pelaksanaan dan hasil evaluasi kurikulum harus bersifat objektif, berpijak pada apa adanya dan bersumber dari data yang nyata dan akurat yang diperoleh melalui instrumen yang terandalkan.
- c) Evaluasi kurikulum bersifat komprehensif: pelaksanaan evaluasi mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapatkan perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum pengambilan keputusan.
- d) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif: tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan suatu program evaluasi kurikulum merupakan tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan seperti pendidik ketua jurusan atau program studi, penilik, orang tua, bahkan peserta didik sendiri di samping menjadi tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan.

- e) Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien: pelaksanaan evaluasi kurikulum harus memperhatikan faktor efisiensi, khususnya dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, peralatan yang menjadi unsur penunjang, dan oleh karenanya harus diupayakan agar hasil evaluasi lebih tinggi atau paling tidak berimbang dengan material yang digunakan.
- f) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan: hal ini perlu mengingat tuntutan di dalam dan diluar sistem lembaga pendidikan yang meminta diadakannya perbaikan kurikulum. Untuk itu peran pendidik dan pimpinan sangat penting karena merekalah yang paling mengetahui tentang keterlaksanaan dan keberhasilan kurikulum serta permasalahan yang dihadapi.¹⁰²

3) Tujuan Evaluasi Kurikulum

Tujuan evaluasi adalah menyempurnakan kurikulum dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, kelayakan program. Disamping itu evaluasi kurikulum juga bertujuan untuk

¹⁰² Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan..., *Op.Cit.*, h. 255

perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan penentuan tindak lanjut pengembangan.¹⁰³

4) Prosedur Strategi Evaluasi

Evaluasi kurikulum merangkul beberapa prosedur berikut:

a) Evaluasi kebutuhan dan *Feasibility*

Dilaksanakan oleh organisasi atau administrator tingkat pelaksana. Prosedur yang dilakukan adalah merumuskan tipe dan jenis mata kuliah atau program yang sedang disampaikan dan menetapkan program yang dibutuhkan.

b) Evaluasi masukan (*input*)

Dilaksanakan oleh para supervisor, konsultan dan ahli mata kuliah yang dapat merumuskan pemecahan masalah. Evaluasi masukan bertujuan untuk pengembangan berbagai strategi dan prosedur, yang dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan informasi yang akurat.

c) Evaluasi proses

Evaluasi proses adalah sistem pengelolaan informasi dalam upaya membuat keputusan yang berkenaan dengan ekspansi, kontraksi, modifikasi dan klarifikasi strategi pemecahan atau pemecahan masalah.

¹⁰³ Dinn Wahyudin, *Op.Cit.*, h.149

d) Evaluasi produk

Evaluasi ini berkenaan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil program yang berkaitan dengan ketercapaian tujuan. Variable yang diukur berkenaan perubahan sikap, perbaikan kemampuan dan perbaikan tingkat kehadiran.

5) Pendekatan Model Evaluasi Kurikulum

Pendekatan evaluasi dapat dilakukan dengan dua model, yaitu: saintis dan humanitis ideal.¹⁰⁴ Evaluasi kurikulum yang dilakukan dengan pendekatan saintis mencoba memusatkan perhatian pada peserta didik. Data yang dikumpulkan dalam evaluasi ini berbentuk skor. Data tersebut digunakan untuk membandingkan prestasi peserta didik dalam situasi yang berbeda, dimana setiap situasi dibuat sedemikian rupa. Informasi yang dikumpulkan kebanyakan kuantitatif dan dianalisis secara statistik. Pada pendekatan saintis keputusan tentang program dibuat berdasarkan informasi komparatif yang didapat dari evaluasi.

Sementara itu pendekatan humanitis tidak menerima penemuan eksperimen. Pendekatan humanitis menggunakan studi kasus naturalistik. Pendekatan humanistik mempelajari program yang sudah ada di suatu tempat tidak ditentukan oleh evaluator. Dalam pendekatan ini seseorang ditentukan atau ditempatkan

¹⁰⁴ L. E. Cronbach, *Course Improvement Through Evaluation, dalam Educational Evaluation : Theory and Practice*, (Belmont – California: Wadsworth Pub.Co, 1982)., h. 54

dalam perlakuan hanya sekedar untuk kepentingan penelitian. Program menjadi hal yang dapat dilihat oleh mata pengembang dan klien. Peneliti naturalistik akan menanyakan pertanyaan yang berbeda dari program yang berbeda. Manfaat dan kegunaan dijelaskan, tidak diturunkan dalam bentuk kuantitas. Observasi menjadi hal yang sesuai dan responsive terhadap suasana lokal, yang tidak terstruktur sebelumnya.

6) Peran Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan kegiatan atau langkah akhir dalam suatu proses. Peserta didik dievaluasi pada akhir suatu kegiatan pembelajaran. Kurikulum dievaluasi untuk menentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. Pada prakteknya evaluasi mempunyai hakikat yang luas. Peserta didik di uji untuk mengidentifikasi bidang masalah. Sementara kurikulum dapat menjadi bidang pengujian selama pengembangan untuk memastikan ketepatan tingkatan tertentu berkenaan dengan serangkaian keterampilan dan isi yang dirancang untuk pembelajaran.

B. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan suatu proses dan kegiatan yang membentuk individu menjadi individu yang betul-betul bertaqwa kepada Allah SWT dan bermoral tinggi sehingga individu itu dapat berkembang dengan baik kearah kedewasaan yang diharapkan hidupnya berguna di tengah-tengah masyarakat. Dalam praktek pelaksanaan antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam berjalan secara serentak sehingga tidak dapat dipisahkan, akan tetapi antara keduanya bisa dibedakan dari segi tujuan yang akan dicapai.

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “Pais” artinya seseorang, dan “*again*” diterjemahkan membimbing.¹⁰⁵ Jadi pendidikan (*paedagogie*) artinya bimbingan yang diberikan pada seseorang. Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.¹⁰⁶

Konsep pendidikan dalam Islam sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan untuk menandainya, yaitu: *tarbiyah*, *ta`lim*, dan

¹⁰⁵ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)., h. 69

¹⁰⁶ Zuhairini, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Malang: UIN Press, 2006)., h. 1

ta`dib. Namun istilah yang sekarang berkembang di dunia Arab adalah *tarbiyah*.¹⁰⁷ Istilah *tarbiyah* berakar pada tiga kata, yang pertama *raba* رَبَّى *yarbu* يَرْبُو yang berarti bertambah dan tumbuh, yang kedua *rabiya yarba* رَبِي - يَرْبِي yang berarti tumbuh dan berkembang, yang ketiga *rabba yarubbu* رَبَّ - يَرْبُّ yang berarti memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Kata *al rabb* juga berasal dari kata *tarbiyah* dan berarti mengantarkan pada sesuatu kesempurnaannya secara bertahap atau membuat sesuatu menjadi sempurna secara berangsur-angsur.¹⁰⁸

Pengertian pendidikan secara harfiah berdasarkan makna di atas berarti membimbing, memperbaiki, menguasai, memimpin, menjaga, dan memelihara. Esensi dari pendidikan adalah adanya proses transfer nilai, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan agama Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu: a) Mendidik peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam b) Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran agama Islam.¹⁰⁹

Sementara itu pengertian pendidikan agama Islam jika ditinjau secara *definitive* telah diartikan atau dikemukakan oleh para ahli dalam rumusan yang beraneka ragam, diantaranya adalah:

¹⁰⁷ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 2009)., h. 3

¹⁰⁸ *Ibid.*, h. 4

¹⁰⁹ Dkk Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004)., h. 75-76

- a. Tayar Yusuf mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar menjadi manusia bertakwa kepada Allah.¹¹⁰
- b. Zuhairini, pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya kebahagiaan dunia akhirat.¹¹¹
- c. Muhaimin yang mengutip GBPP PAI, bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam menyakini, memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran dan latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.

Rumusan-rumusan di atas dapat dipahami bahwa pengertian pendidikan agama Islam adalah pembentukan perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan petunjuk ajaran agama Islam. Sebagaimana yang pernah dilakukan Nabi dalam usaha menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim. Untuk itu perlu

¹¹⁰ Abdul Majid dan Dian Andayan, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130

¹¹¹ Zuhairini, *Op.Cit.*, h. 11

adanya usaha, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan hidup yang menunjang keberhasilannya.¹¹²

Definisi-definisi di atas dapat kita pahami bahwa unsur-unsur karakteristik pendidikan agama Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama Islam merupakan bimbingan, latihan, pengajaran, secara sadar yang diberikan oleh pendidik terhadap peserta didik.
- b. Proses pemberian bimbingan dilaksanakan seseorang secara sistematis, kontinui dan berjalan setahap demi setahap sesuai dengan perkembangan kematangan peserta didik.
- c. Tujuan pemberian agar kelak seseorang berpola hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam.
- d. Dalam pelaksanaan pemberian bimbingan tidak terlepas dari pengawasan sebagai proses evaluasi

Dari unsur tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang (guru/dosen) melalui bimbingan, arahan, latihan dengan materi yang disusun secara sistematis agar peserta didik dapat mengikuti petunjuk yang telah digariskan agama Islam hingga meraih derajat takwa disisi Allah. Dengan kata lain pendidikan agama Islam adalah membentuk dan membina manusia berkepribadian muslim yang sempurna, sehingga dapat mencapai kedewasaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Dasar pokok dalam pembentukan dan pembinaan kepribadian itu menanamkan rasa keimanan

¹¹² Zakiyah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. X (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)., h. 28

kepada Allah SWT, dengan keimanan yang kuat itu akan terpancarlah keseluruhan tingkah laku dalam menjalankan kehidupan. Hal ini yang menjadi tujuan yang hakiki dari pendidikan agama Islam, sehingga dapat mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS Ali-Imran: 104).¹¹³

Dalam surat yang lain juga disebutkan

وَقَالَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْعِلْمَ وَيَلْتَمُونَ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرَ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

Terjemahannya: “Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: kecelakaan yang besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang sabar”. (QS. Al-Qashash: 80).¹¹⁴

Berdasarkan ayat Qs. Al Qashash ayat 80 di atas jelaslah bahwa pendidikan agama Islam bukan semata mempersiapkan peserta didik untuk akhirat saja, akan tetapi juga mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan di dunia, yang mana kehidupan dunia merupakan jembatan bagi kehidupan akhirat.

¹¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 63

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 395

2. Dasar Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam sebagai aktifitas yang bergerak dalam pembinaan kepribadian seorang muslim harus memiliki dasar yang dijadikan landasan kerjanya. Dengan dasar ini akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pendidikan yang telah diprogramkan. Secara garis besar landasan dasar pendidikan agama Islam itu terdiri dari 2 yaitu: dasar religius dan dasar yuridis. Berikut penjelasan dari dasar pendidikan agama Islam tersebut:

a. Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari agama. Dalam Islam dikenal beberapa dasar yang dijadikan sebagai pandangan hidup manusia, yaitu: al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Ketiga sumber itu diambil sebagai dasar dan falsafah pendidikan agama Islam yang imperatif (menyeluruh), motivatif (mendorong) dan persuatif (meyakinkan), baik dalam bentuk sistem maupun proses pendidikan yang manusiawi. Penjelasan dari tiga dasar tersebut sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang, guna menjelaskan jalan yang bermaslahat bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.¹¹⁵ Pengertian tersebut memberikan petunjuk bahwa al-Qur'an itu sebagai petunjuk jalan bagi manusia yang akan

¹¹⁵ Hery Noer Aly, *Op.Cit.*, h. 51

mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra': 9

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنْ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Terjemahannya: “Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mu’min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar”. (Qs. Al-Isra': 9)¹¹⁶

Dalam surat Ibrahim ayat 1:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ
الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

Terjemahannya: “*Alif laam raa.* (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji”. (Qs. Ibrahim:1)¹¹⁷

Surat al Isra' ayat 9 dan surat Ibrahim ayat 1 di atas dapat dipahami bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Tujuan ini akan tercapai dengan memperbaiki hati dan akhlak manusia dengan akidah-akidah yang benar dan akhlak yang mulia serta mengarahkan kepada pekerjaan yang baik.

Al-Qur'an dikatakan sebagai dasar atau sumber pendidikan agama Islam dapat dilihat dari berbagai aspek yang dapat memenuhi aspek-aspek kehidupan manusia. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut dengan akidah dan yang

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 283

¹¹⁷ *Ibid.*, h. 255

berhubungan dengan amal yang disebut dengan syari'ah. Sebagai dasar atau landasan pendidikan agama Islam yang pertama, al-Qur'an banyak membahas ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan, contoh dalam kisah lukman mengajari anaknya yang terdapat dalam surat Lukman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Ayat ini mengaris bawahi prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak, ibadah, sosial dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian maka Al-Qur'an mendudukkan urutan paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan agama Islam. Setiap kegiatan proses pendidikan agama Islam harus senantiasa berorientasi pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an.¹¹⁸

2) Sunnah / Hadits

Dasar pendidikan agama Islam yang kedua setelah al-Qur'an adalah hadits. Pengertian hadits menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah para ahli hadits, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir maupun sifat beliau.¹¹⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hadits adalah segala cerminan dari perkataan, perbuatan, ketetapan dan budi pekerti nabi SAW yang harus diikuti oleh setiap muslim. Oleh sebab itu diwajibkan kepada setiap muslim

¹¹⁸ Azyumardi Azra, *Esai-Esai Intelektual Muslim pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 9

¹¹⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 3

untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada hadits-hadits nabi setelah al-Qur'an. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

Terjemahannya: “Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya”. (Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta'zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, h. 12-13).

Pada hadits di atas disebut dengan istilah sunnah. Secara umum hadits dan sunnah memiliki kesamaan pengertian. Sunnah menurut bahasa berarti *ath thariqah* yang berarti jalan, metode, program dan dalam hubungan dengan Rasulullah SAW berarti segala perkataan, perbuatan atau ketetapanannya.¹²⁰ Sunnah menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan atau taqirir (persetujuan). Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an dan berfungsi sebagai penjelas dari al-Qur'an itu sendiri sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ

يُؤْمِنُونَ

Terjemahannya: “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. (Qs. An-Nahl: 64).¹²¹

Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan

¹²⁰ Azyumardi Azra, *Op.Cit.*, h. 9

¹²¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 273

agama Islam, karena Allah SWT menjadikan nabi Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Oleh karena itu sunnah mencerminkan prinsip-prinsip, manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan dan taqdir nabi Muhammad SAW. dengan demikian maka beliau menjadi teladan yang harus diikuti. Dalam hal keteladanan terkandung unsur-unsur pendidikan yang sangat besar artinya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahannya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu (yaitu) orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah”. (Qs. Al-Ahzab: 21)¹²²

Oleh sebab itu maka kepribadian Rasulullah SAW atau sunnah-sunnah beliau yang ditemukan dalam hadits-hadits hendaklah dijadikan pedoman dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, sunnah memiliki dua manfaat pokok, yaitu:

- a) Menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan sesuai dengan konsep al-Qur'an serta lebih merinci penjelasan al-Qur'an
- b) Menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan mislanya dapat menjadikan kehidupan Rasulullah SAW dan

¹²² *Ibid.*, h. 420

para sahabat sebagai sarana penanaman keimanan dalam pelaksanaan pendidikan agama Islam kepada peserta didik.¹²³

3) Ijtihad

Ijtihad berarti pencurahan segala kemampuan untuk mencapai sesuatu, yaitu menggunakan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan sunnah.¹²⁴ Ijtihad merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh seseorang atau beberapa orang ulama yang memiliki syarat-syarat tertentu, pada suatu syarat tempat dan waktu tertentu untuk merumuskan kepastian atau penilaian hukum mengenai sesuatu atau perkara yang tidak terdapat kepastian hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Adanya ijtihad dalam Islam menjadi bukti bagi manusia bahwa Islam selalu memberikan pintu terbuka buat para intelektual. Ijtihad berlaku bila tidak dijumpai dalil yang tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah, hal ini sesuai dengan firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu

¹²³ Abdurrahman Al-Nahlawy, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2013)., h. 39

¹²⁴ Rosniati Hakim, *Metodologi studi islam I*, Cet. Perta (Padang: Hayfa Press, 2009)., h.

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs. An-Nisa: 59).¹²⁵

Ijtihad diperlukan dalam dalam pendidikan mencari solusi dari permasalahan pendidikan agama Islam, baik mengenai tujuan, metode, media, evaluasi, sarana dan prasarana serta materi pendidikan agama Islam.

b. Dasar Yuridis

Dasar yuridis merupakan dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari perundang-undangan, yang berlaku di negara Indonesia yang secara langsung atau tidak dapat dijadikan pegangan untuk melaksanakan pendidikan agama, antara lain:

1) Dasar Idiil

Adalah falsafah negara republik Indonesia yakni pancasila. Pancasila sebagai idiologi negara berarti setiap warga negara Indonesia harus berjiwa pancasila dimana sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, menjiwai dan menjadi sumber pelaksanaan sila-sila yang lain. Sedangkan pengertian pendidikan dalam undang-undang republik Indonesia no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 87

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.¹²⁶

2) Dasar Struktural

Yakni yang termaktub dalam UUD 1945 Bab XI Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- a) Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Undang-undang dasar 1945 di atas, mengandung makna bahwa Negara Indonesia memberi kebebasan kepada sesama warga negaranya untuk beragama dengan mengamalkan semua ajaran agama yang dianut.

3) Dasar Operasional

Dasar operasional ini adalah merupakan dasar yang secara langsung melandasi pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah di Indonesia. Sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan bagaimana kejelasan konsep dasar operasional ini, akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan kurikulum pendidikan dan dinamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan biasanya berubah setiap kali ganti

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

menteri pendidikan nasional dan presiden serta akan selalu mengkondisikan terhadap perkembangan IPTEK internasional.

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Jika kita melihat kembali pengertian pendidikan agama Islam, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi “insan kamil” dengan pola taqwa insan kamil artinya manusia utuh rohani dan dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT. Dalam hal ini ada beberapa tujuan pendidikan agama Islam yaitu:

a. Tujuan Operasional

Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan tertentu. Satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional.

Tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari seorang peserta didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Untuk tingkat yang paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. Misalnya, ia dapat berbuat, terampil melakukan, lancar mengucapkan, mengerti, memahami, menyakini dan menghayati adalah soal kecil. Dalam

pendidikan hal ini terutama berkaitan dengan kegiatan *lahiriyah*, seperti bacaan dari *kafiyat* shalat, akhlak, dan tingkah laku.¹²⁷

b. Tujuan Umum (Institusional)

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Bentuk *insan kamil* dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut.

Tujuan umum pendidikan harus dikaitkan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu digunakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional. Sementara itu menurut para ahli pendidikan Islam, tujuan pendidikan agama Islam adalah:

- 1) Membentuk akhlak mulia
- 2) Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat
- 3) Persiapan untuk mencapai rezki dan pemeliharaan segi manfaat
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah
- 5) Menyiapkan pelajar dari segi profesi.¹²⁸

c. Tujuan Sementara

Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah seorang peserta didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang

¹²⁷ Zakiyah Darajat, *Op.Cit.*, h. 30

¹²⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 137

direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola waktu sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sementara, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi seseorang didik.

d. Tujuan Akhir

Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Karena itulah pendidikan agama Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tujuan akhir pendidikan agama Islam akan dapat lebih dipahami dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Al-Imran: 102).¹²⁹

Ayat di atas menjelaskan tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mempersiapkan bekal dalam kehidupan yang kekal nantinya di alam akhirat. Pada ayat yang lain juga dinyatakan tujuan pendidikan agama Islam adalah agar hambaNya mempunyai pengetahuan dan

¹²⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 63

tuntunan sebagai hamba dalam beribadah kepadaNya, sesuai dengan firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahannya: “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzariyat: 56)¹³⁰

Tujuan lain dari pendidikan agama Islam adalah untuk mengantarkan atau menjadikan manusia menjadi khalifah Allah, sebagaimana firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang *khalifah* di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (*khalifah*) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Qs. Al-Baqarah: 30)¹³¹

4. Materi Pendidikan Agama Islam

Materi pendidikan agama Islam merupakan integral dari program pengajaran setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama Islam diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Adapun materi pokok pendidikan agama Islam dapat diklasifikasikan menjadi lima aspek kajian, yaitu:

¹³⁰ *Ibid.*, h. 523

¹³¹ *Ibid.*, h. 6

a. Aspek Al- Qur'an dan Hadist

Aspek al- Qur'an dan Hadist ini menjelaskan beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan sekaligus juga menjelaskan beberapa hukum bacaannya yang terkait dengan ilmu tajwid dan juga menjelaskan beberapa hadist Nabi Muhammad Saw.

b. Aspek Keimanan dan Aqidah Islam

Aspek keimanan dan aqidah Islam ini menjelaskan berbagai konsep keimanan yang meliputi enam rukun iman dalam Islam. Aqidah merupakan masalah fundamental bagi seorang muslim dan sekaligus merupakan tempat tegaknya aktifitas Islam dalam hidup dan kehidupan seseorang. Aqidah akan menunjukkan kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang. Dalam al-Qur'an diantara ayat yang berbicara tentang keimanan adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ءَامِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَلْكُتٰبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِۦ وَاَلْكُتٰبِ
الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖٓ وَرُسُلِهٖٓ وَرُسُلِهٖٓ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلٰلًا بَعِيْدًا

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” (Qs. An-Nisa’:136).¹³²

¹³² *Ibid.*, h. 100

Dalam surat an-nisa' ayat 136 di atas dijelaskan tentang point-point keimanan yang menjadi dasar dari rukun iman yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh setiap muslim.

c. Aspek Akhlak

Aspek akhlak ini menjelaskan berbagai sifat-sifat terpuji (akhlak karimah) yang harus diikuti dan sifat-sifat tercela yang harus dijahui. Dalam aspek akhlak seorang muslim diperintahkan untuk mencontoh akhlak-akhlak terpuji dari orang shaleh dan bahkan sampai harus meniru akhlak rasulullah, sebagaimana firman Allah:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahannya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (QS: Al-Ahzab Ayat: 21)¹³³

d. Aspek Hukum Islam atau Syari'ah Islam

Aspek hukum islam atau syari'ah islam ini menjelaskan berbagai konsep keagamaan yang terkait dengan masalah ibadah dan mu'amalah.

e. Aspek Tarikh Islam

Aspek Tarikh Islam ini menjelaskan sejarah perkembangan atau peradaban Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk diterapkan di masa sekarang.

¹³³ *Ibid.*, h. 420

Sementara itu materi pendidikan agama Islam pada program studi pendidikan agama Islam yang wajib untuk dipahami oleh peserta didik adalah menguasai substansi kajian keilmuan pendidikan agama Islam (Qur'an-Hadis, Akidah-Akhlak, Sejarah dan Kebudayaan Islam) secara luas, mendalam dan muktahir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.¹³⁴

C. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia

1. Regulasi Pengembangan Kurikulum pada Perguruan Tinggi

Pengembangan kurikulum di perguruan tinggi merupakan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pada Pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar nasional perguruan tinggi tertuang dalam lampiran Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Tentang standar nasional perguruan tinggi. Sementara itu tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang

¹³⁴ Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi*”, 2018., h. 181.

penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

2. Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI

Ralp W. Tyler dalam bukunya *Basic Principle of Curriculum and Instruction*, mengatakan, bahwa tatkala kita ingin mengembangkan kurikulum/pembelajaran, maka hendaklah bertolak dari 4 (empat) pertanyaan pokok/mendasar berikut ini:

- a) *What educational purposes should the school seek to attain?*
- b) *What educational experiences can be provided are likely to attain these purposes?*
- c) *How can these educational experiences be effectively organized?*
- d) *How can we determine whether these purposes are being attained?*¹³⁵

Pengembangan kurikulum atau pembelajaran, kita mesti berangkat dari 4 (empat) pertanyaan pokok tersebut, yaitu: a) Apa yang menjadi tujuan pendidikan/pengajaran atau kompetensi apa yang mesti dikuasai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran? b) Pengalaman belajar apa yang mesti diberikan kepada peserta didik? c) Apa materi/bahan kajian yang akan diajarkan? d) Bagaimana menilai keberhasilan pembelajaran?

Manajemen pengembangan kurikulum ada beberapa langkah dan proses yang harus dilalui. Mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), maka langkah/fase pertama yang harus dilakukan oleh tim/panitia pengembang kurikulum, yaitu:

¹³⁵ Syafruddin Nurdin, "Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi", *al-Fikrah*, Vol. V No. 1 (2017), h. 21–30, <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305>, h. 24

Pertama, Merumuskan “Profil Lulusan”, yaitu menggambarkan secara jelas dan spesifik postur/sosok lulusan yang akan dihasilkan oleh suatu Program Studi. Rumusan Profil Lulusan Prodi mesti dapat menjawab pertanyaan berikut ini: “Program Studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa? Dan peran apa yang dapat dilakukannya di masyarakat setelah lulus? Sebelum merumuskan dan menyusun profil lulusan, tim/panitia pengembang kurikulum terlebih dahulu melakukan Analisis SWOT untuk menginventarisir dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Kemudian juga melakukan *tracer study* dalam rangka untuk mendapatkan masukan berupa ekspektasi, saran dan lain-lainnya dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Kedua, Menetapkan dan menentukan “capaian pembelajaran atau kompetensi”. Capaian pembelajaran adalah “kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja”. Capaian pembelajaran sebagai penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan pembelajaran baik terstruktur maupun tidak. Rumusan capaian pembelajaran disusun dalam 4 (empat) unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang dan tanggungjawab.

- a) Sikap dan tata nilai; merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan Negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar, baik terstruktur maupun tidak.

- b) Kemampuan kerja; merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap peserta didik menjadi kompetensi atau kemampuan aplikatif dan bermanfaat.
- c) Penguasaan pengetahuan; merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- d) Wewenang dan tanggung jawab; merupakan konsekuensi seorang peserta didik yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.¹³⁶

Menentukan dan menetapkan capaian pembelajaran/kompetensi, tim/panitia pengembang kurikulum seyogianya mengacu kepada a) *Scientific Vision*; yaitu visi ilmu pengetahuan yakni membaca *trend* perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; b). *Market Signal*; yaitu memperhatikan/memperhitungkan selera pasar atau apa yang dibutuhkan oleh pasar/ masyarakat berkenaan dg kompetensi lulusan lembaga kita; c) *University Value*; yaitu distingsi atau kekhasan dan kespesifikan lembaga. Atau dengan kata lain apa yang menjadi “jargon” nya lembaga pendidikan kita.¹³⁷

Ketiga, Memilih dan menetapkan “bahan kajian” yang akan dipelajari. Bahan kajian tersebut dapat dikelompokkan, umpamanya kepada kelompok: inti keilmuan Program Studi (Prodi), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pendukung, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pelengkap, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dikembangkan, Iptek masa depan, dan Iptek sebagai penciri perguruan tinggi. Pekerjaan menetapkan dan memilih

¹³⁶ *Ibid.*, h. 25

¹³⁷ *Ibid.*

bahan kajian tidak dapat dilepaskan dari pekerjaan menyusun peta keilmuan bidang studi. Karena, bahan kajian diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program studi atau dari khazanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang ilmu pengetahuan tertentu yang diperlukan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/profesi yang akan diterjuni oleh lulusan. Untuk menguasai satu capaian pembelajaran adakalanya dapat ditempuh melalui dua bahan kajian dari dua mata kuliah yang berbeda. Ada pula tiga bahan kajian untuk mencapai satu capaian pembelajaran yang sama. Kemudian, satu bahan kajian dapat mencapai beberapa capaian pembelajaran.

Keempat, Menetapkan mata kuliah yang akan diajarkan dalam satu program studi. Mata kuliah adalah bungkusnya dari bahan kajian. Menetapkan mata kuliah juga harus berangkat dari pengembangan struktur keilmuan/peta keilmuan (*body of knowledge*). Setelah mata kuliah ditetapkan, disusun dalam satu Struktur Program Kurikulum, yang memuat kelompok mata kuliah, nama mata kuliah, sebaran mata kuliah, bobot masing-masing mata kuliah, dan lain-lain. Itulah rangkaian atau proses/langkah utama dalam pengembangan kurikulum program studi (Prodi).

3. Pengembangan Silabus Berbasis KKNI

Silabus merupakan pengembangan dan jabaran dari kurikulum, yang berisikan synopsis mata kuliah dan kerangka materi/ bahan kajian (topik inti/pokok bahasan) yang harus diajarkan dan dikuasai oleh mahasiswa. Dalam silabus terdapat *scope & sequence* kurikulum. *Scope* adalah ruang lingkup, cakupan, keluasan dan kedalaman bahan/materi perkuliahan. Sedangkan *sequence* adalah urutan-urutan bahan/materi perkuliahan yang akan diajarkan.¹³⁸ Selain dari itu, selabus biasanya dilengkapi dengan referensi atau buku-buku sumber, baik yang wajib maupun anjuran. Silabus terdiri atas komponen-komponen, sebagai berikut:

a. Identitas

Identitas berisikan nama mata kuliah, kode mata kuliah, komponen, fakultas, jurusan, pogram studi, nama dosen pengampu mata kuliah, dan bobot mata kuliah.

b. Sinopsis Mata Kuliah

Sinopsis mata kuliah merupakan paragraf pernyataan singkat yang berisikan garis-garis besar bahan kajian atau materi perkuliahan atau rangkuman pokok bahasan/sub pokok bahasan dari satu mata kuliah.

c. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah rumusan capaian akhir pembelajaran dalam satu mata kuliah tertentu yang

¹³⁸ *Ibid.*, h. 26

mencakup 4 (empat) unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, wewenang dan tanggungjawab.

d. Indikator Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)

Indikator capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah merupakan jabaran karakteristik suatu capaian pembelajaran yang secara spesifik dapat dijadikan ukuran untuk menentukan dan menilai ketercapaian hasil belajar (*learning outcomes*).

e. Topik/Sub Topik

Topik dan sub topik merupakan judul/ sub judul yang mencerminkan bahan kajian yang konsisten dengan setiap capaian pembelajaran (*learning out comes*). Dengan kata lain dapat pula diartikan bahwa topik/sub topik adalah bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa sebagai sarana pencapaian *learning outcomes*.

f. Referensi

Referensi adalah sumber kepustakaan berupa buku-buku atau sumber bahan kajian yang digunakan dalam setiap topik/sub topik.

4. Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Berbasis KKNI

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan proyeksi kegiatan (aktivitas) yang akan dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran/ perkuliahan di kelas. Oleh karenanya, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan bagian integral yang tidak dapat dilepaskan dari "pembelajaran/perkuliahan". Ini berarti, bahwa setiap

dosen yang akan melaksanakan pembelajaran (perkuliahan) terlebih dahulu harus membuat RPS. Pembelajaran (perkuliahan) merupakan interaksi edukatif yang dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa dan dosen-mahasiswa dengan sumber belajar lainnya di dalam suatu situasi/suasana pendidikan tertentu.¹³⁹ Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf B Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015, disusun dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran (RPS) atau istilah lain yang digunakan oleh perguruan tinggi selama ini. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), terdiri atas beberapa komponen, yang isi pokoknya sebagai berikut:

a. Identitas RPS

Identitas Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sekurang-kurangnya berisikan: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, sks, nama dosen.

b. Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*)

Capaian pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan

¹³⁹ *Ibid.*, h. 27

akumulasi pengalaman kerja. Atau disebut juga dengan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah.

c. Indikator

Indikator adalah penanda pemenuhan capaian pembelajaran khusus yang ditandai oleh perubahan perilaku mahasiswa yang dapat diukur. Rumusan indikator mencakup dua aspek, yakni perilaku kompeten dan isi pembelajaran. Kata kerja indikator bersifat operasional, dapat diukur. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hirarki kemampuan. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penilaian.

d. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (perkuliahan). Atau suatu cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi perkuliahan, seperti antara lain ceramah, tanya-jawab, diskusi.

e. Waktu

Waktu adalah kesempatan yang disediakan dosen buat mahasiswa belajar untuk mencapai kemampuan pada tiap-tiap tahap pembelajaran. Tiap-tiap tahap pembelajaran terdiri atas satu atau lebih jam pelajaran.

f. Pengalaman belajar.

Pengalaman belajar merupakan deskripsi aktivitas atau tugas yang harus dilakukan mahasiswa melalui bimbingan dosen selama satu semester (16 sesi, termasuk UTS dan UAS). Setiap aktivitas atau tugas

diberikan melalui atmosfer akademik kondusif yang diciptakan dosen untuk membantu mahasiswa dalam mencapai luaran pembelajaran. Pengalaman belajar dapat berbentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Dalam kolom pengalaman belajar dituliskan aktivitas dan tugas spesifik yang diberikan kepada mahasiswa dengan mengacu pada konsep SKS.

g. Kriteria dan bobot penilaian

Kriteria keberhasilan capaian pembelajaran untuk tiap-tiap sikap, pengetahuan, dan keterampilan misalnya: Bobot komponen penilaian 15% Aktif + 20% Tugas + 25% UTS + 40% UAS dengan Pernyataan kualifikasi pencapaian pembelajaran mata kuliah (A-E).

h. Daftar referensi

Referensi adalah sumber kepustakaan berupa buku-buku atau sumber bahan kajian yang digunakan dalam setiap topik/sub, topik.

Setelah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tersusun dengan baik, barulah dosen dapat melaksanakan pembelajarn/ perkuliahan di kelas secara efektif dan efisien.

D. Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian atau kajian terdahulu digunakan untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan sisi lain yang belum terungkap. Dengan demikian akan mudah untuk menentukan fokus yang akan dikaji yang belum digarap oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil studi

penelitian yang peneliti anggap mempunyai relevansi dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Masykur dkk dengan judul Implementasi Kurikulum KKNI Pada Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi kurikulum KKNI pada Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Peneliti ingin menemukan terkait dengan pemahaman, tanggapan dosen dan mahasiswa terhadap Implementasi Kurikulum KKNI pada Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dalam proses pembelajaran terutama mata kuliah strategi pembelajaran. Hasil penelitian terkait implementasi kurikulum KKNI di prodi matematika, dilakukan melalui 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil yang dapat dirumuskan dari ke 3 tahapan kegiatan tersebut dapat melahirkan dokumen KKNI. Pada tataran implementasi KKNI di prodi matematika belum berjalan secara baik, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum mamahami, sarana prasarana yang kurang dan aspek kebijakan pimpinan yang belum mengeluarkan keputusan tentang berlakunya KKNI. Usaha yang dilakukan oleh pihak prodi melalui kegiatan workshop dan seminar,

sosialisasi sampai pada tingkat implementasi dalam proses pembelajaran.¹⁴⁰

2. Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan di PTKIN merupakan penelitian oleh Any Umy Mashlahah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kurikulum mengacu KKNI dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan PTKIN. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan kurikulum mengacu KKNI melalui beberapa tahapan: menyusun capaian pembelajaran, merumuskan profil lulusan program studi, perumusan standar kompetensi lulusan *learning outcomes*, perumusan capaian pembelajaran program studi (*program learning outcomes/PLO*), perumusan capaian pembelajaran mata kuliah (*course learning outcomes/CLO*), mengenali konsep kunci dan kata kunci pada capaian pembelajaran mata kuliah, pengembangan RPKPS; (2) peningkatan kualitas PTKIN dipengaruhi penerapan kurikulum mengacu KKNI melalui tiga faktor utama, yaitu: (a) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan; (b) biaya dan sarana belajar; (b) kualitas proses belajar-mengajar yang mendorong mahasiswa belajar efektif; (3) kualitas keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan

¹⁴⁰ Ruhban Masykur et al., "Implementasi Kurikulum KKNI Pada Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung", *NUMERICAL: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 2 No. 1 (2018), hal. 15, <https://doi.org/10.25217/numerical.v2i1.205>.

keterampilan.¹⁴¹ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian di atas sama-sama membahas terkait kurikulum berbasis KKNI di perguruan tinggi. Perbedaannya terdapat pada sub kajiannya. Penelitian di atas hanya membahas terkait implementasi kurikulum berbasis KKNI di Perguruan Tinggi, sementara penelitian penulis cakupannya terkait manajemen kurikulum berbasis KKNI yang akan membahas terkait manajemen kurikulum mulai dari proses perencanaan, penataan, Implementasi serta evaluasi kurikulum di perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis KKNI.

3. Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI di Fakultas Ekonomi Unimed yang dilakukan oleh Eko Wahyu Nugrahadi. Penelitian ini menghasilkan dari hasil analisis diperoleh gambaran sebagai berikut: (1) secara keseluruhan terdapat dosen pengampu mata kuliah yang tidak memberikan secara lengkap 6 (enam) jenis tugas (4.41%) dan tugas RI merupakan jenis tugas yang banyak jumlah tidak diberikan dosen, (2) Ditinjau dari masing-masing prodi, terlihat bahwa hanya program studi Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang dosennya secara lengkap telah memberikan 6 (enam) jenis tugas, (3) Secara keseluruhan dosen dalam menjelaskan cara mengerjakan tugas dikategorikan pada level dipahami mahasiswa (90,8%), demikian juga keadaannya apabila dilihat berdasarkan masing-masing prodi, (4) Secara keseluruhan sumber referensi yang diberikan dosen pada saat perkuliahan berlangsung

¹⁴¹ Any Umy Maslahah, "Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan di PTKIN", *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 13 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.5717>., h. 228.

dikategorikan relevan (92,8%), demikian juga keadaannya apabila dilihat berdasarkan masing-masing prodi, (5) Secara keseluruhan dosen menjelaskan rubrik penilaian pada saat perkuliahan berlangsung dikategorikan pada tingkat dipahami (83,8%), demikian juga keadaannya apabila dilihat berdasarkan masing-masing prodi, (6) Secara keseluruhan masih terdapat dosen yang belum secara jelas menetapkan waktu pengumpulan tugas, sedangkan ditinjau dari masing-masing prodi hanya dosen-dosen prodi Manajemen yang telah memberikan kejelasan waktu pengumpulan tugas.¹⁴² Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terdapat pada aspek kurikulum berbasis KKNI. Perbedaannya terdapat pada aspek kajiannya, penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkaji terkait manajemen kurikulum mulai dari proses perencanaan, penataan, Implementasi serta evaluasi kurikulum di perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis KKNI.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Beslina Afriani Siagian dengan judul Analisis Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Universitas Negeri Medan. Tujuan penelitian ini untuk mengadakan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum berbasis KKNI pada Universitas Negeri Medan. Model evaluasi kurikulum yang digunakan adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tampak bahwa penerapan kurikulum berbasis KKNI di Universitas Negeri

¹⁴² Eko Wahyu Nugraha et al., "Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI di Fakultas Ekonomi Unimed", *Niaga*, Vol. 7 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i1.9349>, h. 8

Medan sudah dikatakan baik, meskipun masih perlu perbaikan pada beberapa aspek seperti kesiapan dosen, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan mitra magang, dan tentunya kesiapan mahasiswa. Universitas harus terus membenahi diri agar para lulusan mampu bersaing dengan lulusan lain, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.¹⁴³

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis terkait hal evaluasi kurikulum. Perbedaannya terdapat pada keluasan kajian penelitiannya. Penelitian di atas hanya membahas pada aspek evaluasi pelaksanaan dari kurikulum sementara penelitian yang akan penulis lakukan akan membahas pada empat komponen atau fungsi dari manajemen kurikulum yaitu proses perencanaan, penataan, Implementasi serta evaluasi kurikulum di perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis KKNi.

5. Penelitian oleh Muafid Ardiansyah dengan judul Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi Pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang), Hasil penelitian menunjukkan, bahwa civitas akademika memaknai KKNi secara beragam, dimana KKNi dimaknai sebagai penyetaraan kualifikasi kompetensi, sebagai panduan atau patokan dalam penyusunan kurikulum, sebagai jembatan proses sepanjang hayat, serta sebagai kriteria minimal yang harus dikuasai. Secara administratif, internalisasi KKNi pada dokumen kurikulum dan

¹⁴³ Beslina Afriani Siagian dan Golda Novatrasio Sauduran Siregar, "Analisis Penerapan Kurikulum Berbasis KKNi di Universitas Negeri Medan", *PEDAGOGIA*, 2018, <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i3.12378>, h. 327

RPS. Sedangkan, proses internalisasi terjadi dalam perkuliahan dan luar perkuliahan. Dalam perkuliahan dapat dilihat dari model yang digunakan, serta integrasi nilai yang termuat dalam KKNI saat perkuliahan. Diluar perkuliahan, dilakukan melalui lembaga kemahasiswaan, berbagai fasilitas jurusan, serta interaksi yang terjadi. Kemudian dari sisi program dan kebijakan dengan mengadakan pelatihan atau workshop kepada mahasiswa serta adanya kerjasama yang dilakukan, khususnya untuk PPL. Hambatan maupun kendala yang dialami berasal dari dalam maupun luar. Dari dalam seperti sarana dan prasarana, serta sumber daya manusianya. Dari luar lebih bersifat teknis, seperti jadwal yang terbentur libur, maupun kesibukan dari dosen selain mengajar.¹⁴⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama membahas terkait kurikulum. Perbedaannya penelitian di atas lebih mengarah kepada aspek teknologi pendidikan sementara penelitian yang penulis lakukan akan membahas aspek manajemen pendidikan dalam aplikasi kurikulum di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berbasis KKNI.

6. Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Se-Kota Bengkulu oleh Ali Akbar Jono, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan kesiapan beberapa perguruan tinggi di kota Bengkulu yang berposisi sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) program studi

¹⁴⁴ Muafid Ardiansyah, "Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi Pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)", 2017., h. 150

pendidikan bahasa Inggris terhadap wacana pemberlakuan kurikulum berbasis KKNi yang efektif akan diberlakukan pada tahun akademik 2016/2017. Disamping itu penelitian ini bertujuan menjadi sarana penemuan solusi terhadap kendala yang menjadi rintangan dari pemberlakuan kurikulum berbasis KKNi. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kelima LPTK yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Inggris pada prinsipnya siap melakukan pemberlakuan kurikulum berbasis KKNi pada tahun akademik 2016/2017, akan tetapi efektifitas penerapan kebijakan ini seyogya dibarengi dengan kesiapan semua perangkat yang dibutuhkan termasuk kebijakan pengembangan kurikulum tertulis dari masing-masing institusi secara permanen. Dari lima LPTK yang ada, hanya FKIB-Unib yang telah menerapkan kurikulum KKNi dan berjalan baik sedangkan yang lain masih dalam proses finalisasi struktur kurikulum yang diharapkan.¹⁴⁵ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat pada kajian Kurikulum berbasis KKNi. Perbedaannya terdapat pada sub fokusnya. Penelitian Ali Akbar Jono membahas terkait kesiapan, prospek dan kendala dalam pengimplementasian kurikulum berbasis KKNi, sementara yang akan penulis bahas terkait manajemen kurikulum mulai dari proses perencanaan, penataan, Implementasi serta evaluasi kurikulum di perguruan tinggi keagamaan Islam berbasis KKNi.

¹⁴⁵ Ali Akbar Jono, "Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu", *Manhaj*, Vol. 4 No. 1 (2016), hal. 57–68,, h. 57

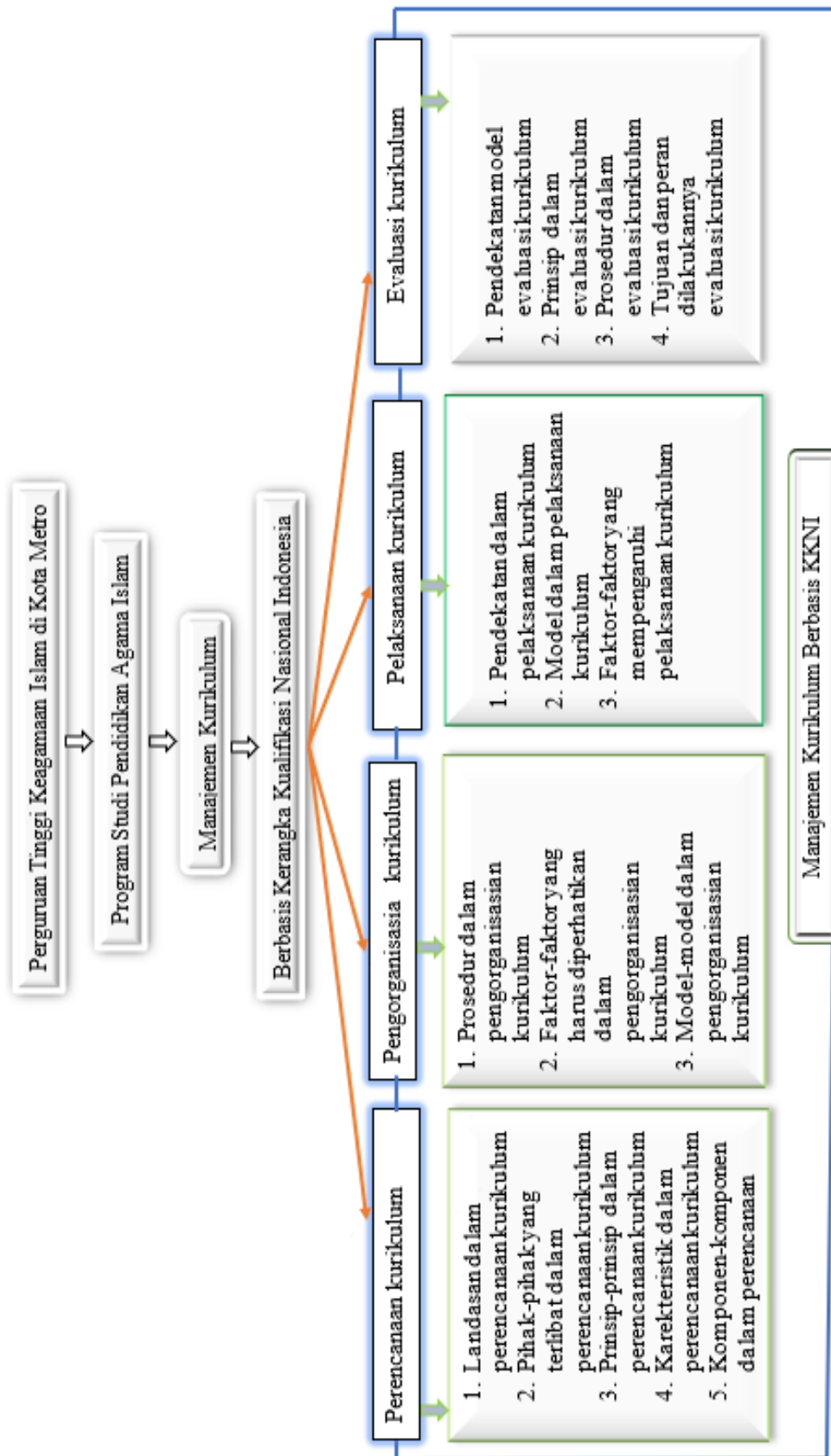
E. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kota Metro. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di kota Metro ini terdiri dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro, Institut Agama Islam Agus Salim Metro dan Universitas Muhammadiyah Metro. Penelitian ini dilaksanakan di program studi Pendidikan agama Islam di empat perguruan tinggi keagamaan Islam tersebut. Perguruan tinggi ini memiliki latar dan status kampus yang berbeda naungan organisasi dan akreditasi menjadi daya tarik untuk dilakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dalam manajemen kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia di program studi pendidikan agama Islam. Kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini hadir untuk mengatasi berbagai permasalahan di perguruan tinggi. Permasalahan tersebut diantaranya dapat dilihat adanya berbagai *missing link* antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia kerja.

Kurikulum perguruan tinggi berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini harus dikelola dengan baik oleh perguruan tinggi. Kurikulum perlu dikelola dengan baik karena kurikulum merupakan penjamin sistem penilaian dan sistem kendali mutu *input*, proses dan *outcome* program studi dan perguruan tinggi. Manajemen kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi kurikulumnya. Perencanaan kurikulum harus memperhatikan beberapa hal agar perencanaannya berjalan dengan baik. Hal-hal yang

diperhatikan dalam perencanaan meliputi: landasan dalam perencanaan kurikulum, pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan kurikulum, prinsip-prinsip dalam perencanaan kurikulum, karakteristik dalam perencanaan kurikulum dan komponen-komponen dalam perencanaan. Pengorganisasian kurikulum harus memperhatikan beberapa hal agar pengorganisasiannya berjalan dengan baik. Pengorganisasian kurikulum berjalan dengan baik apabila terdapat unsur-unsur terkait prosedur dalam pengorganisasian kurikulum, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian kurikulum dan model-model dalam pengorganisasian kurikulum. Pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan beberapa hal agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. hal-hal tersebut yaitu: pendekatan dalam pelaksanaan kurikulum, model dalam pelaksanaan kurikulum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Evaluasi kurikulum harus memperhatikan beberapa hal agar evaluasinya berjalan dengan baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam evaluasi adalah: pendekatan model evaluasi kurikulum, prinsip dalam evaluasi kurikulum, prosedur dalam evaluasi kurikulum dan tujuan serta peran dilakukannya evaluasi kurikulum.

Penelitian ini akan bermanfaat secara teoritis dan praktis tentang manajemen kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia bagi perguruan tinggi keagamaan Islam khususnya prodi pendidikan agama Islam di kota Metro. Selanjutnya untuk memudahkan dalam memahami kerangka pikir penelitian ini, penulis gambarkan langkah-langkah proses penelitian (desain penelitian) sebagai berikut:



Gambar 2.2
 Kerangka Pikir Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muzjaji, Ahmad Ibnu Daud. *مقدمة الإدارة الإسلامية* Cet. 1. Jeddah: Saudi Arabia, 2000.
- Al-Nahlawy, Abdurrahman. *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insan Pers, 2013.
- Allan C. Ornstein and, Francis P. Hunkins. *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. USA: Pearson, 2009.
- Aly, Hery Noer. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 2009.
- Amstrong, Michael. *Armstrong's Handbook of management and Leadership : A Guide to Managing for Result*,. London: Kogan Page Limited, 2009.
- Andayan, Abdul Majid dan Dian. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ardiansyah, Muafid. "Internalisasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Konstruksi Kurikulum Pendidikan Tinggi (Studi Fenomenologi Pada Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang)". 2017.
- Arifin, Zainal. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Azra, Azyumardi. *Esai-Esai Intelektual Muslim pendidikan Islam*,. Jakarta: Logos, 1999.
- Beane, Jame A. *Curriculum Integration "Designing The Core of Democratic Education."* New York and London: Teachers College Press, Columbia University, 1996.
- Biklen, Robert C Bogdan and Sari Knopp. , *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*,. Boston: Aliyn and Bacon, Inc, 1998.
- Bondi, Wiles Jon and Joseph. *Curriculum Development A Guide To Practice*. New Jersey: Merril Prentice Hall, 2002.
- Casmini, Casmini. "Evaluasi Dan Peninjauan Kurikulum BKI Berbasis KKNI". *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*. Vol. 11 no. 1 (2014), hal. 125–44. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2014.111-07>.
- Chaudhary, G K. "Factors affecting curriculum implementation for students". *International Journal of Applied Research*. Vol. 1 no. 12 (2015), hal. 984–86. tersedia pada www.allresearchjournal.com (2015).
- Cronbach, L. E. *Course Improvement Through Evaluation, dalam Educational Evaluation : Theory and Practice*. Belmont – California: Wadsworth Pub.Co, 1982.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Pendidikan Islam* Cet. X. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Direktorat Pembelajaran kementerian Riset, teknologi dan pendidikan tinggi. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*. 2016. tersedia pada <http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Panduan-Penyusunan-Kurikulum-PT-Tahun-20161.pdf> (2016).
- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan

- Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. “Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi”. 2018.
- Drucker, Peter F. *Innovation and Entrepreneurship*. New York: Herper & Collins, 1985.
- Et.al, Felix Mulengeki. *Curriculum Development and Evaluation*. Tanzania: Faculty of Education The Open University of Tanzania, 2013.
- Fatah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Fauzi, Ahmad, dan Hade Afriansyah. “Manajemen Kurikulum”. *Universitas Negeri Padang*. 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/zpvr7>.
- Fullan, M.G. *The Meaning Of Educational Chang*. New York: Teacher College Press, 1991.
- Furchan, Arief. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hamalik, Oemar. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Cet. 4*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- . *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- . *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
- Hambali, Akhmad Saufi. “Menggagas Perencanaan Kurikulum Menuju Sekolah Unggul”. *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 3 no. 1 (2019), hal. 29–54. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v1i1.161>.
- Hakim, Rosniati. *Metodologi studi islam I* Cet. Pertama. Padang: Hayfa Press, 2009.
- Harold koontz, Dkk. *Management*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1980.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Hollenbeck, John A. Wagner III & John R. *Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage*. New York: Routledge, 2010.
- Hornby, AS. *Oxford advanced Learner’s Dictionary of Current English*. London: Oxford University Press, 1987.
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jono, Ali Akbar. “Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di LPTK Se-Kota Bengkulu”. *Manhaj*. Vol. 4 no. 1 (2016), hal. 57–68.
- Juanda, Anda. “Integrasi Ilmu Alam (Sains) dan Agama Berbasis Kurikulum Grass Roots di Perguruan Tinggi Islam”. *Scientiae Educatia*. Vol. 3 no. 1 (2014), hal. 79–88.
- Kahmad, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Kalimantara, Brenda. “Manajemen Quality Assurance Sebagai Upaya

- Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sekolah”. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*. Vol. 1 no. 1 (2016), hal. 52–59. <https://doi.org/10.17977/um025v1i12016p052>.
- Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta, 2015.
- Kurniawan, Deni. “Model dan Organisasi Kurikulum”., 1–45. Bandung: UPI Bandung, 2014.
- Lazwardi, Dedi. “Manajemen Kurikulum Sebagai Pengembangan Tujuan Pendidikan”. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*. Vol. 7 no. 1 (2017), hal. 99–112.
- Lubis, Adlan Fauzi. “Manajemen Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di Perguruan Tinggi Islam”. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 4 no. 2 (2020), hal. 146–58. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1248>.
- Maslahah, Any Umy. “Penerapan Kurikulum Mengacu KKNI dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan di PTKIN”. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. Vol. 13 no. 1 (2018), hal. 227–48. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.5717>.
- Masykur, R.. *Teori Dan Telaah Pengembangan Kurikulum*, Aura Publisher, 2019, tersedia pada www.aura-publishing.com (2019).
- Masykur, Ruhban et al., “Implementasi Kurikulum KKNI Pada Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”, *Numerical: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 2 No. 1 (2018), <https://doi.org/10.25217/numerical.v2i1.205>.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Muhaimin, Dkk. *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Nasution. *Pengembangan kurikulum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nugrahadi, Eko Wahyu et al. “Analisis Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI di Fakultas Ekonomi Unimed”. *Niagawan*. Vol. 7 no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i1.9349>.
- Nurdin, Syafruddin. “Pengembangan Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Berbasis KKNI di Perguruan Tinggi”. *al-Fikrah*. Vol. V no. 1 (2017), hal. 21–30. <https://doi.org/10.15548/mrb.v1i2.305>.
- P.W.Jackson. *Handbook of Reseach on Curriculum*. New York: Mac Millan Publishing Company, 1991.
- Pahrudin, Agus. *Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Agama Islam di Madrasah Banjarbaru: Grafika Wangi Kalimantan*. Vol. 2. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.

- . “Workshop Kurikulum Berbasis KKNI untuk Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro”. Lampung, 2020.
- Pahrudin, Agus dan Dinda Dona Pratiwi. *Pendekatan Sainifik Dalam Implementasi Kurikulum 2013 & Dampaknya Terhadap Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran Pustaka Ali Imron*. Vol. 1. Lampung, 2019.
- Pascasarjana UIN Raden Intan. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Lampung: Pascasarjana UIN raden Inten Lampung, 2019. tersedia pada <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf> (2019).
- Peraturan Presiden, *PerPres No. 8 th 2012 tentang KKNI*. Jakarta, 2012.
- . *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, 2003.
- Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Print, Murray. *Curriculum Development and design* Diedit oleh Allen & UnwinP. Australia, 1993.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Richard L. Darf Peterj. : Emil Salim, Dkk. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Rusman. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- S., Syamsu Misran. “Manajemen Kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyah”. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. Vol. 4 no. 2 (2019), hal. 117–26.
- S.J.Alessi, C.F.Toepfer and. *Curriculum Planning and Development*. Sidney: Allyn and Bacon Inc, 1986.
- Sanapiah Faisal. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: IKIP, 1990.
- Sangadji, Etta Mamang. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Seller, John P. Miller and W. *Curriculum Perspective and Practice*. New Yord and London: Longman. Inc, 1985.
- Sewang, Anwar. “Model Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam Berbasis Masalah: Studi Kasus pada Jurusan Tarbiyah dan Adab IAIN Parepare”. *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)*. Vol. 3 no. 1 (2019), hal. 1–15.
- Siagian, Beslina Afriani, dan Golda Novatrasio Sauduran Siregar. “Analisis Penerapan Kurikulum Berbasis KKNI di Universitas Negeri Medan”. *PEDAGOGIA*. 2018. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i3.12378>.
- Sindoro, James AF. Stoner dkk Peterj.: Alexander. *Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo, 1996.
- Sugiana, Aset. “Proses Pengembangan Organisasi Kurikulum Dalam Meningkatkan Pendidikan Di Indonesia”. *Jurnal Pedagogik*. Vol. 05 no. 02 (2018), hal. 11. tersedia pada <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik> (2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet, 2016.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukiman. *Pengembangan Kurikulum (Teori dan Praktik pada Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Cet 17*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

- Suparta, Munzier. *Ilmu Hadits*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suparyogo, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Sutopo, Hendyat. *Manajemen dan Organisasi Sekolah*. Malang: IKIP Malang, 1999.
- Tyler, Ralph W. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1975.
- Uhbiyati, Abu Ahmadi dan Nur. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Umiarso, Sukarji dan. *Manajemen dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- UPI, Tim Dosen Administrasi Pendidikan. *Manajemen Pendidikan Ke-6*. Bandung, 2013.
- Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (3 ed.). Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Wahyudin, Dinn. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Wibowo. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Yuliana, Suharsimi Arikunto dan Lia. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media, 2013.
- Zuhairini. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Malang: UIN Press, 2006.